



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ISSN 3407-0994

RCE QUARTERLY REPORT

KAJIAN

FISKAL REGIONAL

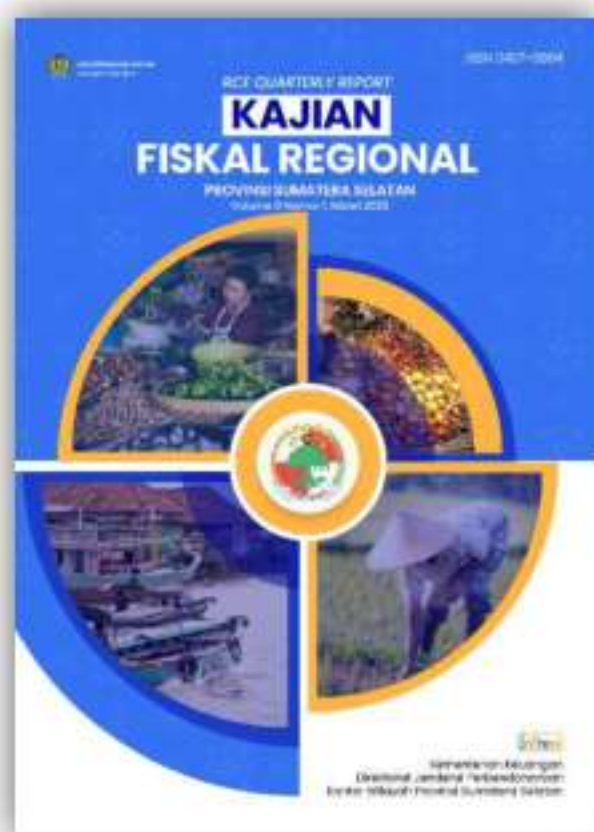
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Volume 8 Nomor 1, Maret 2025



Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Kajian Fiskal Regional
Provinsi Sumatera Selatan
Volume 8 Nomor 1, Maret 2025



Kajian Fiskal Regional diterbitkan oleh Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Sumsel, Kementerian Keuangan, dengan
periode publikasi triwulanan

ISSN 3047-0994

Diterbitkan oleh:

Kanwil DJPb Provinsi Sumsel

Pengarah:

Rahmadi Murwanto (Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel)

Penanggung Jawab:

Setiyo Budi Pramono (Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II)

Reviewer:

Dr. Sukanto, S.E., M.Si. (Local Expert Ekonomi dan Fiskal Provinsi Sumsel)

Yessi Marseilli (Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B)

Kontributor:

1. Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Regional: Yudho Bintoro Sandi
2. Perkembangan Fiskal Regional: Yessi Marseilli, Jaka Trisna, Tomi Afriyanto, Suandi, Nurahman, M. Telly Anggra, Suci Amalia Putri
3. Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah: Suntari dan Hanip Tarmizi
4. Boks 1. Fenomena Deflasi dan Penurunan Daya Beli Masyarakat Sumsel di Awal 2025: Dr. Sukanto, S.E., M.Si.
5. Boks 2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sumsel di Awal 2025: Dr. Sukanto, S.E., M.Si.
6. Boks 3. Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Sumsel di Awal 2025: Dr. Sukanto, S.E., M.Si.

Desain dan Layout: Nur Rahma Kartika

Alamat Redaksi: Gedung Keuangan Negara Palembang Lantai II

Jl. Kapten A. Rivai No. 2-4 Palembang

Situs Web: <https://djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/>

Download KFR



Feedback



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2025.

KFR berperan untuk memberikan gambaran perkembangan implementasi kebijakan fiskal Pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian regional Provinsi Sumatera Selatan selama triwulan I 2025. Penyusunan KFR ini diharapkan dapat menjadi alat analisis, evaluasi dan menjadi media informasi yang bernilai strategis baik bagi Kementerian Keuangan maupun bagi para mitra kerja Kementerian Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyediakan data dan informasi dan telah berpartisipasi dalam penyelesaian KFR Provinsi Sumatera Selatan ini. Kami berharap koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan KFR Provinsi Sumatera Selatan dapat terus berlanjut secara berkala di masa mendatang, guna mendukung kesinambungan implementasi kebijakan fiskal di Sumatera Selatan. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak, selalu kami harapkan, agar dapat menjadi perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kualitas dari hasil kajian yang dilakukan.

Harapan kami, semoga KFR Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2025 ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembuat dan pelaksana kebijakan di Sumatera Selatan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran demi terwujudnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 28 Mei 2025

Kepala Kantor Wilayah DJPb
Provinsi Sumatera Selatan



Ditandatangani secara elektronik
Rahmadi Murwanto

Daftar Isi

Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	v
Dashboard	vii

01

Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Regional

1.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi	9
1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	9
1.1.2	Inflasi	14
1.2	Perkembangan Indikator Kesejahteraan	16
1.2.1	Ketenagakerjaan	16
1.2.2	Kemiskinan dan Ketimpangan	17
1.2.3	Nilai Tukar Petani	17
1.2.4	Indeks Pembangunan Manusia	18
Boks 1	Fenomena Deflasi dan Penurunan Daya Beli Masyarakat Sumsel di Awal 2025	18

02

Perkembangan Fiskal Regional

2.1	Pelaksanaan APBN Sumsel	19
2.1.1	Pendapatan Negara	19
2.1.2	Belanja Negara	23
2.1.3	Surplus/Defisit	27
2.1.4	Prognosis Realisasi APBN	28
2.2	Pelaksanaan APBD Sumsel	28
2.2.1	Pendapatan Daerah	29
2.2.2	Belanja Daerah	31
2.2.3	Surplus/Defisit APBD	32
2.2.4	Pembiayaan Daerah	32
2.2.5	Proyeksi APBD	32

03

2.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian	32
2.3.1 Pendapatan Konsolidasian	32
2.3.2 Belanja Konsolidasian	33
2.3.3 Surplus/Defisit	33
2.3.4 Pembiayaan Konsolidasian	33
2.4 Perkembangan Pelaksanaan Program MBG	33
Boks 2 Perkembangan Nilai Petani Sumsel	36

Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah

3.1 Pendahuluan	37
3.2 Analisis Tematik	37
3.2.1 Perkembangan Koperasi di Sumatera Selatan	37
3.2.2 Dukungan Pemerintah untuk Pengembangan Koperasi di Sumatera Selatan	39
3.3 Tantangan dalam Pengembangan Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan	40
3.4 Strategi Pengembangan Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan	40
3.5 Rekomendasi: Peran Kanwil DJPb Sumatera Selatan dalam Pengembangan Koperasi di Daerah	42
3.6 Potensi Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan	42
Boks 3 Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Provinsi	44

04

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dan Rekomendasi	45
----------------------------	----

Daftar Tabel

02

Tabel 2.1	Laporan Realisasi APBN di Provinsi Sumatera Selatan 2023-2025 (Triwulan I)	19
Tabel 2.2	Penerimaan Per Kelompok Pajak Triwulan I 2024 dan 2025 (c-to-c)	21
Tabel 2.3	Realisasi Impor dan Bea Keluar Per Komoditas Triwulan I 2025	22
Tabel 2.4	Proyeksi Realisasi APBN Sumsel 2025	28
Tabel 2.5	Laporan Realisasi APBD Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan I 2024-2025 (c-to-c)	29
Tabel 2.6	Kondisi Kemandirian Fiskal Pemda di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2024	30
Tabel 2.7	Proyeksi Realisasi APBD Sumsel Tahun 2025	32
Tabel 2.8	Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Sumsel s.d. Triwulan I 2024-2025 (c-to-c)	33
Tabel 2.9	Data NTP per subsektor triwulan I tahun 2025	34

03

Tabel 2.1	Jumlah Koperasi Aktif Per Kab/Kota	37
Tabel 2.2	Jumlah Aset Koperasi Aktif Per Kab/Kota (dalam miliar)	38

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Sumsel (yoy,%)	9
Grafik 1.2	Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Q1 2025 di wilayah Sumatera	9
Grafik 1.3	Perkembangan Perjalanan Wisatawan Nusantara Sumsel	9
Grafik 1.4	Perkembangan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Sumsel	9
Grafik 1.5	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Komponen Pengeluaran (yoy,%)	10
Grafik 1.6	Rata-Rata Hasil Survei Konsumen Kota Palembang	10
Grafik 1.7	Perkembangan Kredit Perbankan di Wilayah Sumsel	10
Grafik 1.8	Perkembangan PMA dan PMDN Wilayah Sumsel	11
Grafik 1.9	Perkembangan Neraca Perdagangan Sumsel	11
Grafik 1.10	Perkembangan Harga Komoditas Internasional	12
Grafik 1.11	Perkembangan Top Komoditas Ekspor Sumsel (Juta USD)	12
Grafik 1.12	Pangsa Ekspor Sumsel Q1 2025 Menurut Negara Tujuan (%)	12
Grafik 1.13	Perkembangan Top Komoditas Impor Sumsel (Juta USD)	12
Grafik 1.14	Pangsa Impor Sumsel Q1 2025 Menurut Negara Asal (%)	13
Grafik 1.15	Perkembangan Aktivitas Bongkar-Muat Luar Negeri Sumsel	13
Grafik 1.16	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Komponen Lapangan Usaha (yoy,%)	13
Grafik 1.17	TPK dan RLM Hotel Berbitang Sumsel	14
Grafik 1.18	Perkembangan Inflasi Tahunan Sumsel dan Nasional (%)	14
Grafik 1.19	Inflasi Tahunan Maret 2025 Provinsi di Regional Sumatera (%)	15
Grafik 1.20	Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran (%)	15
Grafik 1.21	Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan TPAK Sumsel	16

02

Grafik 1.22	Penyerapan Tenaga Kerja Sumsel Menurut Lapangan Usaha Februari 2025	16
Grafik 1.23	Perkembangan Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumsel (%)	17
Grafik 1.24	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sumsel	17
Grafik 1.25	Perkembangan Gini Ratio Sumsel	17
Grafik 1.26	Perkembangan Nilai Tukar Petani Sumsel	17
Grafik 1.27	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Sumsel	18
Grafik 2.1	Perkembangan Realisasi Belanja dan Pendapatan Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)	20
Grafik 2.2	Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Pendapatan Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)	21
Grafik 2.3	Kontributor Pendapatan Negara Triwulan I 2025	21
Grafik 2.4	Perkembangan Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)	22
Grafik 2.5	Perkembangan Volume dan Harga Patokan Ekspor CPO & Turunannya	22
Grafik 2.6	Realisasi Per Jenis PNBPN Sumsel (c-to-c)	23
Grafik 2.7	Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Belanja Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)	23
Grafik 2.8	Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat per Jenis	24
Grafik 2.9	Perkembangan Belanja Pegawai	24
Grafik 2.10	Perkembangan Belanja Barang	24
Grafik 2.11	Perkembangan Belanja Modal	25
Grafik 2.12	Perkembangan Belanja Bantuan Sosial	25
Grafik 2.13	Realisasi dan Kontribusi BPP per Unit Organisasi	25

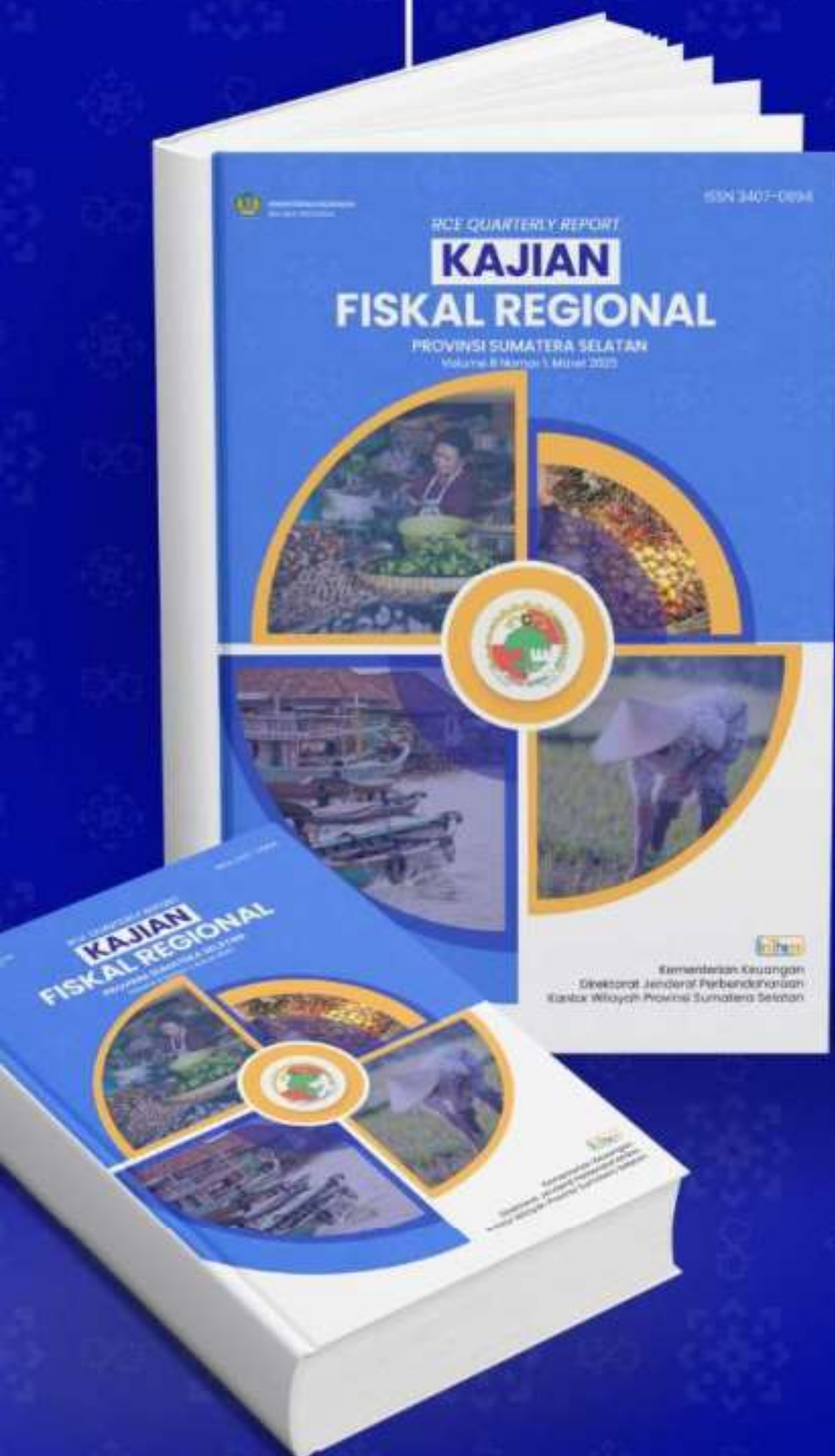
Grafik 2.14	Kontribusi Transfer ke Daerah per Jenis	26
Grafik 2.15	Perkembangan Dana Bagi Hasil	26
Grafik 2.16	Perkembangan Dana Alokasi Umum	26
Grafik 2.17	Perkembangan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	27
Grafik 2.18	Perkembangan Insentif Fiskal	27
Grafik 2.19	Perkembangan Dana Desa	27
Grafik 2.20	Perkembangan Hibah ke Daerah	27
Grafik 2.21	Perkembangan Defisit APBN Sumsel	28
Grafik 2.22	Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi Per Jenis Pendapatan Daerah	29
Grafik 2.23	Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30
Grafik 2.24	Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Pendapatan dari Dana Transfer	30
Grafik 2.25	Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Belanja Daerah	31
Grafik 2.26	Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Belanja Operasi	31
Grafik 2.27	Jumlah Penerima MBG Berdasarkan Kelompok Sasaran Data s.d. 31 Maret 2025	33
Grafik 3.1	Jumlah Koperasi Aktif Per Kab/Kota	37
Grafik 3.2	Jumlah Anggota Koperasi Sumatera Selatan	38
Grafik 3.3	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi Sumatera Selatan	38
Grafik 3.4	Jumlah Aset Koperasi di Sumatera Selatan (dalam miliar)	38

Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan penguatan peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist, Kanwil DJPb Sumatera Selatan menyusun Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2025 ini untuk mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome-nya yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Sumsel pada triwulan I tahun 2025 tumbuh solid dengan capaian sebesar 5,22% (yoy), menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Sumatera dan mempertahankan peran strategisnya dalam perekonomian di kawasan Sumatera. Walaupun capaian ini lebih tinggi dari capaian nasional yang berada di angka 4,87%, namun masih berada di bawah target 6% yang ditetapkan Provinsi Sumsel untuk mendukung capaian nasional. Beberapa indikator kinerja pembangunan juga telah menunjukkan progresnya dengan baik, seperti tingkat pengangguran yang sudah berada di angka 3,89%, dari target 3,95 yang harus dicapai Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2025. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang berada di angka 10,51%, dari target 10,76%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 73,84, melampaui target yg ditetapkan pada angka 71,96. Nilai Tukar Petani (NTP) juga dalam tren peningkatan yang mencapai 132,94 pada Maret 2025. Inflasi pada Maret 2025 berada di angka 1,77%, terjaga dalam rentang target $2,5\% \pm 1\%$. Indikator lain yang masih perlu dikawal pencapaiannya di 2025 adalah tingkat ketimpangan (rasio gini) masih berada di angka 0,331, lebih tinggi dari target 0,316.

Dari sisi fiskal APBN, Pendapatan Negara selama triwulan I 2025 mencapai 18,53% dari target atau sebesar Rp3,31 triliun, tumbuh 7,8% (yoy) dengan kontributor terbesar dari PPN, yaitu sebesar 52,98% dari total penerimaan pajak



Sementara realisasi Belanja Negara mencapai 20,75% dari pagu atau senilai Rp10,20 triliun yang berasal dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada Kementerian negara/Lembaga sebesar Rp2,53 triliun dan TKD sebesar Rp7,67 triliun. Pertumbuhan negatif terjadi pada BPP yang berkontraksi 32,38% (yoy) sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun Transfer ke Daerah (TKD) menjadi penopang kinerja belanja APBN/penyangga konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan positif 15,27% (yoy) sehingga kontraksi belanja negara secara keseluruhan tidak terlalu dalam.

Di tengah transisi pemerintahan baru dan kebijakan efisiensi belanja, kinerja APBD di Sumatera Selatan sampai dengan akhir triwulan I masih on-track. Kinerja pendapatan berkontraksi, hanya tercapai Rp7,49 triliun, tumbuh negatif 20,72% (yoy) sedangkan kinerja belanja masih tumbuh positif, mencapai Rp5,04 triliun, tumbuh 14,64% (yoy). Tantangan pada APBD Sumsel adalah pada sisi pendapatan daerah yang masih sangat bergantung pada pendapatan dari dana transfer, kondisi ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang masih sangat rendah. Sedangkan pada sisi belanja daerah, proporsi belanja operasional masih sangat tinggi, sementara pada belanja modal yang diharapkan dapat memberikan impact pada perekonomian daerah masih sangat rendah proporsinya. Kinerja positif belanja daerah di tengah kebijakan efisiensi ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat di awal tahun untuk akselerasi kinerja belanja agar target/output kegiatan dapat segera dicapai dan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Salah satu program unggulan pemerintah saat ini yang menjadi prioritas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan bertahap sejak 6 Januari 2025.

Implementasi program ini diharapkan dapat mengakhiri kelaparan sekaligus memperbaiki kesehatan dan gizi para penerima manfaat sehingga akan dapat menurunkan prevalensi stunting. Selain itu program MBG juga dapat meningkatkan produktivitas daerah melalui pemberdayaan lahan, petani, peternak, nelayan, dan UMKM serta menyerap tenaga kerja di daerah, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumsel. Sampai dengan akhir Maret 2025, sudah terdapat 50 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dengan total penerima 152.148 orang. Jumlah SPPG dan penerima MBG ini akan semakin bertambah seiring dengan kesiapan SPPG. Program prioritas pemerintah ini berpotensi memberikan multiplier effect yang besar di Sumatera Selatan sehingga perlu dikawal implementasinya.

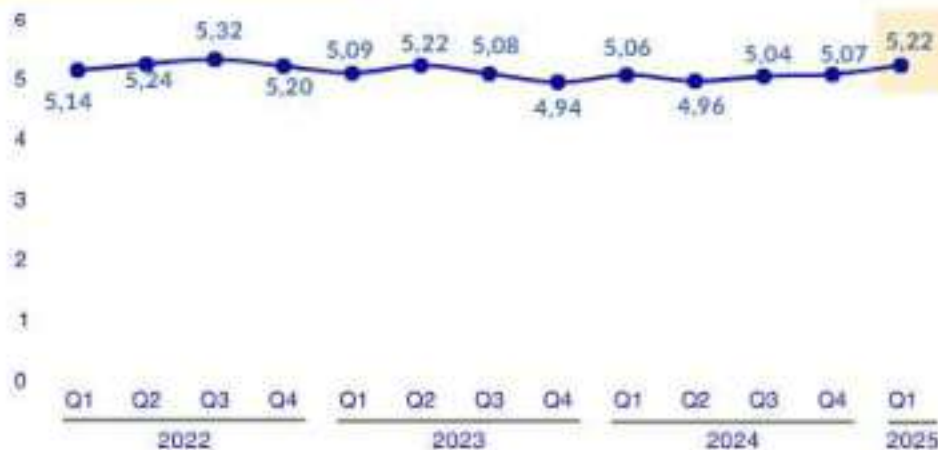
Selanjutnya pada analisis tematik KFR Triwulan I tahun 2025 ini diangkat topik peran dan strategi pengembangan koperasi di daerah. Salah satu tantangan yang dihadapi koperasi di Sumsel adalah keterbatasan akses terhadap modal dan informasi serta tantangan dalam menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kanwil DJPb Sumsel dapat berperan sebagai katalisator dalam pengembangan koperasi di Sumsel.

Secara keseluruhan kinerja ekonomi dan fiskal Sumsel selama triwulan I tahun 2025 on-track namun perlu terus dikawal agar dapat ditingkatkan pada periode selanjutnya sehingga seluruh target pembangunan dapat segera tercapai dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Sumsel.

Dashboard Ekonomi Regional

Indikator Makro Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi (c - to - c)



Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh solid pada triwulan I 2025 dengan capaian 5,25% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan menjadi pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Sumatera.

Laju Inflasi (%)



Dari sisi harga, inflasi Sumsel mencapai 1,77% (yoy) pada Maret 2025, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya namun masih berada dalam sasaran target inflasi nasional.

Sumber: BPS Provinsi Sumsel

Indikator Kesejahteraan

Selain pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, Perkembangan indikator kesejahteraan Sumsel hingga triwulan I 2025 menunjukkan perkembangan yang terus membaik.

Kemiskinan

(Per September 2024)
10,51%

Gini Ratio

s.d. September 2024
0,331

Tingkat Pengangguran Terbuka

s.d. Februari 2024
3,89%

Tingkat Pengangguran Terbuka

per Maret 2025
132,94

Sumber: BPS Provinsi Sumsel

Pengembangan Koperasi

Pada Tahun 2023 jumlah koperasi aktif yang ada di Wilayah Sumatera Selatan meningkat dari tahun 2022 sebesar 2%.

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Ogan Komering Ulu	294	298	301
2	Ogan Komering Ilir	457	463	477
3	Muara Enim	304	311	319
4	Lahat	144	151	158
5	Musi Rawas	549	561	570
6	Musi Banyuasin	350	366	392
7	Banyuasin	146	159	176
8	Ogan Komering Ulu Selatan	49	52	52
9	Ogan Komering Ulu Timur	200	210	220
10	Ogan Ilir	133	137	139
11	Empat Lawang	114	121	125
12	Penukal Abab Lematang Ilir	106	112	119
13	Musi Rawas Utara	105	116	119
14	Palembang	755	774	794
15	Prabumulih	119	121	124
16	Pagar Alam	34	37	41
17	Lubuk Linggau	126	130	131
Total		3.985	4.119	4.257

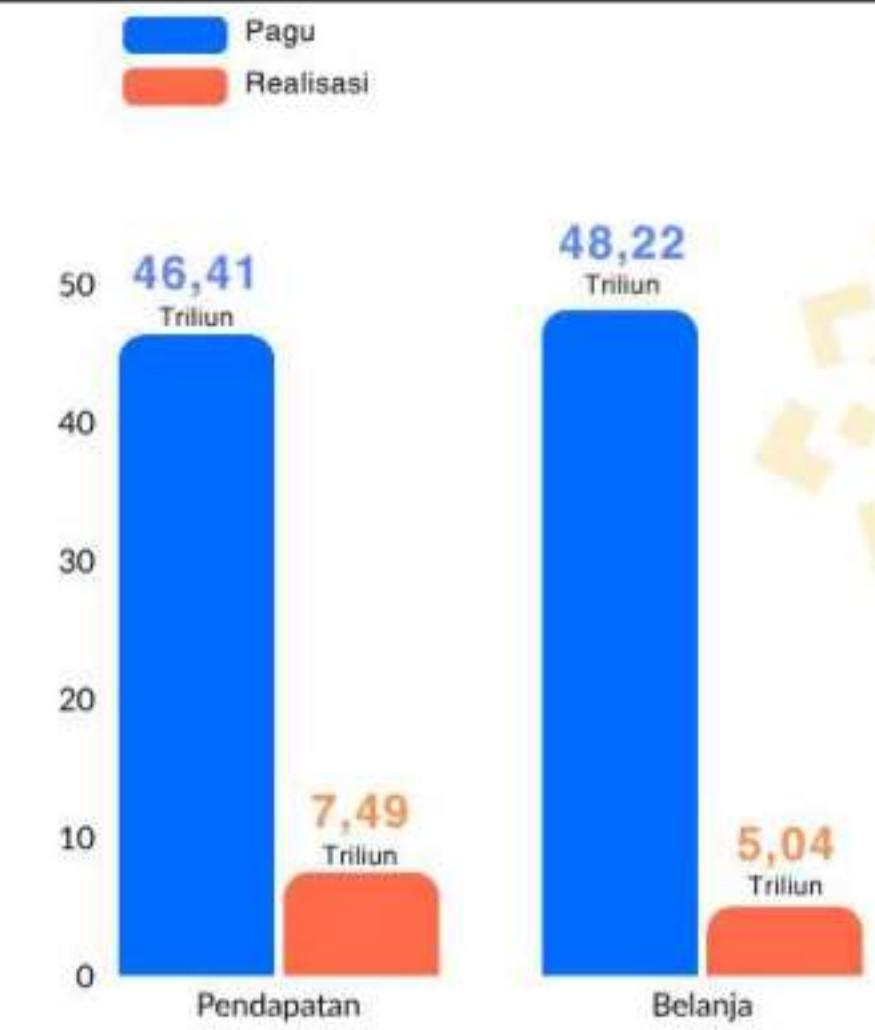


Kinerja Fiskal Regional

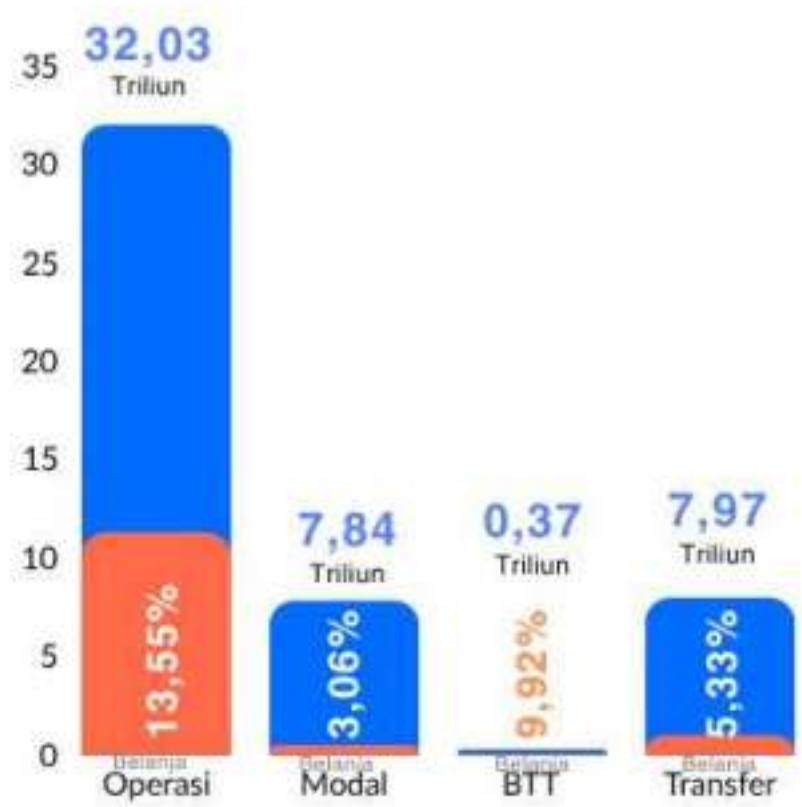
Triwulan I Tahun 2025



Sumber: Online Monitoring SPAN



Sumber: Dit. APK, DJPb





Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Regional

Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh solid pada triwulan I 2025 dengan capaian sebesar 5,22% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya dan menjadi pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Pemulihan ini ditopang oleh meningkatnya permintaan domestik, ekspor yang kembali ekspansif, serta pulihnya konsumsi masyarakat selama Ramadhan dan menjelang HBKN Idul Fitri.

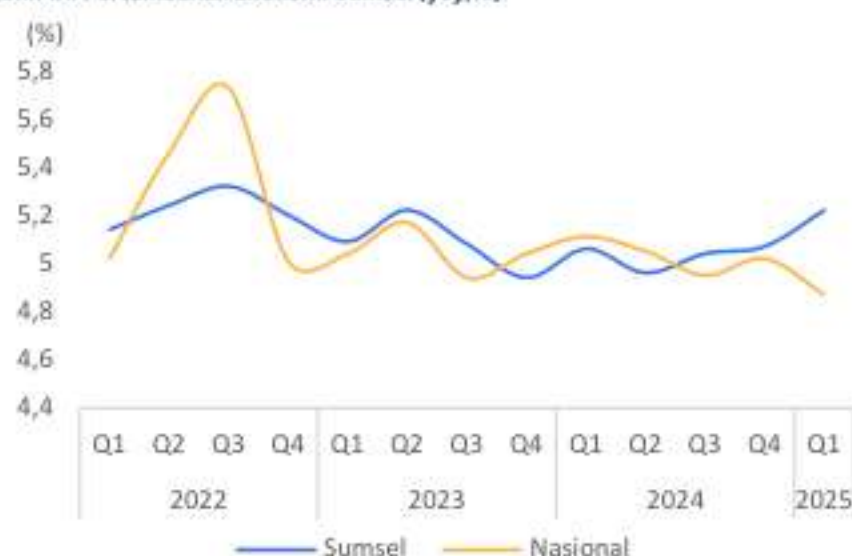
- Dari sisi pengeluaran, penguatan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan net ekspor yang membaik. Konsumsi rumah tangga didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, efek musiman Ramadhan, dan membaiknya daya beli. Di sisi lain, net ekspor tumbuh positif didorong oleh kenaikan volume dan nilai ekspor komoditas utama ke mitra dagang utama seperti Tiongkok dan India.
- Dari sisi lapangan usaha, kinerja ekonomi ditopang oleh lima sektor utama dengan kontribusi tertinggi, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi. Sektor Pertambangan tumbuh stabil seiring peningkatan produksi batu bara, Industri Pengolahan dan Perdagangan meningkat seiring naiknya permintaan bahan baku dan barang konsumsi, sementara sektor Pertanian menunjukkan pemulihan dengan dukungan kenaikan Nilai Tukar Petani.
- Dari sisi harga, inflasi Sumsel mencapai 1,77% (yoy) pada Maret 2025, meningkat dibanding bulan sebelumnya namun masih berada dalam sasaran target inflasi nasional. Kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh lonjakan harga pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta komoditas pangan selama bulan Ramadhan dan menjelang HBKN Idul Fitri, dengan penyumbang utama meliputi emas perhiasan, bawang merah, dan bahan bakar rumah tangga.
- Secara spasial, inflasi Sumsel menjadi tertinggi kedua di Pulau Sumatera, dan juga bervariasi antar kota/kabupaten IHK. Kabupaten Muara Enim mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,03% (yoy), sedangkan Lubuklinggau terendah dengan inflasi 1,28%. Komoditas seperti tarif listrik, bawang merah, dan emas perhiasan menjadi penyumbang utama inflasi di sebagian besar kota/kabupaten sampel IHK di Sumsel.
- Di sisi kesejahteraan, kondisi ketenagakerjaan membaik, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 69,35% dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 3,89%. Kualitas tenaga kerja juga meningkat seiring bertambahnya pekerja formal dan penurunan pekerja paruh waktu. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) juga menguat menjadi 132,94, tertinggi dalam 3 tahun terakhir, mencerminkan membaiknya daya beli petani di sebagian besar subsektor, khususnya tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan peternakan.

1.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sumsel tetap terjaga di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Sumsel pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 5,22% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,06% (yoy). Kinerja ini menandakan terjaganya momentum pemulihan ekonomi Sumatera Selatan meskipun berada dalam tekanan perlambatan ekonomi global dan nasional, serta fluktuasi harga energi dan komoditas ekspor unggulan. Pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang hanya sebesar 4,87% (yoy) juga mencerminkan ketahanan ekonomi daerah dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan sektor produksi. Secara triwulanan, ekonomi Sumatera Selatan tumbuh tipis sebesar 0,16% (qoq), mengindikasikan pemulihan yang berjalan gradual seiring dengan faktor musiman dan belum optimalnya akselerasi belanja pemerintah maupun investasi swasta.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumsel (yoy, %)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Secara spasial, Sumsel menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Sumatera dan mempertahankan peran strategisnya dalam perekonomian kawasan. Dengan pertumbuhan sebesar 5,22% (yoy), Sumsel hanya berada di bawah Provinsi Lampung dan mengungguli provinsi besar lainnya seperti Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Riau. Dalam hal kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sumatera, Sumsel menempati posisi ketiga dengan porsi sebesar 13,58%, setelah Sumatera Utara (23,5%) dan Riau (23,33%). Kondisi ini menunjukkan bahwa Sumsel tetap menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional di wilayah barat Indonesia, baik dari sisi produksi, perdagangan, maupun distribusi.

Grafik 1.2. Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Q1 2025 di Wilayah Sumatera



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Peningkatan mobilitas masyarakat dan pariwisata domestik menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi Sumsel. Pada triwulan I 2025, jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) asal Sumatera Selatan tercatat sebanyak 5,95 juta perjalanan, meningkat sebesar 37,47%(yoy). Kunjungan wisnus ke Sumsel juga meningkat signifikan menjadi 5,82 juta perjalanan, atau tumbuh sebesar 44,47% (yoy), sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat selama momentum libur nasional dan keagamaan seperti Tahun Baru, Imlek, Ramadhan, dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di sisi transportasi, jumlah penumpang kereta api tumbuh 7,91% (yoy), penumpang angkutan laut naik 25,86% (yoy), dan penumpang angkutan udara meningkat 6,52% (yoy). Peningkatan mobilitas ini turut diperkuat oleh pencairan THR, diskon tarif transportasi, dan terjaganya daya beli, sehingga mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, serta penyediaan makanan dan minuman di awal 2025.

Grafik 1.3. Perkembangan Perjalanan Wisatawan Nusantara Sumsel



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Grafik 1.4. Perkembangan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Sumsel



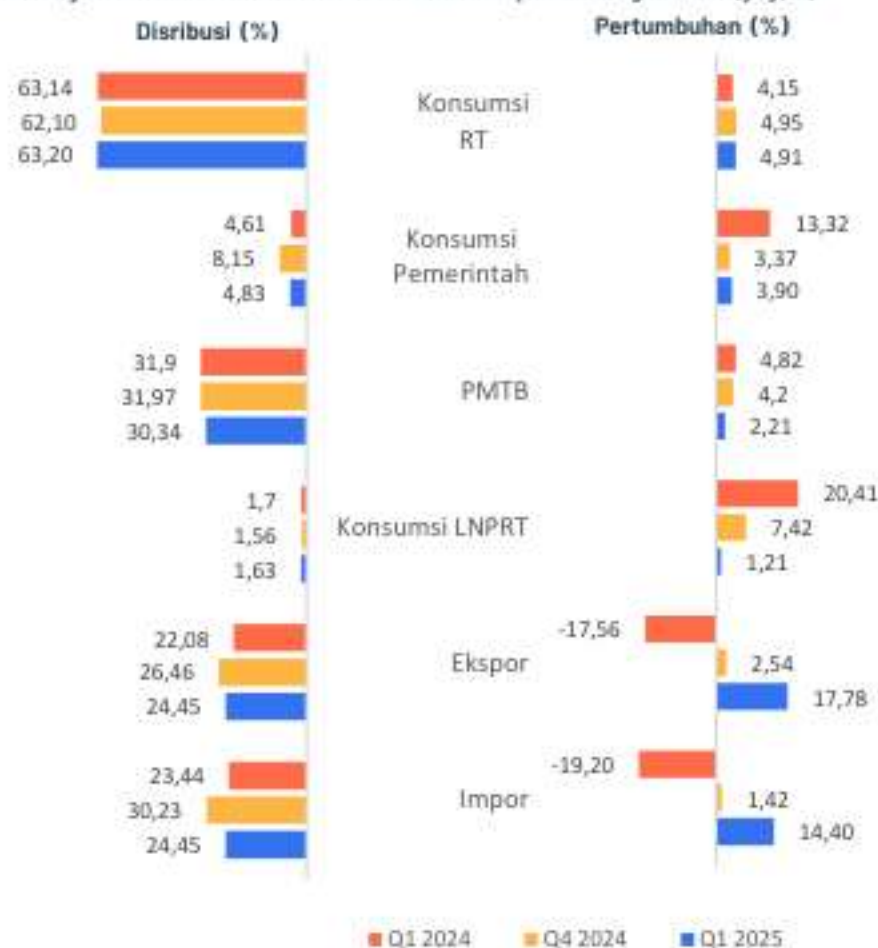
sumber: BPS Sumsel (diolah)

1.1.1.1. PDRB Menurut Pengeluaran

Struktur PDRB Sumatera Selatan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto. Pada triwulan I 2025, konsumsi rumah tangga menyumbang porsi terbesar terhadap total PDRB sebesar 63,20%, disusul oleh PMTB sebesar 30,34%. Ekspor dan impor masing-masing berkontribusi 24,45%, dengan kontribusi konsumsi pemerintah dan konsumsi lembaga nonprofit (LNPR) yang lebih kecil, yaitu 4,83% dan 1,63%. Dibandingkan triwulan sebelumnya, sebagian besar komponen mengalami penurunan kontribusi, terutama konsumsi pemerintah yang turun tajam dari 8,15% menjadi 4,83%. Struktur ini menegaskan bahwa perekonomian Sumatera Selatan masih bergantung pada permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi

fisik, meskipun peran perdagangan luar negeri mulai meningkat kembali.

Grafik 1.5. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Komponen Pengeluaran (yoy,%)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Dari sisi pertumbuhan, ekspor luar negeri menjadi komponen dengan laju pertumbuhan tertinggi pada triwulan I 2025, setelah sempat mengalami kontraksi dalam periode yang sama tahun lalu. Ekspor tumbuh sebesar 17,78% (yoy), berbalik arah dari kontraksi -17,56% pada triwulan I 2024, mencerminkan pulihnya permintaan global terhadap komoditas unggulan Sumsel seperti batubara, CPO, dan produk turunan karet. Impor barang dan jasa juga melonjak sebesar 14,40% (yoy), membalikkan kondisi dari kontraksi 19,2% (yoy) pada tahun sebelumnya, menunjukkan bangkitnya aktivitas produksi domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh stabil sebesar 4,91% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan I 2024 (4,15%), mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap kuat di tengah inflasi yang terkendali. Konsumsi pemerintah tumbuh moderat sebesar 3,90% (yoy), jauh lebih rendah dibanding triwulan I 2024 (13,32%), dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja barang dan modal di awal tahun. Sementara itu, pertumbuhan PMTB juga melambat menjadi 2,21% (yoy) dari 4,82% (yoy) tahun lalu, mengindikasikan kehati-hatian pelaku usaha dan pemerintah dalam ekspansi fisik. Konsumsi LNPRT hanya tumbuh 1,21%, menurun tajam dibanding lonjakan 20,41% pada triwulan I 2024, yang sebelumnya dipengaruhi oleh aktivitas sosial dan politik menjelang pemilu serta pilkada.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama PDRB dari sisi pengeluaran dengan kontribusi sebesar 63,2% dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,91% (yoy), mencerminkan daya beli masyarakat Sumatera Selatan yang relatif terjaga pada awal tahun 2025. Momentum Ramadhan yang jatuh pada akhir triwulan I turut mendorong peningkatan konsumsi, terutama pada kelompok makanan-minuman, sandang, dan rekreasi. Selain itu, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN/TNI/Polri dan pekerja swasta menjadi katalisator penting dalam menggerakkan belanja masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pemulihan konsumsi ini juga tercermin dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, di mana Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 125,3 pada triwulan I 2025, meningkat dari 120,1

pada triwulan sebelumnya. Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga mengalami penguatan, masing-masing dari 110,3 menjadi 114,2 dan dari 129,8 menjadi 136,5. Ketiga indeks tersebut tetap berada jauh di atas ambang batas optimisme (100), menunjukkan keyakinan konsumen terhadap prospek penghasilan, lapangan kerja, dan kondisi ekonomi ke depan. Pemulihan sentimen ini sekaligus mencerminkan mulai pulihnya persepsi masyarakat setelah tekanan yang terjadi pada paruh kedua 2024, seiring stabilisasi harga dan terjaganya ritme pemulihan ekonomi daerah.

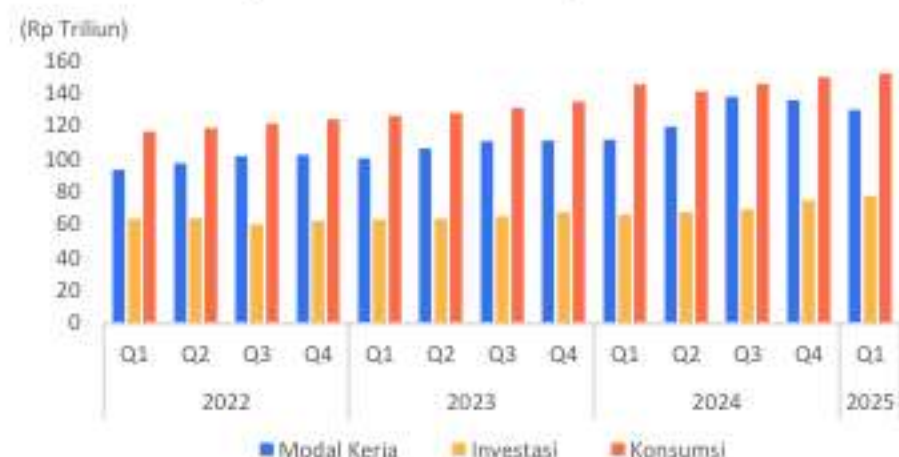
Grafik 1.6. Rata-Rata Hasil Survei Konsumen Kota Palembang



sumber: Bank Indonesia (diolah)

Peningkatan konsumsi rumah tangga turut didukung oleh ketersediaan akses pembiayaan yang semakin ekspansif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit konsumsi di Sumatera Selatan pada triwulan I 2025 mencapai Rp151,92 triliun, atau tumbuh sebesar 1,58% (qtq) dan 4,69% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu. Angka ini merupakan level tertinggi sepanjang seri data triwulanan sejak 2022. Pertumbuhan kredit konsumsi menunjukkan peran penting lembaga keuangan dalam mendukung belanja masyarakat, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga, pembelian kendaraan, serta pembiayaan pendidikan dan gaya hidup. Konsistensi tren ini sejak pertengahan 2023 juga mencerminkan kepercayaan konsumen yang mulai pulih, seiring dengan meredanya tekanan inflasi dan meningkatnya literasi serta akses keuangan.

Grafik 1.7. Perkembangan Kredit Perbankan di Wilayah Sumsel



sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 3,90% (yoy) dengan kontribusi 4,83% terhadap PDRB, melambat signifikan dibandingkan pertumbuhan 13,32% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan ini mencerminkan belum optimalnya akselerasi belanja pemerintah di awal tahun, baik dari sisi belanja pemerintah pusat maupun belanja pemerintah daerah. Realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Selatan tercatat Rp2,53 triliun (16,28% dari pagu), terkontraksi 32,38% (yoy). Penurunan ini terutama berasal dari realisasi belanja barang dan belanja modal yang masing-masing turun tajam sebesar -50,25% dan -91,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, konsumsi

pemerintah masih ditopang oleh belanja pegawai yang tumbuh positif 10,47% (yoy), seiring dengan kenaikan gaji ASN dan penyesuaian tunjangan. Selain itu, belanja bantuan sosial juga tumbuh sangat signifikan sebesar 942,64% (yoy), antara lain disalurkan melalui program ATENSI untuk kelompok rentan dan bantuan pendidikan mahasiswa.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) menjadi faktor utama penyangga konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025. Realisasi TKD di Sumatera Selatan mencapai Rp7,67 triliun atau 22,82% dari pagu, meningkat 15,27% (yoy). Peningkatan ini ditopang oleh percepatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,62 triliun, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,90 triliun (naik 29,34%), serta Dana Desa sebesar Rp836,39 miliar (naik 10,77 %). Penyaluran TKD yang lebih awal memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan belanja rutin dan sosial, meskipun DAK Fisik belum disalurkan pada triwulan ini. Di sisi lain, belanja pemerintah daerah dari APBD tumbuh 14,64 % (yoy) menjadi Rp5,04 triliun, dengan pertumbuhan tertinggi pada belanja pegawai (37,98%) dan belanja bansos. Sementara itu, belanja barang dan jasa mengalami kontraksi 16,99%, dan meskipun belanja modal tumbuh 100,77% (yoy), secara nominal masih relatif kecil. Secara keseluruhan, konsumsi pemerintah di Sumatera Selatan pada awal tahun 2025 masih ditopang oleh belanja pegawai, bansos, dan TKD, sementara komponen belanja produktif belum menunjukkan peran optimal sebagai pengungkit pertumbuhan.

PMTB tumbuh sebesar 2,21% (yoy) dengan kontribusi 30,34% terhadap PDRB, melambat dibandingkan pertumbuhan 4,82% pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan ini menunjukkan lemahnya ekspansi investasi fisik, baik dari sisi pemerintah maupun swasta pada awal tahun 2025. Dari sisi pemerintah, kinerja belanja modal K/L di wilayah Sumatera Selatan mengalami kontraksi tajam sebesar 91,00% (yoy), seiring penundaan tender dan pelaksanaan proyek fisik akibat kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025. Di sisi lain, meskipun belanja modal pemerintah daerah (APBD) tumbuh 100,77 % (yoy), namun realisasinya baru mencapai 3,06% dari pagu, menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PMTB masih terbatas secara nominal.

Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa pelaku usaha swasta masih cenderung berhati-hati dalam melakukan ekspansi investasi. Hal ini bisa dipengaruhi oleh sikap *wait and see* pasca tahun politik, normalisasi harga komoditas, serta ketidakpastian global yang masih membayangi dunia usaha. Meskipun kinerja penyaluran kredit investasi di Sumatera Selatan (lihat grafik 1.7) menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 22,28% (yoy) pada triwulan I 2025, namun dampaknya terhadap pembentukan aset tetap belum terlalu terlihat pada awal tahun ini. Dengan kontribusi PMTB yang tetap besar terhadap struktur PDRB namun laju pertumbuhannya melambat, maka penting bagi pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja infrastruktur dan memperbaiki iklim investasi agar dapat kembali menguatkan peran PMTB sebagai motor penggerak ekonomi jangka menengah.

Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mencerminkan tren kehati-hatian di awal tahun 2025. Total investasi yang tercatat di triwulan I 2025 mencapai Rp13,71 triliun, sedikit menurun dibandingkan Rp14,14 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara rinci, investasi PMA tercatat Rp3,88 triliun, turun tipis dari Rp3,83 triliun pada triwulan I 2024, sementara investasi PMDN tercatat Rp9,83 triliun, juga

lebih rendah dari triwulan sebelumnya namun masih lebih tinggi dari triwulan I 2024. Penurunan ini wajar mengingat lonjakan investasi yang terjadi pada triwulan IV 2024 tidak berlanjut di awal tahun. Meski demikian, nominal investasi PMDN masih menunjukkan minat pelaku usaha domestik terhadap peluang usaha di Sumsel, terutama sektor industri pengolahan, energi, dan infrastruktur. Stabilitasnya realisasi PMA juga mengindikasikan bahwa Sumsel tetap menarik bagi investor asing meskipun terdapat tekanan global. Namun, agar dampak investasi terhadap PMTB lebih signifikan, diperlukan percepatan realisasi proyek strategis dan kepastian regulasi investasi di tingkat daerah.

Grafik 1.8. Perkembangan PMA dan PMDN Wilayah Sumsel



sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (diolah)

Ke depan, peran PMTB berpotensi menguat seiring tercantumnya sejumlah proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Sumatera Selatan dalam dokumen RPJMN 2025–2029. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, beberapa PSN yang diindikasikan antara lain yaitu pengembangan *food estate*, proyek *Biorefinery* Pertamina di Musi Banyuasin, pembangunan jaringan gas perkotaan, hilirisasi komoditas kelapa sawit dan rumput laut, serta pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas. Selain itu, pengembangan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan juga menjadi salah satu prioritas PSN daerah. Apabila proyek-proyek ini segera memasuki tahap konstruksi dan pembebasan lahan, maka dampaknya terhadap pertumbuhan PMTB akan sangat signifikan dalam beberapa triwulan ke depan. Untuk itu, konsistensi dukungan fiskal, percepatan perizinan, serta sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan eksekusi proyek-proyek strategis tersebut benar-benar dapat mengakselerasi investasi fisik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Grafik 1.9. Perkembangan Neraca Perdagangan Sumsel

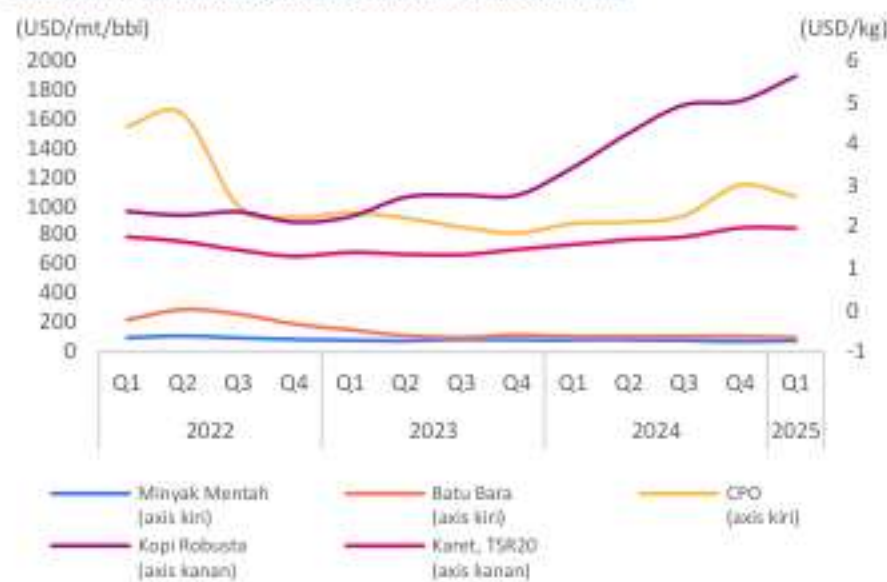


sumber: Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumbagtim (diolah)

Kinerja ekspor-impor luar negeri Sumatera Selatan pada triwulan I 2025 menunjukkan perbaikan signifikan dan menjadi kontributor utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Berdasarkan data Kanwil Ditjen

Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur, nilai ekspor Sumsel tercatat sebesar USD1.912,50 juta, meningkat 36,9% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, nilai impor turun menjadi USD229,68 juta, menghasilkan surplus perdagangan sebesar USD1.682,82 juta, tertinggi dalam dua tahun terakhir. Kinerja positif ini memperlihatkan ketangguhan sektor eksternal Sumsel, terutama di tengah ketidakpastian global dan dinamika harga komoditas internasional.

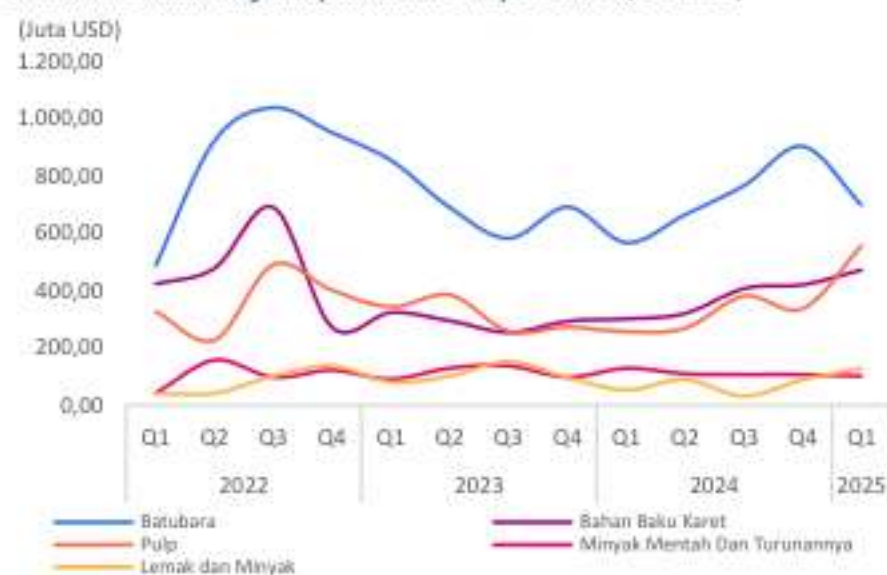
Grafik 1.10. Perkembangan Harga Komoditas Internasional



sumber: World Bank (diolah)

Peningkatan ekspor didorong oleh penguatan nilai dan volume komoditas utama seperti batubara, pulp, karet, serta lemak dan minyak. Komoditas batubara mencatatkan ekspor tertinggi senilai USD700,76 juta, disusul pulp (USD558,16 juta), bahan baku karet (USD472,55 juta), dan lemak serta minyak (USD129,42 juta). Kenaikan ini juga didukung tren positif harga komoditas global, termasuk CPO yang masih bertahan tinggi di USD1.068/mt dan kopi robusta yang mencetak rekor USD5,64/kg. Penguatan permintaan dari Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN turut menopang daya saing ekspor Sumsel di awal tahun ini.

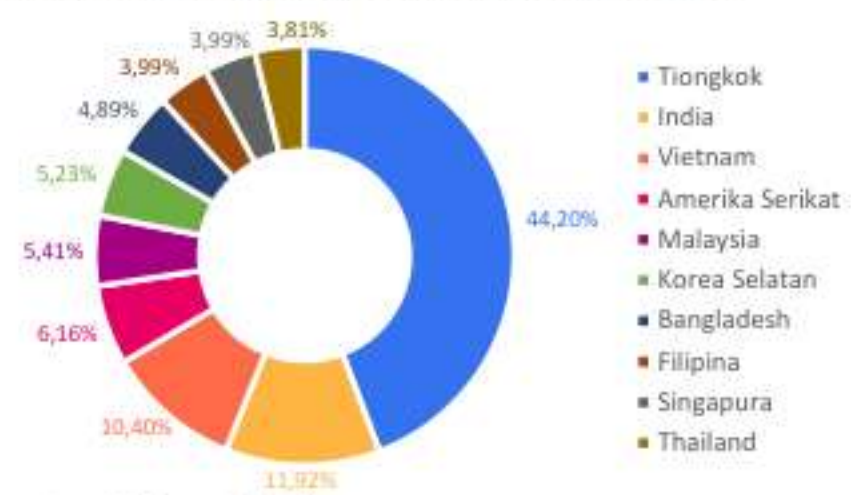
Grafik 1.11. Perkembangan Top Komoditas Ekspor Sumsel (Juta USD)



sumber: Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumbagtim (diolah)

Struktur tujuan ekspor masih didominasi Tiongkok (pangsa 44,20%), disusul India dan Vietnam, yang menyerap mayoritas produk batubara, pulp, dan kelapa sawit. Namun demikian, perhatian perlu diberikan terhadap potensi tekanan eksternal yang muncul dari dinamika perdagangan global. Salah satunya adalah langkah terbaru Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menaikkan tarif impor terhadap berbagai produk asal Tiongkok, sebagai bagian dari kebijakan "protektionisme strategis" oleh pemerintahan Presiden AS. Kebijakan ini berpotensi memicu perang tarif jilid baru dan menimbulkan efek rambatan terhadap pasar global, termasuk permintaan terhadap komoditas primer yang selama ini diserap oleh industri manufaktur Tiongkok.

Grafik 1.12. Pangsa Ekspor Sumsel Q1 2025 Menurut Negara Tujuan (%)

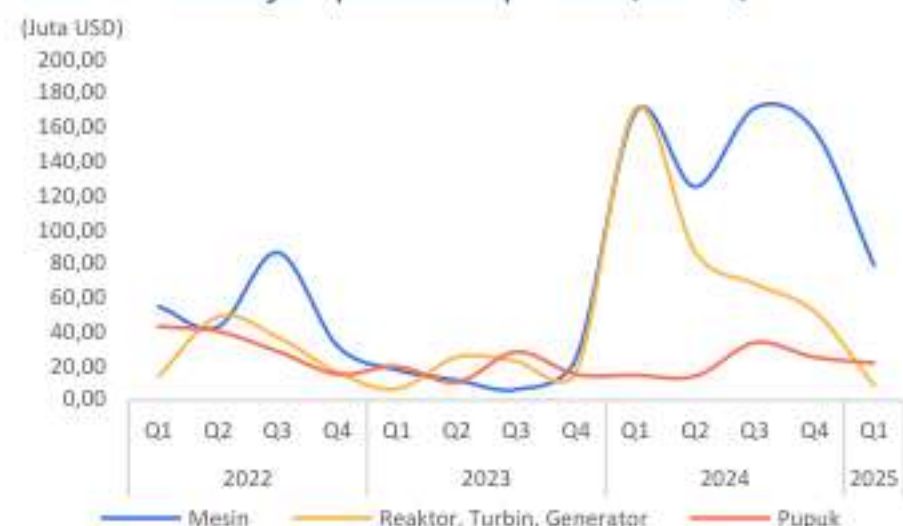


sumber: BPS Sumsel (diolah)

Sementara itu, ketegangan geopolitik antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir kembali meningkat pada awal 2025, yang turut menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan Asia Selatan. Sebagai catatan, India merupakan salah satu pasar ekspor utama Sumatera Selatan dengan kontribusi lebih dari USD180 juta pada triwulan ini, utamanya untuk komoditas batubara dan CPO. Eskalasi politik dan keamanan di kawasan tersebut dapat berisiko menekan aktivitas logistik dan pembiayaan perdagangan, serta menyebabkan volatilitas pada nilai tukar dan permintaan komoditas strategis. Meskipun belum berdampak langsung terhadap kinerja ekspor Sumsel, perkembangan ini perlu dicermati karena dapat mengganggu rantai pasok dan rute perdagangan dalam waktu dekat.

Di sisi impor, Sumatera Selatan menunjukkan tren pelemahan nilai, seiring dengan berkurangnya tekanan permintaan barang modal dan normalisasi investasi proyek infrastruktur. Impor mesin dan peralatan industri tercatat sebesar USD78,84 juta, turun drastis dari periode yang sama tahun lalu. Penurunan tajam juga terjadi pada reaktor dan turbin (USD8,65 juta), serta pupuk yang tetap stabil di USD21,95 juta. Penurunan ini menjadi refleksi dari berkurangnya belanja barang modal baik oleh sektor publik maupun swasta, serta meningkatnya efisiensi dalam rantai pasok domestik.

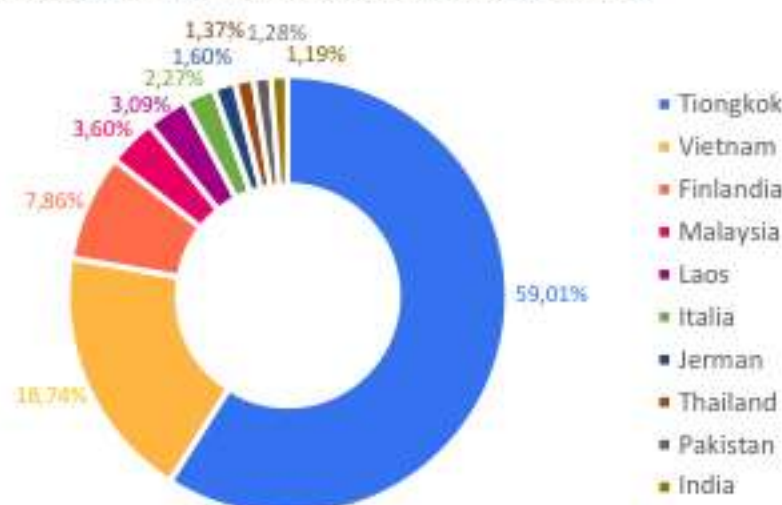
Grafik 1.13. Perkembangan Top Komoditas Impor Sumsel (Juta USD)



sumber: Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumbagtim (diolah)

Dari sisi geografis, Tiongkok tetap menjadi negara asal impor terbesar (pangsa 59,01%), disusul Vietnam dan Finlandia. Struktur impor ini menunjukkan dominasi barang modal dan input produksi, utamanya untuk sektor konstruksi dan manufaktur. Walaupun ketergantungan terhadap mitra Tiongkok masih tinggi, ketegangan dagang antara AS–Tiongkok dapat menyebabkan distorsi pasokan atau relokasi perdagangan yang berisiko terhadap stabilitas harga dan ketersediaan input domestik.

Grafik 1.14. Pangsa Impor Sumsel Q1 2025 Menurut Negara Asal (%)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Aktivitas pelabuhan tetap menjadi indikator kuat atas pemulihan ekspor-impor luar negeri Sumsel. Volume bongkar muat pada triwulan I 2025 mencapai 332.782 unit, tetap tinggi dibanding rata-rata historis, menunjukkan kelancaran arus barang dan efisiensi logistik pelabuhan. Kinerja fisik ini memperkuat konfirmasi bahwa perbaikan ekspor dan impor bukan hanya bersifat nilai, tetapi juga berbasis volume nyata.

Grafik 1.15. Perkembangan Aktivitas Bongkar-Muat Luar Negeri Sumsel



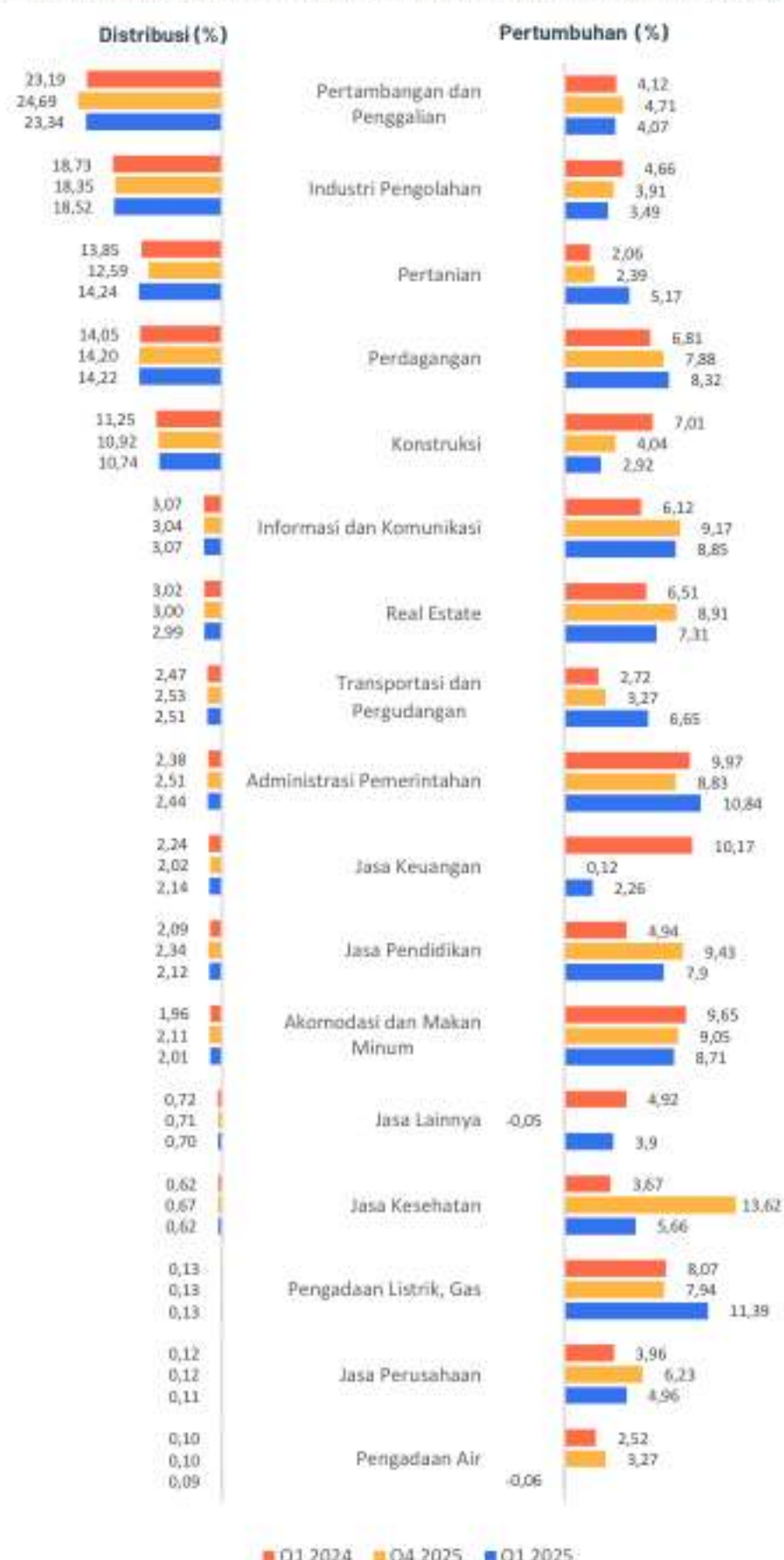
sumber: BPS Sumsel (diolah)

Dengan capaian surplus neraca perdagangan yang kuat dan momentum pemulihan ekspor, sektor eksternal kembali menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Sumsel pada awal 2025. Namun demikian, ketergantungan terhadap pasar utama seperti Tiongkok dan India tetap menyimpan potensi risiko eksternal yang perlu dimitigasi melalui diversifikasi pasar, penguatan rantai pasok domestik, dan kesiapan logistik yang tangguh. Dalam konteks PDRB pengeluaran, net ekspor menjadi salah satu komponen dengan kontribusi dan laju pertumbuhan tertinggi, yang mendukung kinerja ekonomi Sumsel tetap solid di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

1.1.1.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Struktur perekonomian Sumatera Selatan dari sisi lapangan usaha pada triwulan I 2025 masih ditopang oleh lima sektor utama yang menyumbang lebih dari 81% terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Lima sektor tersebut meliputi Pertambangan dan Penggalian (23,34%), Industri Pengolahan (18,52%), Pertanian (14,24%), Perdagangan Besar dan Eceran (14,22%), serta Konstruksi (10,74%). Komposisi ini mencerminkan bahwa perekonomian Sumsel masih sangat bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam dan aktivitas hilirnya, meskipun sektor perdagangan dan konstruksi mulai menunjukkan peran penting dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan.

Grafik 1.16. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Komponen Lapangan Usaha (yoy, %)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh stabil sebesar 4,07% (yoy), mempertahankan posisi sebagai penyumbang terbesar PDRB Sumsel. Kinerja sektor ini ditopang oleh ekspor komoditas batubara yang tetap tinggi, terutama ke Tiongkok, India, dan Vietnam. Nilai ekspor batubara Sumsel pada triwulan I 2025 tercatat mencapai USD700,76 juta, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun harga internasional cenderung melandai di kisaran USD100,56/mt. Tekanan eksternal seperti ketegangan geopolitik antara India dan Pakistan serta perang tarif AS-Tiongkok menjadi risiko yang patut diwaspadai karena berpotensi memengaruhi permintaan global terhadap komoditas energi dan bahan baku industri.

Industri Pengolahan mencatat pertumbuhan sebesar 3,49% (yoy), sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya, namun tetap menjadi penopang penting dari sisi nilai tambah. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan ekspor produk olahan seperti pulp, bahan baku karet, dan minyak kelapa sawit. Nilai ekspor pulp melonjak menjadi USD558,16 juta, sementara harga CPO internasional tetap tinggi di kisaran USD1.068,39/mt. Meskipun permintaan dari negara tujuan ekspor seperti Tiongkok dan India tetap kuat, tantangan

sektor ini terletak pada terbatasnya kapasitas hilirisasi dan fluktuasi harga input produksi. Perluasan investasi di sektor ini menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan Sumsel ke depan.

Sektor Pertanian menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan 5,17% (yoy), menguat dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan musim panen raya, peningkatan produksi komoditas tanaman pangan dan perkebunan, serta membaiknya daya beli petani. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 132,94 pada Maret 2025 mencerminkan daya tukar yang menguntungkan, terutama dari subsektor tanaman pangan (naik 3,66%) dan perkebunan rakyat (naik 0,94%). Peningkatan harga gabah dan karet turut menjadi pendorong utama. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah seperti optimalisasi dana desa untuk ketahanan pangan serta pengendalian inflasi pangan berhasil mendukung sektor pertanian secara riil.

Perdagangan Besar dan Eceran mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,32% (yoy), didorong oleh meningkatnya konsumsi domestik dan aktivitas distribusi barang. Kinerja ini sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga selama momen Ramadhan, serta meningkatnya aktivitas pelabuhan dan logistik yang mencerminkan pemulihan volume ekspor-impor barang dan jasa. Neraca perdagangan luar negeri yang surplus besar pada triwulan I 2025 (USD 1.682,82 juta) juga memberikan sinyal bahwa arus barang di sektor perdagangan tetap kuat. Ke depan, tantangan sektor ini terutama terkait dengan potensi pelemahan daya beli akibat tekanan harga serta perlambatan pertumbuhan global yang dapat menekan permintaan ekspor.

Sektor Konstruksi tumbuh melambat sebesar 2,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 7,01%. Perlambatan ini mencerminkan masih rendahnya realisasi belanja modal pemerintah, baik dari APBN maupun APBD, pada awal tahun anggaran. Meski demikian, sektor ini tetap berkontribusi signifikan (10,74%) terhadap PDRB, terutama melalui proyek infrastruktur dasar seperti jalan tol, jaringan gas, dan fasilitas umum. Dengan mulai bergeraknya proses lelang dan pencairan dana proyek strategis nasional serta program-program padat karya konstruksi, sektor ini diperkirakan akan kembali menguat pada triwulan selanjutnya.

Grafik 1.17. TPK dan RLM Hotel Berbintang Sumsel



sumber: BPS Sumsel (diolah)

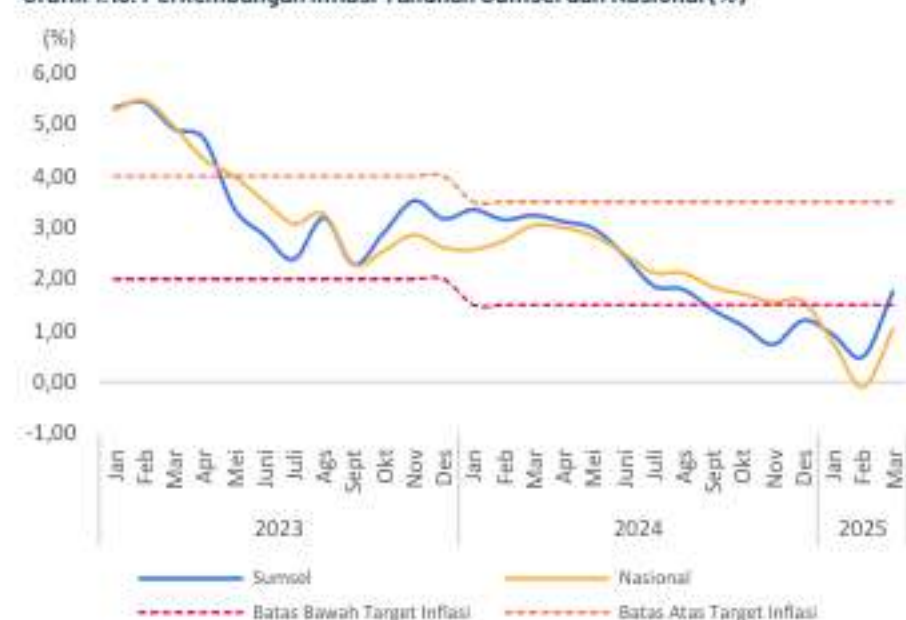
Di luar lima sektor utama, sektor Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan pertumbuhan solid sebesar 8,71% (yoy), melanjutkan tren ekspansi selama empat triwulan terakhir. Pertumbuhan ini menggambarkan mulai pulihnya konsumsi masyarakat di sektor *hospitality*, khususnya kuliner dan aktivitas wisata lokal. Namun demikian, laju ekspansi sektor ini

belum sepenuhnya paralel dengan kinerja akomodasi formal. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Selatan pada Maret 2025 tercatat hanya 31,46%, mengalami penurunan signifikan sebesar 12,69 poin dibanding Maret 2024 (44,15%), dan menjadi yang terendah sejak 3 tahun terakhir. Demikian pula Rata-rata Lama Menginap (RLM) tamu hotel berbintang yang hanya mencapai 1,26 hari, lebih rendah dibanding 1,38 hari pada Maret 2024, mengindikasikan bahwa wisatawan maupun pelaku perjalanan dinas cenderung memperpendek masa tinggal atau beralih ke akomodasi non-hotel. Penurunan ini selaras dengan tren efisiensi belanja perjalanan dinas K/L, serta minimnya *event* nasional/bisnis besar pada awal tahun. Meskipun demikian, berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan domestik justru tumbuh 44,43% (yoy) selama Januari–Maret 2025. Hal ini memperkuat indikasi bahwa pertumbuhan subsektor ini lebih ditopang oleh usaha makanan-minuman dan aktivitas rekreatif jangka pendek, yang tetap memberikan kontribusi penting terhadap pemulihan konsumsi rumah tangga dan UMKM pariwisata di perkotaan.

1.1.2. Inflasi

Inflasi Sumsel mulai meningkat, namun masih terkendali dan berada dalam sasaran target inflasi. Per Maret 2025, inflasi tahunan Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 1,77% (yoy), meningkat dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 0,49% (yoy), serta lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang hanya 1,03% (yoy). Meskipun meningkat, inflasi tersebut masih berada dalam rentang target inflasi nasional 2025 sebesar $2,5 \pm 1\%$. Tren peningkatan inflasi ini menandai pembalikan arah setelah deflasi historis pada Februari 2025 (-0,09% yoy secara nasional). Secara umum, peningkatan inflasi Sumsel terjadi setelah mengalami tekanan deflasi dalam 2 bulan sebelumnya berturut-turut, seiring mulai meningkatnya konsumsi masyarakat saat Ramadhan dan menjelang HBKN Idul Fitri.

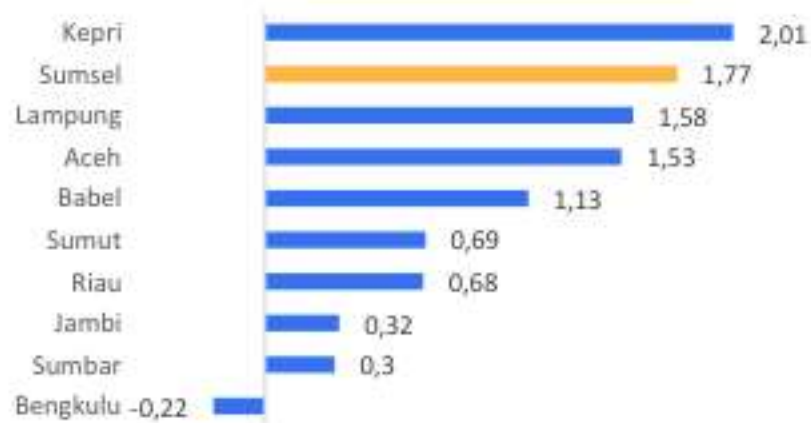
Grafik 1.18. Perkembangan Inflasi Tahunan Sumsel dan Nasional (%)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Dari sisi spasial, inflasi Sumsel merupakan yang tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Sumsel mencatatkan inflasi tahunan Maret 2025 sebesar 1,77% (yoy), tertinggi kedua setelah Kepulauan Riau (2,01%). Inflasi ini jauh di atas rata-rata regional, dan kontras dengan provinsi seperti Bengkulu yang mengalami deflasi (-0,22%), serta Sumbang dan Jambi yang hanya mencatatkan inflasi sekitar 0,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan harga di Sumsel relatif lebih kuat dibanding sebagian besar provinsi lain di Sumatera.

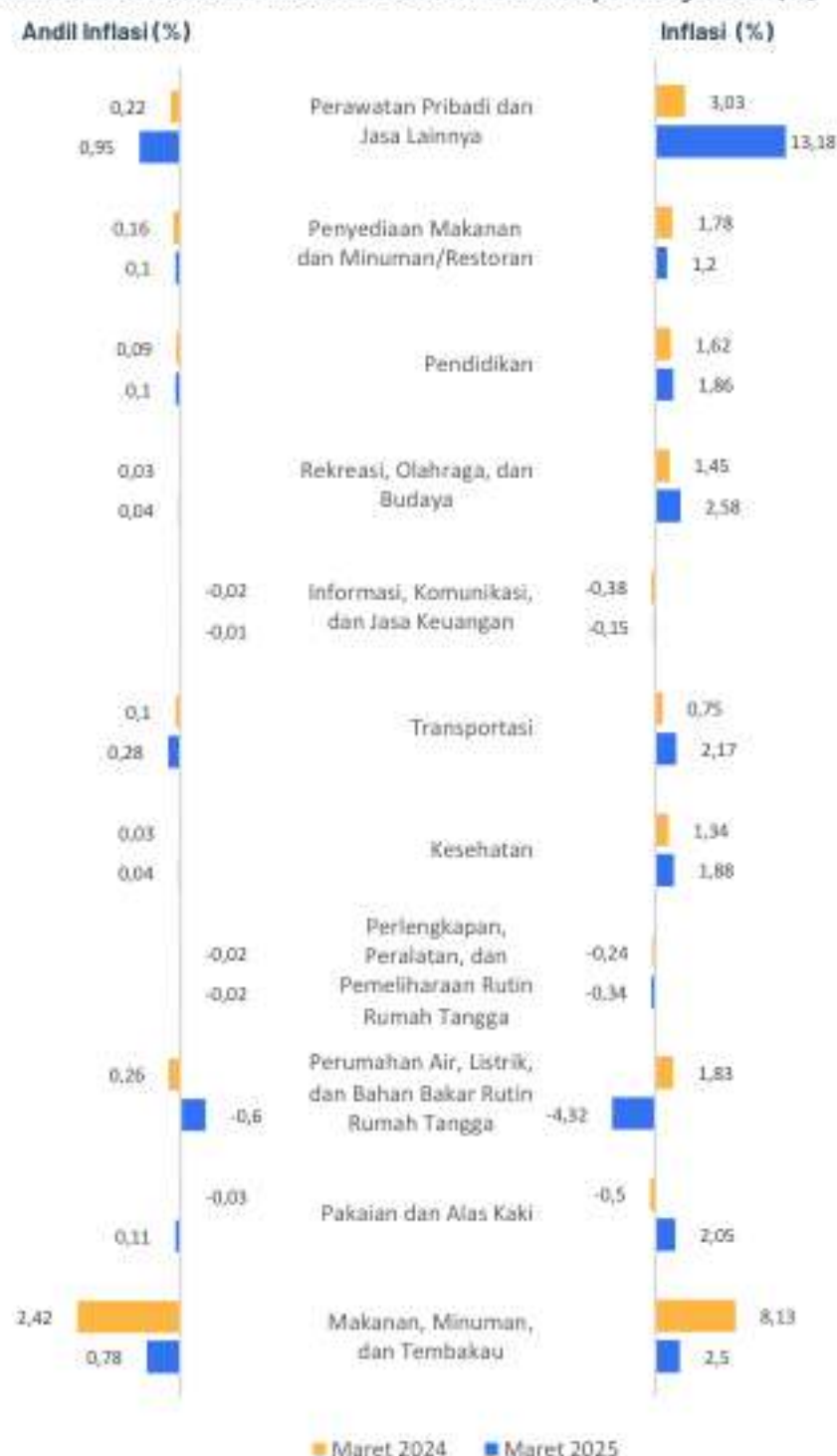
Grafik 1.19. Inflasi Tahunan Maret 2025 Provinsi di Regional Sumatera (%)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Pendorong utama inflasi Sumsel berasal dari kelompok perawatan pribadi dan makanan, dipicu tren harga komoditas dan peningkatan konsumsi. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencatatkan inflasi tahunan tertinggi, yakni 13,18% (yoy) dengan andil 0,95%, melesat dibandingkan tahun sebelumnya (3,03%). Kenaikan ini didorong oleh melonjaknya harga emas perhiasan di pasar global seiring eskalasi geopolitik dan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan The Fed. Di sisi lain, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi 2,5% (yoy), dengan andil 0,78%, masih menjadi kontributor inflasi terbesar kedua, didorong oleh peningkatan permintaan bahan pokok menjelang Ramadan serta naiknya harga komoditas hortikultura.

Grafik 1.20. Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran (%)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Lima komoditas utama penyumbang inflasi tahunan Sumsel pada Maret 2025 adalah emas perhiasan, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, dan bawang putih. Emas perhiasan menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,84%, diikuti bawang merah (0,27%), bahan bakar rumah tangga (0,18%), minyak goreng (0,14%), dan bawang putih (0,10%). Kenaikan harga komoditas ini terjadi bersamaan dengan tingginya permintaan dan pasokan yang masih belum stabil. Meskipun beberapa komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, dan kacang panjang menunjukkan pasokan melimpah, lonjakan harga komoditas strategis tetap memberi tekanan, terutama di kota-kota dengan struktur konsumsi yang lebih tinggi pada bahan makanan olahan dan energi.

Beberapa kelompok pengeluaran lainnya juga turut memberi kontribusi inflasi meski dalam skala moderat. Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya tercatat mengalami inflasi 2,58% (yoy), Transportasi naik 2,17% dengan andil 0,28%, serta Pakaian dan Alas Kaki naik 2,05% (yoy). Sebaliknya, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rutin Rumah Tangga mengalami deflasi tajam sebesar -4,32% (yoy), dengan andil negatif sebesar -0,60%. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya diskon tarif listrik bagi pelanggan PLN rumah tangga dengan daya ≤2200VA selama Januari dan Februari 2025.

Dari sisi spasial, inflasi tahunan tertinggi di Kab/Kota di Sumsel pada Maret 2025 tercatat di Kabupaten Muara Enim sebesar 3,03%, disusul oleh Ogan Komering Ilir (2,91%), sementara inflasi terendah terjadi di Kota Lubuk Linggau (1,28%). Kota Palembang mencatatkan inflasi 1,32%, mendekati rata-rata provinsi. Komoditas penyumbang utama inflasi di berbagai wilayah relatif seragam, terutama tarif listrik, bawang merah, emas perhiasan, dan bawang putih. Namun, variasi muncul dalam kekuatan tekanan inflasi, dimana Muara Enim dan OKI terdampak lebih besar oleh komoditas energi dan bahan makanan, sedangkan Lubuk Linggau dan Palembang cenderung mengalami deflasi dari komoditas seperti cabai merah, angkutan udara, dan ikan lele. Situasi ini mencerminkan pola konsumsi masyarakat serta struktur pasokan lokal yang berbeda antar wilayah.

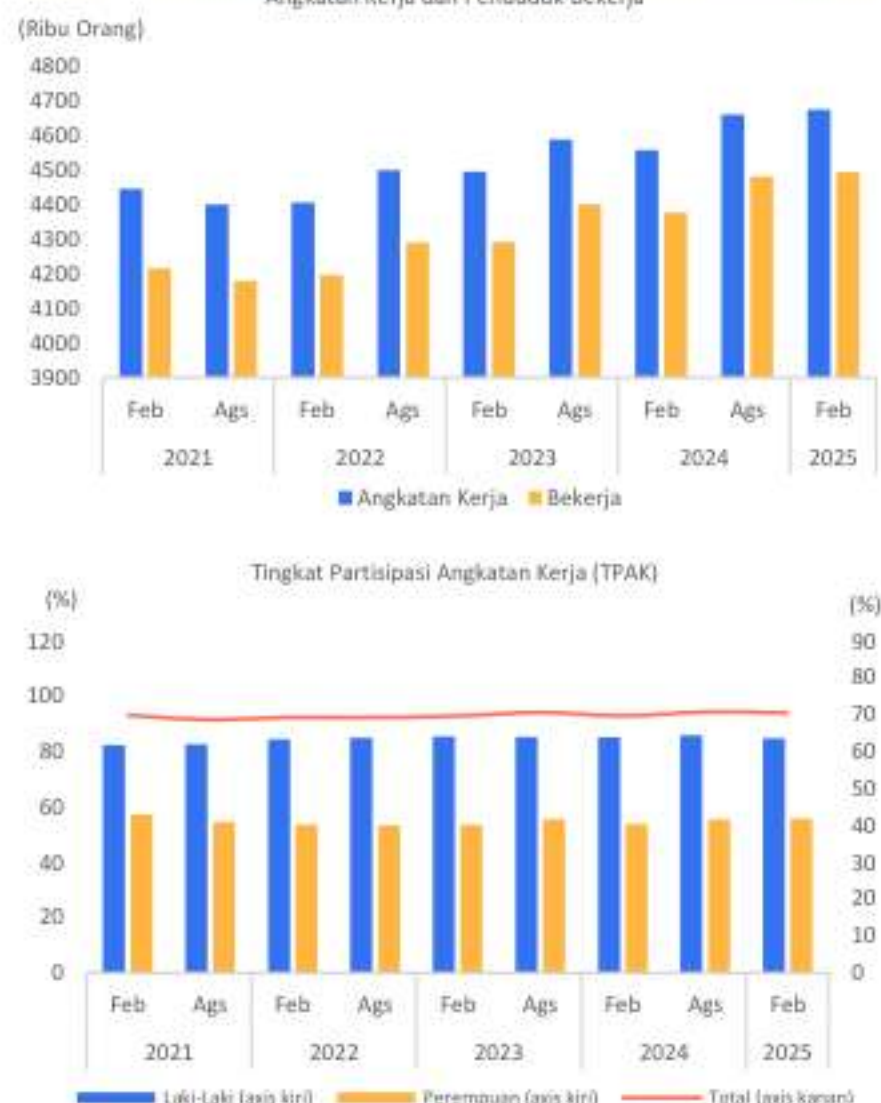
Meskipun tekanan inflasi relatif terkendali, keberlanjutan pengendalian harga memerlukan konsistensi kebijakan para pemangku kepentingan. Tekanan inflasi di Sumsel masih dibayangi oleh sejumlah risiko struktural yang dapat menghambat pencapaian sasaran inflasi hingga akhir tahun 2025. Bank Indonesia menyoroti berbagai tantangan mendasar seperti produktivitas pangan yang belum optimal, terutama pada komoditas strategis seperti cabai merah dan bawang merah yang kerap menjadi penyumbang inflasi, alih fungsi lahan pertanian, hingga inefisiensi rantai pasok dan distribusi yang belum sepenuhnya terintegrasi antar wilayah. Selain itu, belum tersedianya sistem data pangan yang akurat serta kurangnya integrasi antara pusat dan daerah dalam pengendalian harga juga turut memperlemah respons kebijakan. Risiko eksternal seperti *imported inflation* akibat tensi geopolitik global dan perang tarif AS–Tiongkok pun menjadi sumber tekanan tambahan terhadap kestabilan harga. Oleh karena itu, upaya pengendalian inflasi memerlukan penguatan strategi berbasis 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) yang diperkuat melalui program-program seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta pelaksanaan operasi pasar secara masif dan terkoordinasi.

1.2. Perkembangan Indikator Kesejahteraan

1.2.1. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Sumatera Selatan pada Februari 2025 menunjukkan perbaikan secara umum dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 4,67 juta orang, meningkat 117,60 ribu orang dibandingkan Februari 2024, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 4,49 juta orang (naik 116,88 ribu orang). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turut mengalami kenaikan sebesar 0,81 poin persen menjadi 70,56%. Kenaikan TPAK ini lebih didorong oleh peningkatan partisipasi perempuan (+1,98 poin) dibandingkan laki-laki yang justru mengalami penurunan (-0,32 poin), menunjukkan tren positif pemberdayaan tenaga kerja perempuan di pasar kerja Sumsel.

Grafik 1.21. Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan TPAK Sumsel



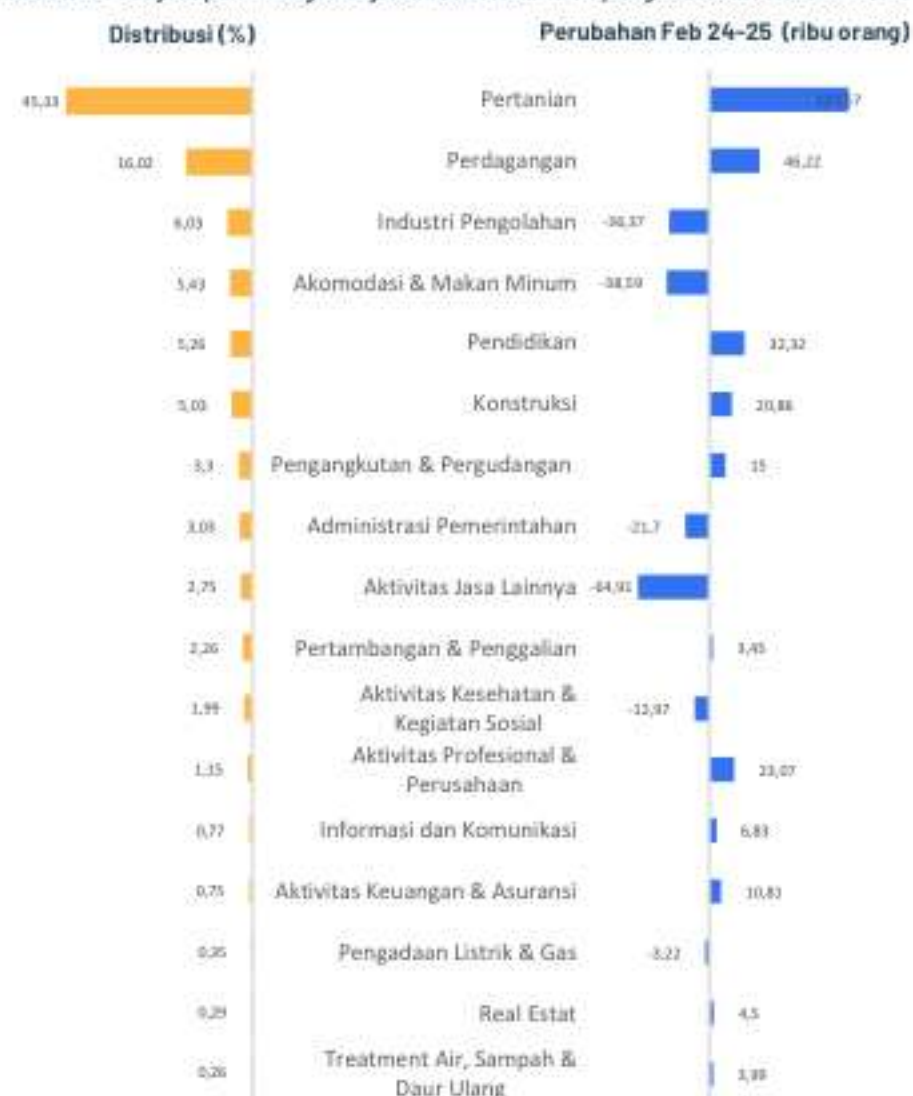
sumber: BPS Sumsel (diolah)

Sektor Pertanian tetap menjadi penopang utama penyerap tenaga kerja di Sumsel, baik secara struktural maupun dalam perubahan tahunan. Sebanyak 45,33% penduduk bekerja bergerak di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, meningkat signifikan sebanyak 127,57 ribu orang secara tahunan. Sektor Perdagangan menyerap 16,02% dan mengalami kenaikan sebesar 46,22 ribu orang, diikuti sektor Pendidikan yang naik 32,32 ribu orang. Sebaliknya, sektor Industri Pengolahan justru mengalami penurunan tenaga kerja sebesar 36,37 ribu orang, menjadi perhatian tersendiri di tengah perannya sebagai sektor prioritas hilirisasi.

Komposisi pekerjaan berdasarkan status menunjukkan dominasi pekerjaan informal, meski terdapat peningkatan kecil pada pekerja formal. Proporsi pekerja informal tercatat sebesar 63,26%, lebih tinggi dari pekerja formal yang hanya 36,74%. Namun demikian, status buruh/karyawan/pegawai tetap menjadi kelompok terbanyak (33,20%), dan kelompok ini mengalami peningkatan secara jumlah absolut. Di sisi lain, pekerja bebas di pertanian meningkat, sementara pekerja berusaha sendiri justru menurun 4,52 poin persen, yang bisa

mengindikasikan konsolidasi usaha mikro atau peralihan ke sektor informal lain.

Grafik 1.22. Penyerapan Tenaga Kerja Sumsel Menurut Lapangan Usaha Februari 2025



sumber: BPS Sumsel (diolah)

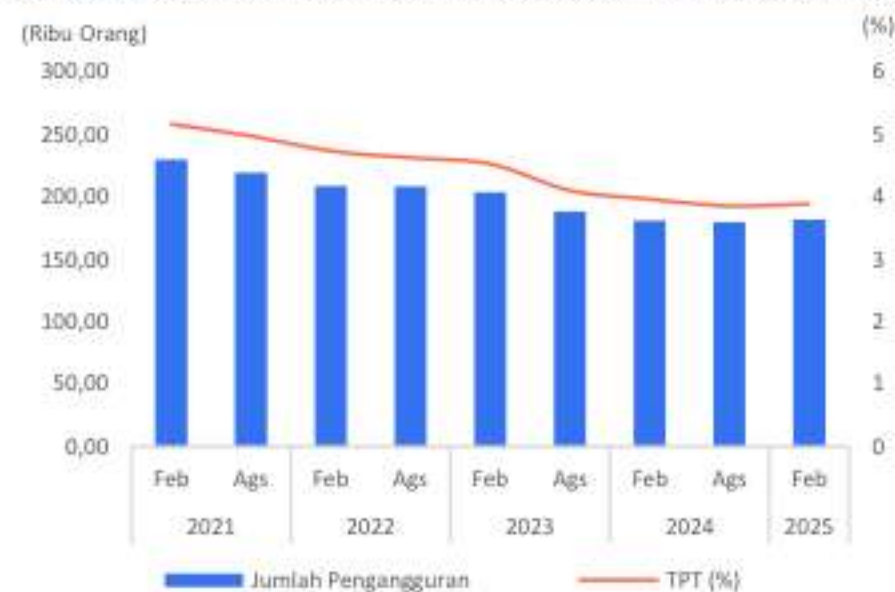
Kualitas kerja juga menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya pekerja penuh dan menurunnya setengah pengangguran. Pada Februari 2025, proporsi pekerja penuh (≥ 35 jam/minggu) mencapai 60,37%, naik 1,43 poin persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat setengah pengangguran turun dari 11,22% menjadi 9,20%, dan pekerja paruh waktu sedikit naik ke 30,43%. Penurunan setengah pengangguran ini menandakan perbaikan utilisasi tenaga kerja di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi pasca pemulihan konsumsi dan proyek strategis nasional.

Dari sisi pendidikan, mayoritas penduduk bekerja masih berpendidikan rendah, namun tren pendidikan tinggi menunjukkan peningkatan. Sebanyak 39,96% tenaga kerja masih lulusan SD ke bawah, namun proporsinya menurun dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, proporsi pekerja dengan pendidikan menengah atas dan tinggi (SMA dan universitas) mengalami peningkatan, menunjukkan arah perbaikan kualitas SDM dalam jangka panjang. Kelompok lulusan diploma dan sarjana menyumbang 11,55% dari total pekerja, menjadi potensi basis tenaga terampil yang mendukung sektor formal dan industri strategis.

Indikator pengangguran juga membaik, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 3,89%. Penurunan sebesar 0,08 poin persen dari Februari 2024 ini terjadi seiring peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun TPT perkotaan masih lebih tinggi (5,49%) dibanding perdesaan (2,87%), yang mencerminkan adanya *mismatch* keterampilan atau kebutuhan kerja formal yang belum optimal di wilayah urban. Secara pendidikan, lulusan SMK masih mencatatkan TPT tertinggi (10,21%), mengindikasikan tantangan *link and*

match antara dunia pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja.

Grafik 1.23. Perkembangan Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumsel (%)



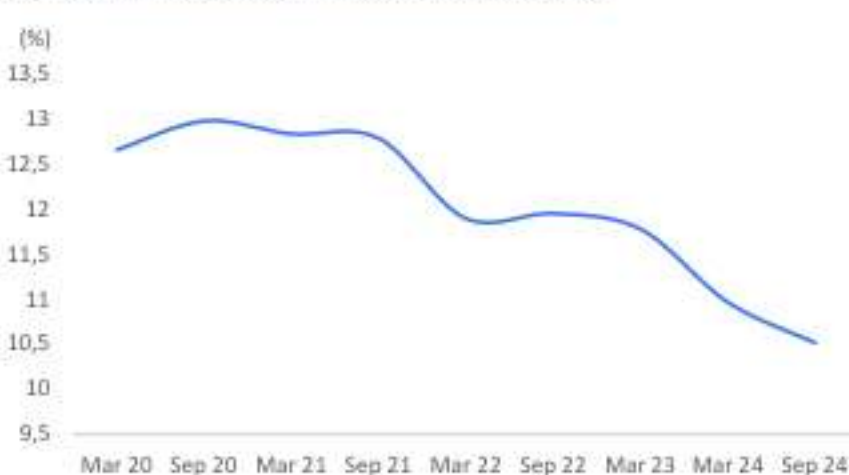
sumber: BPS Sumsel (diolah)

Dengan demikian, pasar tenaga kerja Sumsel pada awal 2025 menunjukkan pemulihan yang menggembirakan, meskipun masih terdapat tantangan struktural seperti tingginya pekerja informal, ketimpangan wilayah, dan pengangguran terdidik. Upaya penguatan pelatihan vokasional, sertifikasi tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja formal menjadi krusial dalam menjaga kesinambungan perbaikan ketenagakerjaan di Provinsi Sumsel.

1.2.2. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan Sumsel berada dalam tren perbaikan. Per September 2024, tingkat kemiskinan Sumsel berada di angka 10,51%, turun dari Maret 2023 yang sebesar 11,78%. Berdasarkan wilayah, kemiskinan di wilayah Pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Per September 2024, tingkat kemiskinan di Pedesaan tercatat di angka 11,43% dan perkotaan 9,02%.

Grafik 1.24. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sumsel



sumber: BPS Sumsel (diolah)

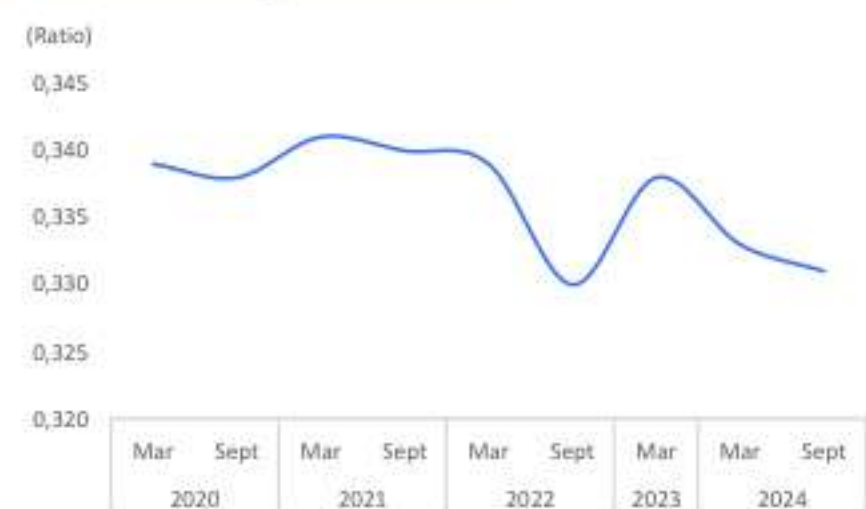
Perbaikan tingkat kemiskinan Sumsel juga terlihat pada perbaikan kondisi tingkat kedalaman (P1) maupun keparahan (P2). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Sumsel per September 2024 di angka 1,449, turun dari Maret 2023 yang diangka 1,724. Hal tersebut menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Sumsel cenderung mendekati dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sumsel (P2) per September 2024 di angka 0,316, turun dari Maret 2023 yang tercatat 0,393, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan antar penduduk miskin di Sumsel menurun.

Komoditas makanan memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan Sumsel. Per September 2024, komoditas makanan berkontribusi sebesar 75,03% dari total

garis kemiskinan, dengan beras, rokok kretek filter, daging ayam, telur ayam ras, dan mie instan sebagai komoditas dominan. Sementara itu, komoditas non makanan yang dominan menyumbang garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Kondisi ketimpangan Sumsel per September 2024 mengalami penurunan. Gini Ratio Sumsel tercatat di angka 0,331, turun dari periode Maret 2023 yang sebesar 0,338. Membaiknya tingkat ketimpangan tersebut tidak terlepas dari program pemerintah yang memberikan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Grafik 1.25. Perkembangan Gini Ratio Sumsel

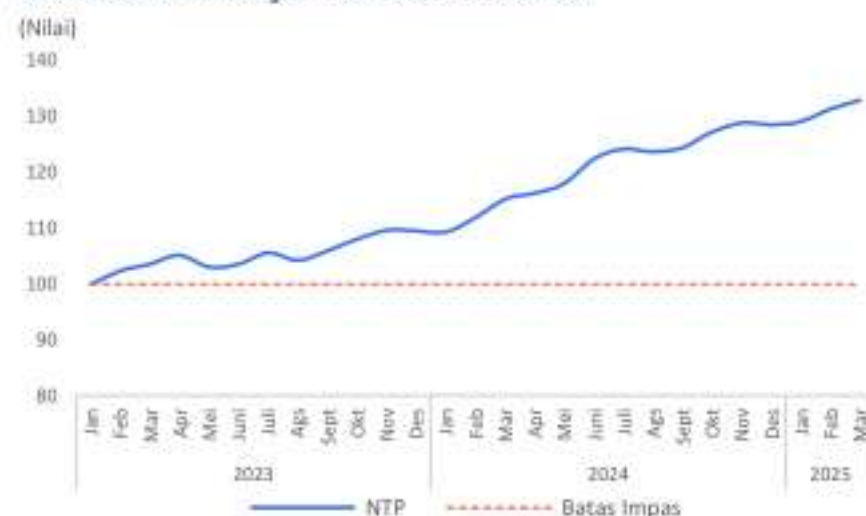


sumber: BPS Sumsel (diolah)

1.2.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Selatan terus menguat pada Maret 2025, mencerminkan membaiknya daya beli dan efisiensi usaha tani. NTP Sumsel tercatat sebesar 132,94, meningkat 1,24% (mtm) dari Februari 2025 (131,32), terutama didorong oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 2,88%, yang lebih tinggi dibandingkan dengankenaikan indeks harga yang dibayar (Ib) sebesar 1,62%. Kenaikan NTP ini menunjukkan bahwa pendapatan petani mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan biaya konsumsi rumah tangga dan produksi, sehingga meningkatkan nilai tukar usaha rumah

Grafik 1.26. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sumsel



sumber: BPS Sumsel (diolah)

tangga pertanian (NTUP) menjadi 136,18.

Kenaikan NTP tertopang oleh subsektor tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan peternakan, yang menunjukkan tren harga output lebih kuat dibanding input produksinya. Kenaikan nilai tukar petani subsektor tanaman pangan (NTPP) didorong oleh meningkatnya harga gabah dan palawija, sedangkan nilai tukar petani subsektor perkebunan rakyat (NTPR) naik berkat penguatan harga karet, kopi, dan sawit, serta nilai tukar petani subsektor Peternakan (NTPT) naik

akibat kenaikan harga ayam ras dan telur ayam. Di sisi lain, NTP hortikultura mengalami penurunan tajam -5,96%, akibat jatuhnya harga cabai merah, kacang panjang, dan ketimun, yang tidak sebanding dengan naiknya biaya konsumsi dan produksi. NTP perikanan juga turun -1,14%, terutama karena kenaikan biaya produksi dan lemahnya harga hasil tangkapan laut.

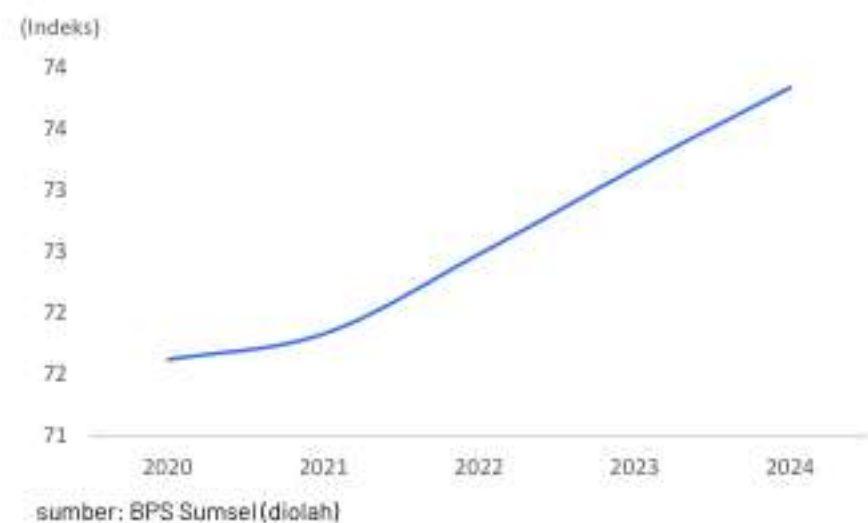
Dari sisi komponen pengeluaran petani, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) meningkat didorong oleh kenaikan harga kelompok makanan dan energi rumah tangga, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) relatif stabil. Ini memperlihatkan bahwa inflasi yang dialami petani di sisi konsumsi relatif lebih tinggi dibanding biaya produksi, namun masih mampu diimbangi oleh pendapatan hasil produksi pertanian.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa daya beli dan kesejahteraan petani di Sumsel terus menguat, terutama bagi petani pangan dan perkebunan, yang merupakan tulang punggung perekonomian pedesaan. Meski demikian, tantangan tetap hadir di subsektor hortikultura dan perikanan yang sensitif terhadap gejolak harga dan biaya distribusi. Oleh karena itu, intervensi pemerintah daerah untuk stabilisasi harga, penguatan kelembagaan petani, dan efisiensi rantai pasok tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kesejahteraan petani ke depan.

1.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kinerja perekonomian Sumsel. IPM Sumsel tahun 2024 berada diangka 73,84, meningkat 0,96% dibandingkan tahun 2022. Namun demikian, IPM Sumsel dibawah IPM Nasional yang sebesar 74,29.

Grafik 1.27. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Sumsel



Dari dimensi pembentuk IPM, peningkatan terjadi disemua dimensi. Kenaikan tertinggi pada dimensi Pengeluaran Perkapita yang meningkat 3,26% (yoy), diikuti Rata-rata Lama Sekolah 1,55% (yoy), Angka Harapan Hidup 0,38% (yoy), dan Harapan Lama Sekolah meningkat 0,63% (yoy).

Boks 1

Fenomena Deflasi dan Penurunan Daya Beli Masyarakat Sumsel di Awal 2025

Tingkat Inflasi Bulanan (m-to-m) Provinsi Sumatera Selatan 2024-Feb 2025 (%)



Indeks Konsumsi Rumah Tangga m-to-m Sumatera Selatan



Pembahasan:

Sumatera Selatan mengalami deflasi 0,41% (m-to-m) pada Februari 2025, yang lebih dalam dibandingkan deflasi bulan sebelumnya sebesar 0,36% (m-to-m). Penyumbang utama deflasi Januari dan Februari 2025 secara mtm adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil 0,46%. Komoditas penyumbang utama yaitu tarif listrik. Penurunan tarif listrik memberikan andil yang tinggi terhadap deflasi di Sumatera Selatan pada periode Januari dan Februari 2025. IKRT Sumatera Selatan pada Januari 2025 mengalami penurunan sebesar 0,23%, dan bulan Februari 2025 juga mengalami penurunan mencapai 0,28%. Hal ini disebabkan oleh turunnya indeks yang cukup tinggi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan bakar rumah tangga sebesar 15,69% (Januari) dan 6,87% (Februari). Penurunan selama dua bulan berturut-turut mengindikasikan adanya penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga di Sumatera Selatan. Hal ini mencerminkan penurunan daya beli masyarakat atau perubahan pola konsumsi.

Kesimpulan dan Rekomendasi:

Deflasi pada awal tahun 2025 akan berdampak negatif bagi pelaku usaha, khususnya sektor makanan, tekstil dan properti. Kerja sama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha diperlukan untuk mengantisipasi potensi risiko deflasi yang berkepanjangan untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.



Perkembangan Fiskal Regional

Pada Triwulan I tahun 2025, kinerja pelaksanaan anggaran di Provinsi Sumatera Selatan mencerminkan kondisi fiskal yang relatif stabil di tengah dinamika kebijakan nasional dan transisi pemerintahan. Baik dari sisi APBN maupun APBD, pengelolaan pendapatan dan belanja menunjukkan upaya menjaga keseimbangan fiskal, meskipun masih dihadapkan pada tantangan struktural seperti penurunan pendapatan dan tekanan efisiensi anggaran.

- Kinerja pelaksanaan APBN di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp3,31 triliun atau 18,53% dari target tahunan, dengan pertumbuhan 7,80% (yoy). Penerimaan perpajakan tumbuh positif, meskipun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami penurunan akibat penurunan pendapatan Badan Layanan Umum sebagai dampak dari perubahan status satker pada Universitas Sriwijaya dari BLU menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum). Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp10,20 triliun atau 20,75% dari pagu, menurun 1,87% (yoy) sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pada belanja barang dan modal. Namun pertumbuhan pada belanja transfer ke daerah berperan menjadi pendorong utama dalam menjaga kesinambungan fiskal di Sumsel.
- Di tengah transisi pemerintahan baru dan kebijakan efisiensi belanja, kinerja APBD Sumatera Selatan tetap terkendali. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp7,49 triliun atau 16,16% dari target, namun mengalami penurunan sebesar 20,72% (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh perlambatan Transfer ke Daerah (TKD) akibat penyesuaian kebijakan transfer dari pemerintah pusat sebagai bagian dari efisiensi fiskal nasional. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat Rp5,04 triliun atau 10,45% dari pagu anggaran, dengan pertumbuhan positif sebesar 14,64% (yoy). Kenaikan ini didorong oleh belanja operasional yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah menjaga layanan publik meski menghadapi ketahanan fiskal.

2.1. Pelaksanaan APBN Sumsel

APBN merupakan instrumen fiskal yang berfungsi sebagai alat pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Pada tahun 2025, fungsi ini dijalankan melalui kebijakan fiskal yang mengusung tema "Akselerasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Fokus kebijakan mencakup peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri, transisi ekonomi hijau, optimalisasi pendapatan negara, penguatan perlindungan sosial, serta efisiensi dan stabilisasi anggaran. Melalui APBN, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya tahan nasional dalam menghadapi tantangan global.

Salah satu fokus kebijakan fiskal tahun 2025 adalah penguatan fondasi fiskal secara holistik melalui pendekatan *collecting more*, yaitu upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara guna menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN. Di Provinsi Sumatera Selatan, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp17,88 triliun (data per 31 Maret 2025), turun 20,39% dibanding periode sama tahun 2024. Target pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp15,21 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,40 triliun, serta penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp258,10 miliar.

Selain penguatan dari sisi pendapatan, fondasi fiskal juga diperkuat melalui peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*) sebagai upaya strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan ketidakpastian global dan domestik. Hingga 31 Maret 2025, alokasi belanja negara di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp49,16 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp15,53 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp33,63 triliun. Dibandingkan tahun 2024, terjadi penurunan total alokasi belanja sebesar 10,04%, yang terutama disebabkan oleh turunnya alokasi belanja pemerintah pusat. Penurunan paling signifikan terjadi pada jenis belanja modal, yang tercatat menurun drastis sebesar 66,54% (yoy). Sebaliknya, alokasi TKD justru mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,42% (yoy). Penyesuaian alokasi belanja negara tahun 2025 di Sumatera Selatan sejalan dengan arah kebijakan efisiensi belanja negara sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menekankan perlunya optimalisasi penggunaan anggaran untuk program-program prioritas, penghapusan belanja yang tidak produktif, serta penguatan kualitas belanja agar lebih berdampak

langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, peningkatan alokasi belanja transfer ke daerah menjadi faktor utama dalam menjaga kesinambungan fiskal di Sumatera Selatan, di tengah pelaksanaan kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Hingga triwulan I 2025, kinerja realisasi belanja negara di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan, terutama disebabkan oleh belanja pemerintah pusat yang berkurang secara signifikan. Total realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp10,20 triliun, turun 1,87% secara tahunan (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengarahkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan pengeluaran, memangkas belanja non-prioritas, serta memfokuskan belanja pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dampak dari kebijakan tersebut tercermin pada realisasi belanja pemerintah pusat yang hanya mencapai Rp2,53 triliun, atau turun sebesar 32,38% (yoy). Penurunan ini terutama terjadi pada komponen belanja barang dan belanja modal yang masing-masing mengalami penurunan drastis, yaitu sebesar 50,25% dan 91,00% secara tahunan.

Meski demikian, kinerja belanja negara secara keseluruhan masih ditopang oleh kuatnya realisasi belanja pegawai dan TKD. Realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp1,64 triliun atau 27,73% dari pagu, tumbuh 10,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Maret 2025. Sementara itu, belanja TKD terealisasi sebesar Rp7,67 triliun, atau 22,82% dari pagu, dan tumbuh sebesar 15,27% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh percepatan pemenuhan syarat salur pemda, pemdes, maupun Satker OPD pada penyaluran dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dana desa, dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik

Optimalnya penyerapan belanja pegawai dan TKD mampu mengimbangi perlambatan pada belanja barang dan belanja modal, serta turut menjaga kinerja belanja negara di Sumatera Selatan agar tetap stabil di tengah upaya efisiensi yang tengah berlangsung.

Tabel 2.1. Laporan Realisasi APBN di Provinsi Sumatera Selatan 2023-2025 (Triwulan I)

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2023			TA 2024			TA 2025			% Growth	
	Pagu/Target	Realisasi	%	Pagu/Target	Realisasi	%	Pagu/Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	19.914,83	4.245,48	21,32	22.455,30	3.072,87	13,68	17.876,96	3.312,57	18,53	-20,39	7,80
Penerimaan Perpajakan	17.827,38	3.521,60	19,75	20.074,82	2.390,04	11,41	15.471,69	2.615,43	16,90	-22,93	14,21
Penerimaan Pajak	17.552,61	3.436,84	19,58	19.743,59	2.224,74	11,27	15.213,59	2.427,63	15,96	-22,94	9,12
Penerimaan Kepabeanan & Cukai	274,76	84,76	30,85	331,22	65,30	19,71	258,10	187,80	72,76	-22,08	187,61
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.087,45	723,88	34,68	2.380,48	782,83	32,89	2.405,27	697,14	28,98	1,04	-10,95
PNBP Lainnya	496,40	265,68	53,52	506,36	248,84	49,14	487,02	296,93	60,97	-3,82	19,33
Pendapatan Badan Layanan Umum	1.591,05	458,20	28,80	1.874,12	533,98	28,49	1.918,25	400,21	20,86	2,35	-25,05
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2023			TA 2024			TA 2025			% Growth	
	Pagu/Target	Realisasi	%	Pagu/Target	Realisasi	%	Pagu/Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi
Belanja Negara	51.428,90	7.975,29	15,51	54.644,44	10.396,04	19,02	49.159,76	10.201,75	20,75	-10,04	-1,87
Belanja Pemerintah Pusat	16.976,88	2.314,42	13,63	21.158,33	3.739,48	17,67	15.532,96	2.528,77	16,28	-26,59	-32,38
Belanja Pegawai	5.245,76	1.016,79	19,38	5.971,41	1.486,83	24,90	5.923,42	1.642,46	27,73	-0,80	10,47
Belanja Barang	6.728,89	978,84	14,55	8.851,75	1.644,23	18,58	7.471,96	817,93	10,95	-15,59	-50,25
Belanja Modal	4.976,91	317,16	6,37	6.306,45	607,11	9,63	2.109,98	54,67	2,59	-66,54	-91,00
Belanja Bantuan Sosial	25,32	1,63	6,43	28,73	1,31	4,58	27,61	13,71	49,65	-3,91	942,64
Transfer Ke Daerah	34.452,02	5.660,87	16,43	33.486,11	6.656,56	19,88	33.626,79	7.672,98	22,82	0,42	15,27
Dana Bagi Hasil	13.544,47	1.355,47	10,01	11.205,62	1.467,03	13,09	11.120,57	1.897,46	17,06	-0,76	29,34
Dana Alokasi Umum	12.254,41	2.999,48	24,48	13.648,50	3.448,90	25,27	14.005,31	3.618,18	25,83	2,61	4,91
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.568,36	-	-	1.430,07	-	-	927,04	-	-	-35,18	-
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	4.171,97	850,31	20,38	4.246,84	985,58	23,21	5.011,19	1.316,45	26,27	18,00	33,57
Dana Desa	2.572,42	454,88	17,68	2.594,87	755,06	29,10	2.495,22	836,39	33,52	-3,84	10,77
Insentif Fiskal	254,87	-	-	246,51	-	-	67,46	4,51	6,69	-72,63	-
Hibah ke Daerah	85,53	0,73	0,85	113,69	-	-	-	-	-	-100,00	-
Surplus/Defisit Anggaran	(31.514,07)	(3.729,81)	11,84	(32.189,15)	(7.323,18)	22,75	(31.282,80)	(6.889,18)	22,02	-2,82	-5,93

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim, dan Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, Babel (diolah)

Dengan melihat kondisi perekonomian Sumsel yang dalam tren positif, kinerja realisasi pendapatan negara secara agregat juga terpantau tumbuh positif, meskipun terdapat penurunan dari sisi realisasi pendapatan pajak penghasilan dan realisasi PNPB. Realisasi pendapatan negara di Sumsel mencapai Rp3,31 triliun atau tumbuh 7,80% dan mencapai 18,53% dari

pagu. Capaian tersebut didorong penerimaan pajak pertambahan nilai serta kepabeanan dan cukai. Pertumbuhan dipengaruhi peningkatan setoran masa PPN atas aktivitas perkebunan kelapa sawit serta meningkatnya aktivitas ekspor-impor di Sumsel khususnya ekspor CPO dan turunannya.

Grafik 2.1. Perkembangan Realisasi Belanja dan Pendapatan Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim, dan Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, Babel (diolah)

2.1.1 Pendapatan Negara

Pendapatan negara di Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan, yang terutama didorong oleh meningkatnya kinerja penerimaan dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai serta penerimaan Bea Keluar/Pungutan Ekspor. Pada triwulan I 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp2,43 triliun atau 15,96% dari target tahunan. Meskipun terjadi penurunan pada kelompok PPh yang dipengaruhi oleh implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER), penerimaan pajak tetap menjadi kontributor utama pendapatan negara di Sumsel, dengan kontribusi mencapai 73,29%. Secara tahunan (y o y), penerimaan pajak di Sumsel tumbuh positif sebesar 9,12%, didorong oleh peningkatan setoran masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari aktivitas perkebunan kelapa

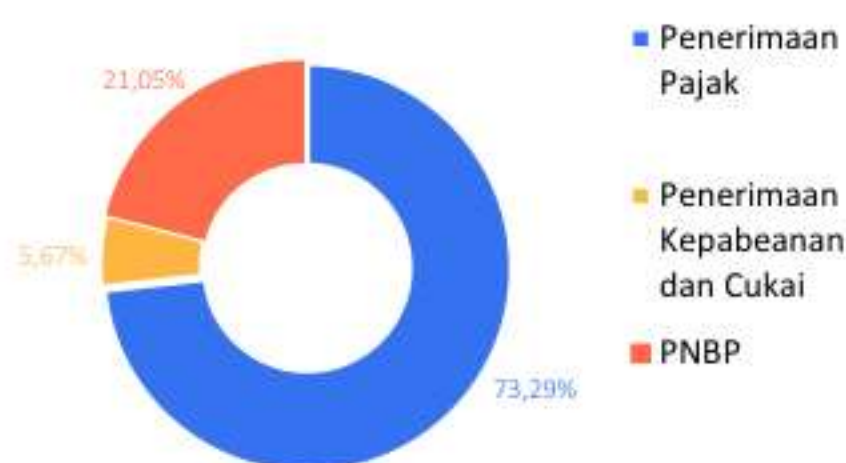
sawit, serta meningkatnya aktivitas ekspor-impor, khususnya ekspor *crude palm oil* (CPO) dan produk turunannya.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kontraksi sebesar 10,95%, dengan capaian sebesar Rp697,14 miliar atau 28,98% dari target. Penurunan terutama disebabkan oleh melemahnya kinerja pendapatan BLU, yang dipengaruhi oleh transisi kelembagaan yaitu perubahan status Universitas Sriwijaya dari BLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang berdampak pada mekanisme pencatatan dan pengesahan pendapatan, terutama pada sektor pendidikan, serta kendala dalam proses klaim BPJS di sektor layanan kesehatan. Meskipun demikian, PNBP tetap menjadi kontributor kedua terbesar terhadap pendapatan negara di Sumsel dengan porsi sebesar 21,05%.

Grafik 2.2. Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Pendapatan Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)



Grafik 2.3. Kontributor Pendapatan Negara Triwulan I 2025



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Penerimaan kepabeanan dan cukai secara keseluruhan mencatatkan pertumbuhan positif, meskipun terjadi kontraksi pada sisi penerimaan bea masuk. Total penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp187,80 miliar, tumbuh sebesar 187,61% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kinerja ekspor Sumatera Selatan yang membaik, kenaikan Harga Patokan Ekspor (HPE), serta peningkatan volume ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya, yang mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 914,38% (yoy). Namun demikian, peningkatan aktivitas ekspor tidak diikuti oleh kinerja impor yang sejalan, penerimaan dari bea masuk justru mengalami kontraksi sebesar 101,95%, terutama

disebabkan oleh penurunan impor beberapa jenis barang, khususnya mesin.

Berdasarkan kontribusinya, penerimaan kepabeanan dan cukai menyumbang sebesar 5,67% terhadap total pendapatan negara di Sumatera Selatan.

2.1.1.1 Penerimaan Pajak

Pertumbuhan penerimaan pajak di Sumatera Selatan mencerminkan bahwa perekonomian daerah berada dalam perkembangan yang positif. Hingga triwulan I 2025, total penerimaan pajak mencapai Rp2,43 triliun atau 15,96% dari target yang ditetapkan, tumbuh sebesar 9,12% secara tahunan (yoy).

Pertumbuhan penerimaan terjadi pada sebagian besar kelompok pajak, kecuali pada kelompok PPh. Kontributor terbesar terhadap total penerimaan pajak Sumsel berasal dari PPN, yang menyumbang sebesar 52,98% dan tumbuh 19,49% (yoy). PPh tetap menjadi penyumbang signifikan dengan kontribusi sebesar 40,15%, meskipun mengalami kontraksi sebesar 14,87% (yoy) sebagai dampak dari penerapan tarif TER. Di sisi lain, kelompok pajak lainnya berkontribusi sebesar 6,73% dari total penerimaan, mencatat kinerja dengan pertumbuhan hingga 15.842,85% (yoy), dan telah mencapai 824,42% dari target tahunan. Sementara itu, kontribusi paling kecil berasal dari PBB, yang hanya menyumbang 0,13% terhadap total penerimaan pajak Sumatera Selatan, namun tetap menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 34,27% (yoy).

Kelompok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kontributor utama dalam total penerimaan pajak di Sumatera Selatan. Hingga triwulan I 2025, penerimaan dari kelompok PPN mencapai Rp1,29 triliun atau 13,73% dari target tahunan. Kinerja positif ini didorong oleh meningkatnya setoran masa PPN yang bersumber dari aktivitas sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Kedua komoditas unggulan ini mencatat pertumbuhan signifikan, seiring tingginya permintaan dan harga komoditas global, serta meningkatnya volume ekspor. Selain itu, penyesuaian perpindahan penerimaan dari wajib pajak akibat implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax turut mendorong peningkatan penerimaan pada kelompok ini.

Tabel 2.2 Penerimaan Kelompok Pajak Triwulan I 2024 dan 2025 (c-to-c)

Kelompok Pajak (Rp Miliar)	2024			2025			Growth (%)	Share Kelompok Pajak TA 2025 (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Pajak Penghasilan (PPh)	8.832,22	1.144,89	12,96	5.666,91	974,67	17,20	-14,87	40,15%
PPN & PPNBM	8.484,68	1.076,39	12,69	9.371,04	1.286,21	13,73	19,49	52,98%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	2.268,48	2,44	0,11	155,81	3,27	2,10	34,27	0,13%
Pendapatan Pajak Lainnya	158,20	1,03	0,65	19,83	163,48	824,42	15.842,85	6,73%
Total Penerimaan Pajak	19.743,59	2.224,74	11,27	15.213,59	2.427,63	15,96	9,12	100,00%

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Babel (diolah)

2.1.1.2 Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Aktivitas ekspor-impor di Sumatera Selatan memberikan dampak langsung terhadap penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga triwulan 1 2025, penerimaan dari bea keluar mencatatkan realisasi sebesar Rp187,76 miliar, tumbuh signifikan sebesar 914,38% secara tahunan (yoy), dan menjadi kontributor utama dalam penerimaan kepabeanan di wilayah Sumsel. Sementara itu, penerimaan bea masuk terealisasi sebesar Rp15,08 miliar, namun, karena adanya restitusi sebesar Rp15,99 miliar, maka realisasi bersih bea masuk sampai dengan 31 Maret 2025 menjadi minus Rp911,44 juta. Kondisi ini mencerminkan penurunan sebesar 101,95% (yoy) atau hanya mencapai -0,55% dari target yang ditetapkan. Di sisi lain, penerimaan cukai mencatatkan realisasi sebesar Rp954,37 juta, dengan pertumbuhan yang sangat tinggi, yakni 2.598,87% (yoy).

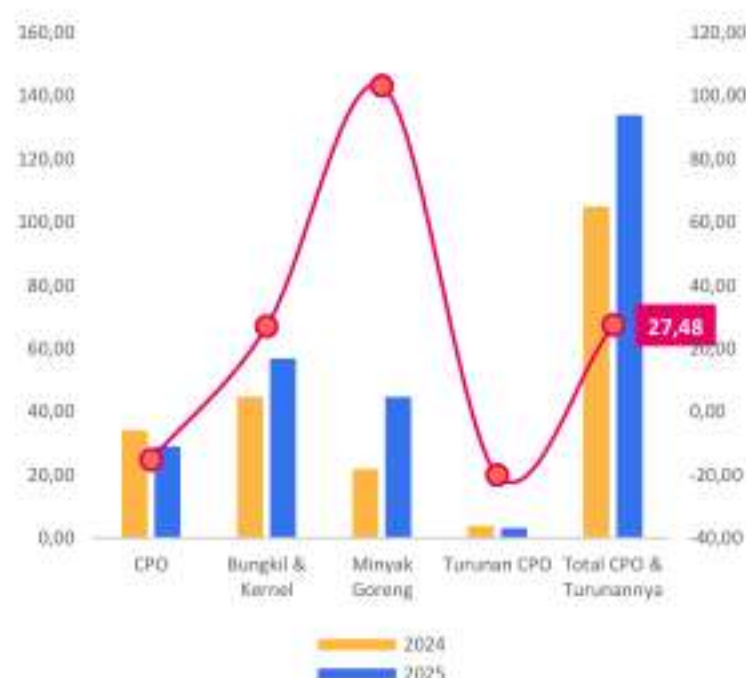
Grafik 2.4. Perkembangan Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Penerimaan bea keluar tumbuh positif dan tercapai diatas target. Capaian bea keluar pada triwulan I 2025 mencapai 201,27% dan tumbuh positif 914,38% (yoy) dipengaruhi oleh kenaikan harga patokan ekspor (HPE) serta peningkatan volume ekspor CPO dan turunannya. Komoditi ekspor yang dikenakan bea keluar s.d. 31 Maret 2025 didominasi Produk CPO, dari beberapa komoditas yang dapat dikenakan bea keluar sesuai PMK 4/2025.

Grafik 2.5. Perkembangan Volume dan Harga Patokan Ekspor CPO & Turunannya



Perkembangan Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO & Turunannya



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim dan Kementerian Perdagangan (diolah)

Penerimaan Bea Keluar Tumbuh Positif didukung Kenaikan Volume dan Harga Ekspor CPO. Peningkatan volume ekspor serta kenaikan harga patokan ekspor (HPE) komoditas CPO dan produk turunannya menjadi faktor utama pertumbuhan penerimaan bea keluar di Sumatera Selatan., volume ekspor CPO dan turunannya tercatat tumbuh sebesar 27,48% (yoy), dari 104,94 ribu ton menjadi 133,77 ribu ton.

Selain itu, rata-rata HPE untuk produk CPO juga mengalami kenaikan signifikan, yakni sebesar 25,50% (yoy), dari sebelumnya USD 788,70/MT menjadi USD 989,83/MT. Kombinasi antara peningkatan volume ekspor dan kenaikan harga ini mendorong penerimaan bea keluar melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga mencatatkan kinerja yang sangat positif sepanjang periode berjalan.

Tabel 2.3. Realisasi Impor dan Bea Keluar Komoditas Triwulan I 2025

Top 10 Komoditas Impor		Top 10 Komoditas terkena Bea Masuk	
Komoditi	Jumlah (Juta USD)	Komoditi	Jumlah (Rp Miliar)
Mesin	78,84	Mesin	1,89
Kayu Kasar	23,49	Barang dari Keramik	0,93
Mesin Perkakas	23,37	Parts Mesin	0,91
Pupuk	21,95	Parts dan Aksesoris Sepeda	0,56
Mobil	8,72	Barang Tambang Non Mineral	0,53
Reaktor, Turbin, Generator	8,65	Parts Alat Berat	0,52
Generator	7,05	Produk Jadi Karet	0,45
Mcb, Stop Kontak, Tusuk Kontak	6,63	Kacang Tanah	0,41
Barang dari Batu	6,23	Pupuk	0,38
Bahan Baku Karet	3,46	Barang dari Batu	0,37

Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Penurunan Aktivitas Impor Berdampak pada Penerimaan Bea Masuk di Sumsel. Tren penurunan aktivitas impor di Sumatera Selatan berdampak langsung pada penurunan penerimaan bea masuk. Hingga triwulan I 2025, nilai impor Sumsel tercatat turun sebesar 62,29% (yoy), yang menyebabkan penerimaan bea masuk mengalami penurunan hingga 101,95% (yoy). Bahkan, realisasi penerimaan bea masuk hanya mencapai minus 0,55% dari target yang telah ditetapkan.

Komoditas mesin tercatat sebagai penyumbang utama aktivitas impor di Sumsel dengan nilai mencapai USD 78,84 juta. Namun demikian, tidak semua impor mesin dikenakan bea masuk, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam PMK 188/2015 yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk keperluan pengembangan industri.

Menurunnya penerimaan bea masuk di Provinsi Sumatera Selatan hingga triwulan I 2025 sejalan dengan penurunan impor beberapa jenis komoditas, terutama pada kelompok mesin dan barang dari keramik. Komoditas mesin tercatat memberikan kontribusi penerimaan bea masuk sebesar Rp1,89 triliun, turun sebesar 9,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Sementara itu, penurunan impor bahan baku keramik juga memberikan dampak signifikan terhadap penurunan penerimaan. Pada periode ini, komoditas barang dari keramik hanya menyumbang Rp923 miliar terhadap penerimaan bea masuk, mengalami penurunan tajam sebesar 62,70% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penerimaan cukai di Provinsi Sumatera Selatan hingga triwulan I 2025 tidak memiliki target khusus, karena umumnya berasal dari sanksi administratif cukai (*ultimum remedium*) atas pelanggaran ketentuan peredaran barang kena cukai. Total penerimaan cukai tercatat sebesar Rp954,37 juta, yang bersumber dari beberapa komponen. Kontribusi terbesar berasal dari sanksi administratif atas penindakan rokok ilegal (hasil tembakau) sebanyak 34.720 batang, dengan nilai penerimaan mencapai Rp919,19 juta. Selain itu, terdapat penerimaan dari denda atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp30 juta, serta denda administratif Etil Alkohol (EA) sebesar Rp5,18 juta.

Total penerimaan ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 2.598,87% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Lonjakan ini mengindikasikan adanya peningkatan peredaran rokok ilegal dan MMEA ilegal di wilayah Sumatera Selatan, yang memicu intensifikasi penindakan dan pengenaan sanksi administratif oleh otoritas terkait.

2.1.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumsel tumbuh negatif yang dipengaruhi menurunnya PNBP BLU di triwulan I 2025. Hingga akhir Triwulan I 2025, total PNBP di Sumsel terealisasi Rp697,14 miliar (28,98% dari target) atau tumbuh -10,95% (yoy). Berdasarkan jenisnya, PNBP BLU mencatatkan realisasi sebesar Rp 400,21 miliar (20,86% dari target) dan tumbuh -25,05% (yoy). PNBP BLU berkontribusi lebih besar dengan share 57,41% dibandingkan PNBP Lainnya yang berkontribusi 42,59% mencatatkan penerimaan mencapai Rp296,93 miliar (19,33% dari target).

PNBP BLU utamanya dikontribusi dari PNBP jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa pelayanan barang dan jasa lainnya. Pada Triwulan I 2025, jasa pelayanan kesehatan mencatatkan realisasi sebesar Rp280,99 miliar atau tumbuh negatif -0,38% (yoy). Penurunan ini disebabkan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang lebih rendah pada Satker BLU Rumah Sakit bila dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu. Selanjutnya, PNBP jasa pelayanan pendidikan mencatatkan realisasi mencapai Rp 111,58 miliar dan tumbuh -51,90% (yoy) yang disebabkan adanya perubahan status satker pada Universitas Sriwijaya dari BLU menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) sehingga

pendapatannya tidak lagi disetorkan ke kas negara. Selain itu, PNBP jasa pelayanan barang dan jasa lainnya juga mencatatkan realisasi mencapai Rp6,45 miliar dan tumbuh -79,77% (yoy) hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan pada satker Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan serta perubahan status pada satker Universitas Sriwijaya.

Grafik 2.6. Realisasi Per Jenis PNBP Sumsel (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

PNBP Lainnya utamanya dikontribusi dari PNBP di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada triwulan I 2025, PNBP pada Kementerian Perhubungan di Sumsel mencatatkan realisasi mencapai Rp296,93 miliar dan tumbuh positif 19,33% (yoy) yang sebagian besar berasal dari Pendapatan Jasa Kepelabuhanan, Pendapatan Pelayanan Pertanahan pada Kementerian ATR/BPN, pendapatan layanan Kepolisian serta pendapatan layanan keimigrasian/paspor. Selanjutnya penyumbang lain yang cukup besar pada PNBP lainnya yaitu berasal dari berbagai macam pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu sebesar Rp87,29 miliar.

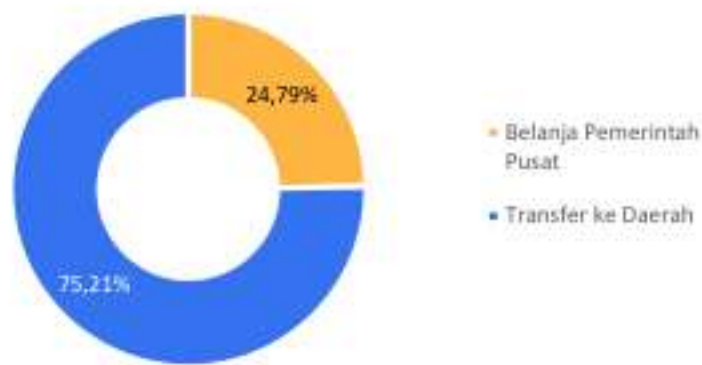
2.1.2 Belanja Negara

Belanja negara secara umum berkontraksi sebesar -1,87%, berdampak pada kondisi pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) di Sumsel. Hingga Triwulan I 2025, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp10.201,75 miliar dengan realisasi pada belanja pemerintah pusat (BPP) Rp2.528,77 miliar dan TKD Rp7.672,98 miliar. Dari sisi BPP menunjukkan kinerja yang negatif yaitu berkontraksi sebesar 32,38% (yoy), namun dari sisi TKD menunjukkan pertumbuhan sebesar 15,27% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi pada belanja negara.

Grafik 2.7. Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Belanja Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)



Kontribusi Realisasi Belanja Negara Triwulan I Tahun 2025



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja negara di Sumsel utamanya dimanfaatkan untuk mendukung APBD melalui penyaluran TKD. Hal ini terlihat dari proporsi realisasi belanja TKD pada triwulan I 2025 di Sumsel yang memiliki *share* 75,21% dari total belanja negara. Sementara itu, realisasi BPP berkontribusi sebesar 24,79% dari total belanja negara. BPP belum mencatatkan capaian belanja yang optimal pada triwulan I 2025, hanya mencapai 16,28% dari pagu, sedangkan untuk belanja TKD mencapai 22,82% dari pagu. Realisasi belanja TKD diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan di daerah sehingga dapat memberikan *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian.

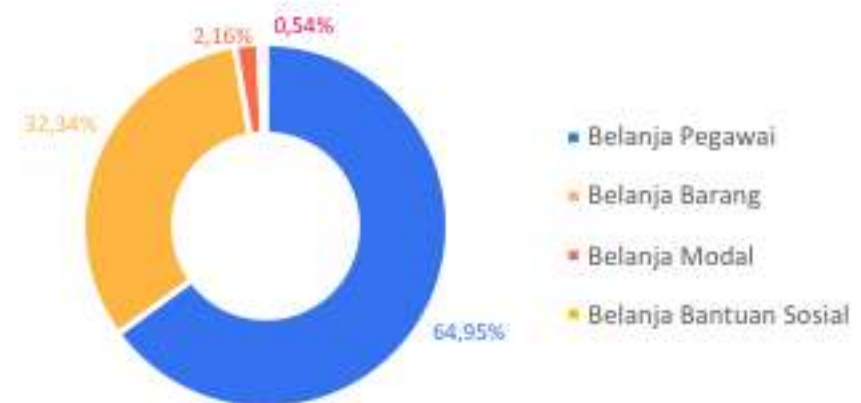
2.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dan daerah. Kebijakan tersebut membawa dampak signifikan terhadap realisasi belanja pemerintah pusat terutama di Triwulan I 2025. Dalam upaya menekan defisit anggaran dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara, pemerintah mengarahkan pemblokiran atau penundaan beberapa alokasi anggaran, terutama untuk belanja barang dan modal yang bersifat non-prioritas. Hal ini berpengaruh pada penurunan belanja barang dan modal di Triwulan I 2025, sementara belanja pegawai tetap mendapat perhatian utama untuk menjaga stabilitas pelayanan publik. Di sisi lain, Belanja Bantuan sosial tidak termasuk dalam efisiensi dikarenakan anggaran yang tersedia lebih efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga realisasinya relatif berprogress dengan baik. Kebijakan efisiensi anggaran secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan kinerja yang lebih tepat sasaran, meski dihadapkan pada tantangan untuk tetap menjaga kualitas pelayanan masyarakat.

Berdasarkan jenisnya, realisasi BPP berkontribusi dari belanja pegawai dan barang. Realisasi belanja pegawai berkontribusi 64,95% dari total BPP Sumsel. Sejalan dengan itu, realisasi belanja barang juga berkontribusi besar bagi total BPP Sumsel dengan *share* 32,34%. Sementara itu, belanja modal yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* tinggi cenderung masih relatif rendah yang berkontribusi 2,16% dari total BPP. Di Triwulan I 2025 Belanja Modal mengalami pertumbuhan negatif sebesar 91% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi adanya kebijakan efisiensi belanja. Di sisi lain, belanja bantuan sosial berkontribusi 0,54% dari total

BPP yang dipergunakan dalam rangka perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan di Sumsel.

Grafik 2.8. Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat per Jenis



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja pegawai Sumsel tumbuh positif dan berperan krusial mendukung peningkatan produktivitas ASN serta melanjutkan proses reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas maka kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitasnya dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi ASN melalui pemberian kenaikan gaji pokok, pembayaran gaji ke-13, dan THR. Ditengah kebijakan efisiensi anggaran, realisasi belanja pegawai di Sumsel mencapai Rp 1.642,46 miliar atau 27,73% dari pagu, tumbuh positif 10,47% (yoy). Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja pegawai di Triwulan I 2025 turut dipengaruhi adanya pembayaran THR ASN sesuai PP Nomor 11 Tahun 2025 (komponen tunjangan kinerja dibayarkan 100%).

Grafik 2.9. Perkembangan Belanja Pegawai

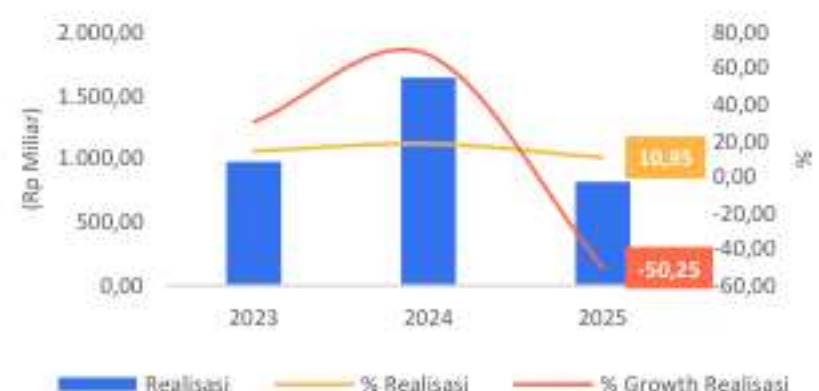


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja barang Sumsel tumbuh negatif yang disebabkan adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Realisasi belanja barang di Triwulan I 2025 sebesar Rp817,93 Miliar atau 10,95%, mengalami kontraksi sebesar 50.25% (yoy). Hal ini tidak terlepas dari adanya blokir anggaran sebesar 33,64% dari pagu sebagai imbas kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Grafik 2.10. Perkembangan Belanja Barang

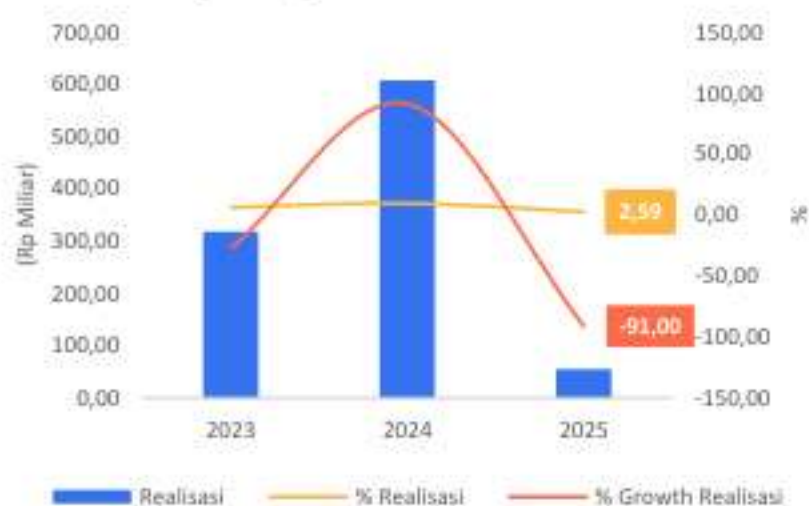


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja modal Sumsel tumbuh negatif yang disebabkan adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Realisasi belanja modal di Triwulan I 2025 sebesar Rp54,67 Miliar atau 2,59%, mengalami pertumbuhan negatif sebesar 91% (yoy). Capaian realisasi belanja modal dipengaruhi adanya blokir anggaran 51,68% dari pagu sehubungan kebijakan efisiensi anggaran pada proyek-proyek PSN yang bersifat *multiyears*, utamanya dipengaruhi realisasi pengeluaran pemerintah untuk beberapa proyek yang tidak lagi menjadi PSN ditahun 2025. Kondisi ini menyebabkan belanja modal di triwulan I 2025 mengalami kontraksi yang sangat signifikan.

Grafik 2.11. Perkembangan Belanja Modal

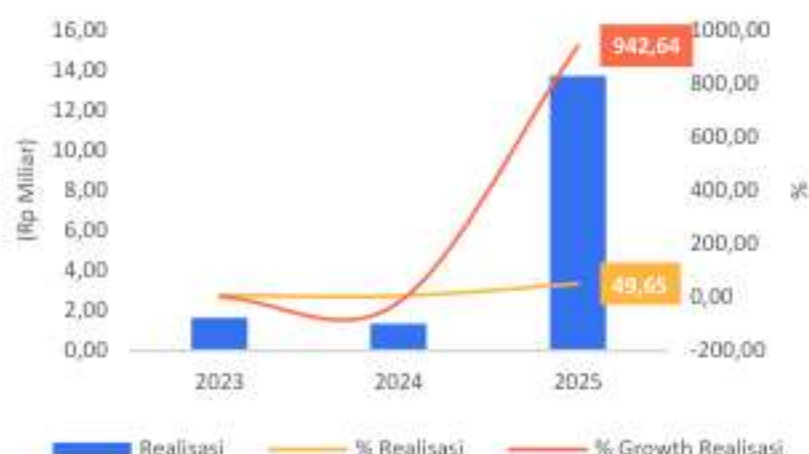


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja bantuan sosial Sumsel tumbuh positif dan terus dijaga agar tetap optimal dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Pada periode triwulan I 2025, realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp13,71 miliar (49,65% dari pagu) dan tumbuh positif 942,64% (yoy).

Capaian realisasi belanja bantuan sosial yang optimal tidak terlepas dari realisasi pembayaran KIP Kuliah tahap I pada satker UIN Raden Fatah, selain itu belanja sosial dikecualikan dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Grafik 2.12. Perkembangan Belanja Bantuan Sosial



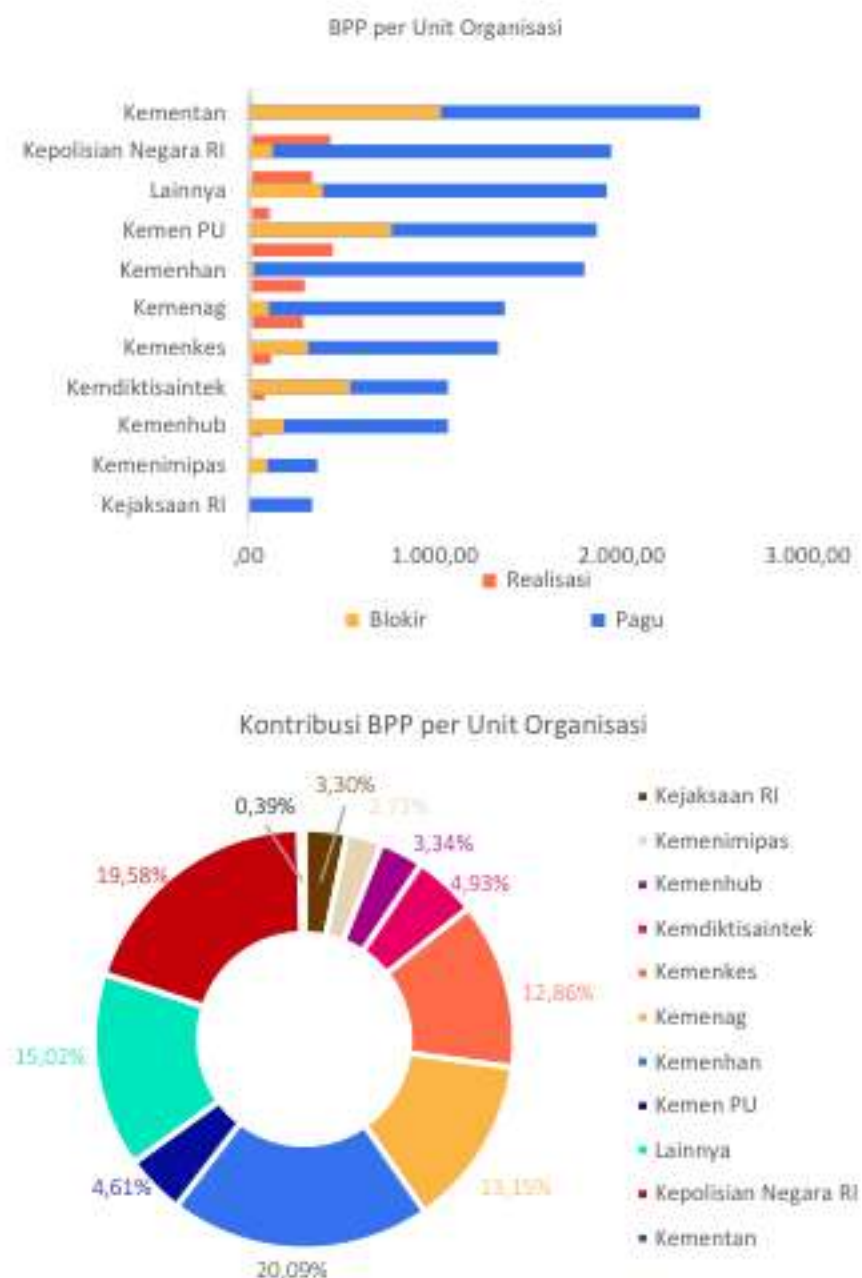
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Berdasarkan unit organisasi, BPP di Sumsel dengan 10 pagu belanja terbesar ada pada Kementerian Pertanian, Kepolisian Negara RI, Kementerian PU, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan Kejaksaan RI yang menyumbang sebesar 87,61% pagu BPP di Sumsel TA 2025.

Dari 10 kementerian tersebut, realisasi belanja pada Kementerian Pertahanan menjadi yang tertinggi yaitu sebesar Rp571,09 miliar atau 31,68%. Diikuti oleh Kepolisian Negara RI sebesar 28,60% dan Kejaksaan RI sebesar 27,52%. Hal ini tidak terlepas dari jumlah blokir yang relatif kecil pada ketiga kementerian tersebut sehingga tetap mampu mengoptimalkan belanja. Sementara itu, Kementerian

Pertanian yang memiliki pagu tertinggi namun realisasinya masih sangat rendah yaitu sebesar 0,45% dari pagu. Hal ini tidak terlepas dari blokir efisiensi belanja sebesar 42,54%.

Grafik 2.13. Realisasi dan Kontribusi BPP per Unit Organisasi



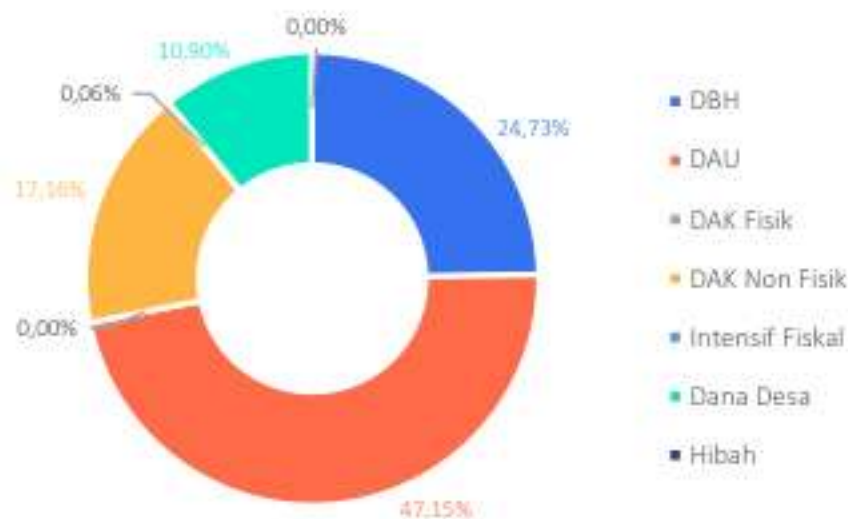
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Ditinjau dari capaiannya, fungsi Ketertiban dan Keamanan memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 27,52% dengan realisasi sebesar 23,34% dari pagu. Fungsi ini sebagian besar ada pada Kepolisian RI. Fungsi Ekonomi sebagai penyumbang pagu terbesar kontribusinya di Triwulan I 2025 belum menunjukkan kinerja yang optimal yaitu sebesar 11,35%. Penyumbang kontribusi terendah berdasarkan fungsi yaitu berasal dari fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum yang hanya berkontribusi sebesar 0,05%, fungsi ini sebagian besar ada pada Kementerian Kesehatan.

2.1.2.2 Transfer ke Daerah (TKD)

Kinerja realisasi TKD di Sumsel tumbuh positif untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Hingga triwulan I tahun 2025, realisasi TKD mencapai Rp7.672,98 miliar dan mengalami kenaikan 15,27% (yoy). Dari sisi capaiannya mencatatkan kinerja yang cukup baik pada triwulan I dimana mencapai 22,82% dari pagu dalam mendukung APBD Sumsel. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh percepatan pemenuhan syarat salur pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun Satker OPD pada penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Grafik 2.14. Kontribusi Transfer ke Daerah per Jenis

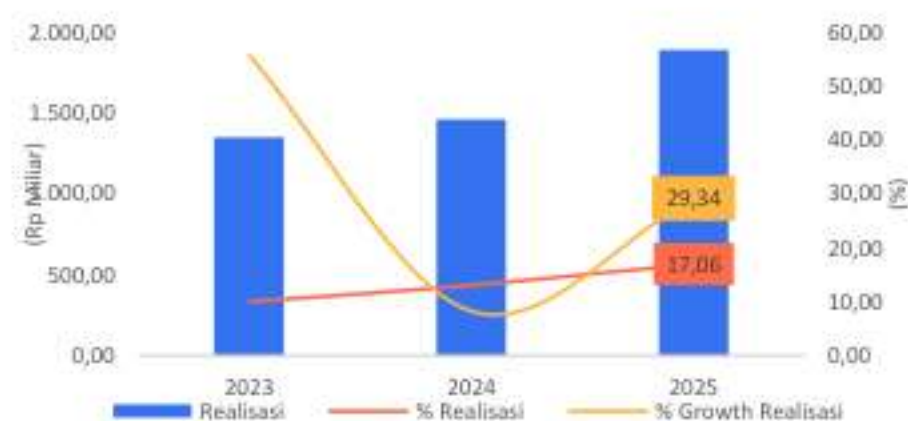


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Berdasarkan jenisnya, TKD di Sumsel didominasi oleh penyaluran DAU. Realisasi DAU mencapai 47% dari total realisasi TKD Sumsel di tahun 2025. Hal ini lumrah terjadi karena alokasi DAU selalu menjadi yang paling tinggi sejalan dengan kebijakan *hold harmless* sampai tahun 2027 yang mengharuskan alokasi DAU tidak berkurang dari tahun sebelumnya. Selain itu, penyaluran DAU *block grant* yang dilakukan setiap bulan sesuai rekomendasi salur sebesar 1/3 dari pagu tahunan, menjadi pendorong realisasi DAU lebih cepat dari jenis TKD lainnya sebagai dampak kecepatan pemda/pemdes dalam memenuhi syarat salur sesuai batas waktu.

Penyaluran DBH Sumsel optimal dan berperan penting mengurangi *vertical imbalance*, menanggulangi eksternalitas negatif, serta meningkatkan pemerataan di Sumsel. Hingga triwulan I tahun 2025, realisasi DBH mencapai Rp1.897,20 triliun (17,06% dari pagu) dan mengalami peningkatan 4,91% (yoy). Capaian tersebut naik dibandingkan tahun 2024 disebabkan tingkat ketaatan pembayaran pajak dan rekonsiliasi pajak lebih baik dibanding tahun sebelumnya untuk periode triwulan I TA 2025.

Grafik 2.15. Perkembangan Dana Bagi Hasil



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Meskipun penyaluran DBH dari segi capaiannya telah optimal, namun masih terdapat isu dalam pelaksanaan penyaluran DBH yang terjadi di Sumsel antara lain:

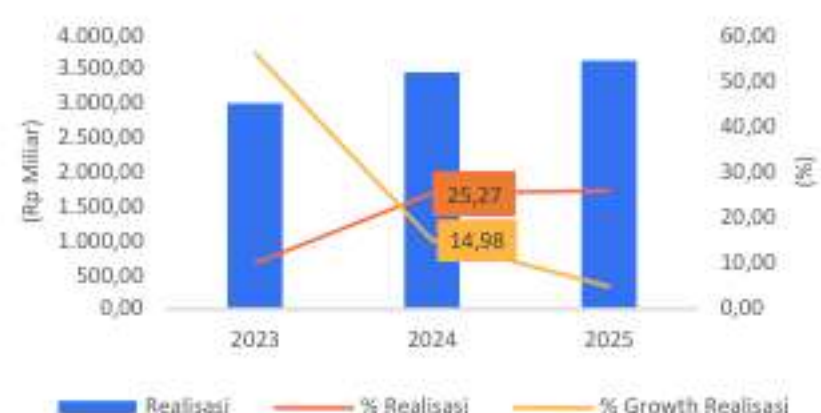
- Terdapat Pemda yang terlambat menyampaikan SPM menjelang akhir periode penyaluran
- Terdapat beberapa Pemda yang terlambat dalam penyelesaian rekonsiliasi pajak yaitu Kab OKI dan Kota Prabumulih
- Kurangnya pemahaman Pemda tentang kebijakan penyaluran DBH Kurang Bayar melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF).

Beberapa permasalahan tersebut berpengaruh pada efektivitas penyaluran DBH di Provinsi Sumsel yang digunakan untuk mendukung pendanaan APBD.

Penyaluran DAU Sumsel tumbuh positif dan digunakan untuk menjaga pemerataan keuangan daerah serta memperkuat kebijakan penggunaan yang telah ditentukan untuk memperbaiki kualitas layanan publik di Sumsel. Hingga triwulan I tahun 2025 realisasi DAU mencapai Rp3.618,18 miliar, meningkat 4,91% (yoy). Capaian realisasinya pun mencatatkan kinerja yang optimal dimana tercapai 25,83% dari pagu. Pertumbuhan positif realisasi DAU utamanya didorong kinerja DAU *Block Grant* sejalan dengan kebijakan *hold harmless* sampai tahun 2027.

Meskipun penyaluran DAU dari segi capaiannya sudah baik dan dalam tren positif, namun masih terdapat isu pelaksanaan penyaluran DAU yang terjadi di Sumsel.

Grafik 2.16. Perkembangan Dana Alokasi Umum



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Permasalahan dalam penyaluran DAU antara lain:

- Terjadinya gagal salur DAU pendanaan kelurahan dipengaruhi kesulitan kantor kelurahan dalam merealisasikan dana tersebut. Hal ini terjadi disebabkan karena masih terbatasnya kapasitas SDM di kelurahan untuk mengelola DAU Pendanaan Kelurahan.
- Realisasi DAU penggajian PPPK juga belum optimal di beberapa Pemda dipengaruhi keterlambatan pengangkatan pegawai sehingga DAU penggajian PPPK tidak dapat disalurkan.
- Penundaan penyaluran DAU akibat keterlambatan laporan realisasi belanja pegawai di beberapa pemda di Sumsel.

Penyaluran DAK Fisik belum terdapat realisasi sampai dengan triwulan I 2025, kondisi tersebut sama seperti tahun sebelumnya yang disebabkan antara lain:

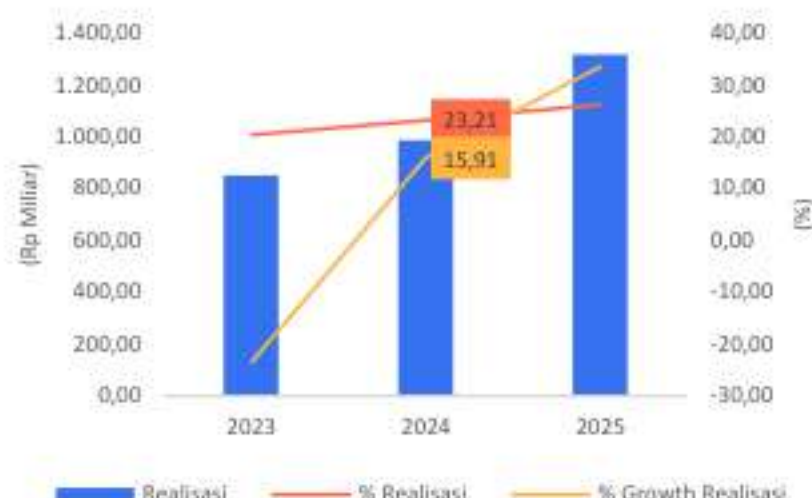
- Proses penyaluran DAK Fisik membutuhkan waktu lebih lama terutama dalam proses pelelangan penyedia barang/jasa pada OPD di Pemda lingkup Sumatera Selatan.
- Belum adanya norma waktu reviu dokumen oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Koordinasi internal pemda dan peran BPKAD yang masih belum optimal turut menjadi penghambat realisasi penyaluran DAK Fisik.

Penyaluran DAK Non Fisik Sumsel tumbuh positif, namun masih terdapat beberapa kendala antara lain:

- Insinkronisasi data supplier pada Kemendikdasmen dengan data SPAN sehingga berdampak pada peningkatan jumlah retur terutama dalam penyaluran dana TPG ASN Daerah
- Belum semua Bidang DAK Non Fisik tersalurkan seperti BO Keluarga Berencana (KB), BO Penyuluh Pertanian dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

- Masih terdapat sisa dana DAK Non Fisik pada RKUD sehingga terjadi pemotongan DAU
- Terdapat kesalahan kode KPP dan kode akun potongan pajak yang menyebabkan retur.

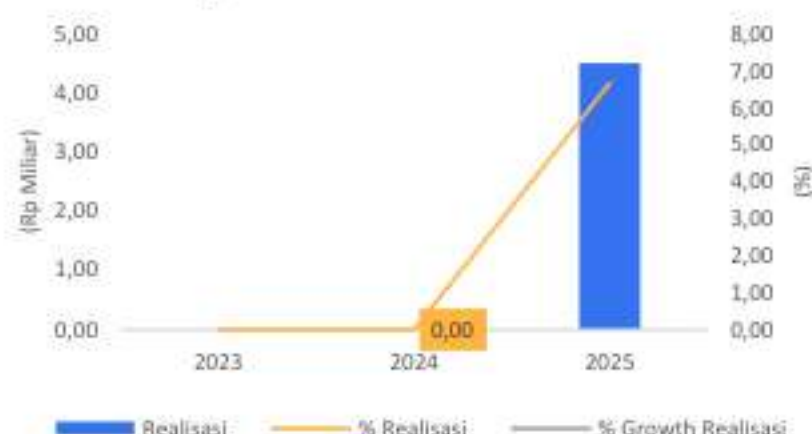
Grafik 2.17. Perkembangan Dana Alokasi Khusus Non Fisik



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Penyaluran Insentif Fiskal mencatat nilai positif di tahun 2025. Hingga triwulan I 2025, realisasi insentif fiskal mencapai Rp4,51 miliar (6,69% dari pagu) dan mencatat tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya yang tidak mencatat realisasi di periode triwulan I. Terdapat 1 pemda di Sumsel pada triwulan I yang mencatat realisasi sebesar Rp4,51 miliar dari alokasi pagu Rp.9,02 miliar dari 8 Pemda yang memperoleh alokasi insentif fiskal pada tahun 2025.

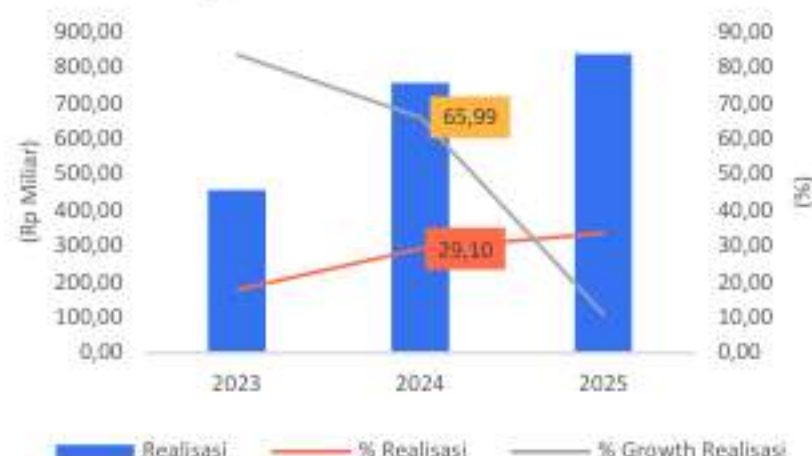
Grafik 2.18. Perkembangan Insentif Fiskal



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Penyaluran Dana Desa Sumsel tumbuh positif dan optimal 2025. Hingga triwulan I tahun 2025, realisasi dana desa mencapai Rp836,39 miliar (33,52% dari pagu) dan tumbuh positif 10,77% (yoy). Hal ini didorong oleh percepatan penyaluran dana desa yang diinisiasi Kanwil DJPb Prov Sumsel dan KPPN lingkup Sumsel. Penyaluran dana desa berjalan secara optimal pada triwulan I tahun 2025 dengan capaian yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang mencatat realisasi 29,10% dari pagu. Dari 2.855 desa yang mendapatkan dana desa, sebanyak 3.710 telah salur pada triwulan I TA 2025.

Grafik 2.19. Perkembangan Dana Desa



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Meskipun penyaluran dana desa dari segi capaiannya sudah baik dan dalam tren positif namun masih terdapat isu pelaksanaan penyaluran dana desa yang terjadi di Sumsel antara lain:

- Pemahaman operator pada Pemda terhadap aplikasi OMSPAN TKD yang belum optimal.
- Keterlambatan penyusunan APBDes salah satunya pada Desa di wilayah Kabupaten OKU Selatan.
- Adanya keterlambatan dalam perekaman pagu *earmark*
- Ketidaksesuaian antara jumlah KPM BLT Perkades dengan rekaman pada OMSPAN TKD.
- Terdapat tambahan syarat salur pada TA 2025 berupa ADK APBDes berdampak pada perlambatan penyaluran
- Aplikasi SISKEUDES belum terintegrasi dengan aplikasi SIKD Teman Desa
- Adanya dugaan tindak pidana korupsi dana desa pada Pemda seperti yang terjadi pada desa di Kabupaten Musi Rawas.

Grafik 2.20. Perkembangan Hibah ke Daerah



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

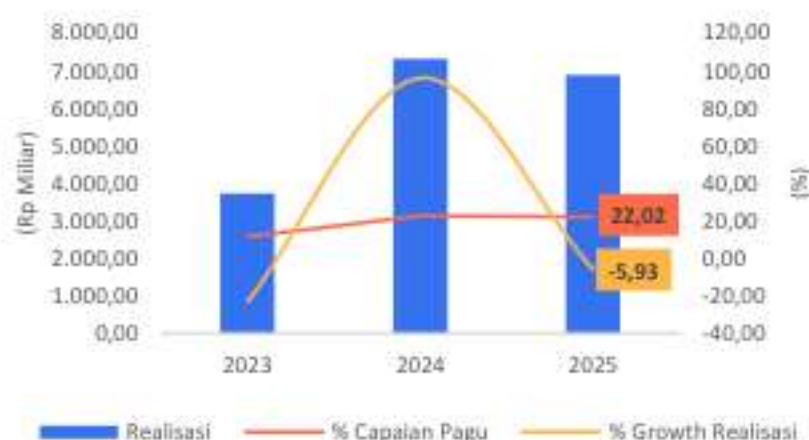
Hibah ke Daerah Sumsel pada tahun 2025 belum terdapat alokasi maupun realisasi pada triwulan I TA 2025 sama capaian tahun lalu pada periode yang sama. Dapat disampaikan bahwa mekanisme penyaluran hibah ke daerah bersifat *reimbursement* sehingga pemerintah daerah melaksanakan kegiatan terlebih dahulu dengan dana APBD (*prefinancing*), kemudian setelah kegiatan selesai dan telah diverifikasi teknis oleh K/L dapat diajukan *reimbursement* oleh daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

2.1.3 Surplus/Defisit

Sampai dengan 31 Maret 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp6,89 triliun, atau 22,02% dari target. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 5,93% (yoy), mencerminkan perbaikan kinerja fiskal, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Penurunan defisit ini didorong oleh peningkatan realisasi pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Di sisi lain, belanja negara mengalami penurunan, terutama belanja pemerintah pusat.

Defisit anggaran yang terjadi hingga akhir Maret 2025 masih menunjukkan kinerja APBN masih *on-track* bekerja keras untuk membiayai program prioritas pemerintah. Capaian ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara serta menerapkan pengendalian belanja yang lebih disiplin dan terukur.

Grafik 2.21. Perkembangan Defisit APBN Sumsel



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.4 Prognosis Realisasi APBN

Prognosa pendapatan negara di Sumatera Selatan diperkirakan akan melampaui target hingga akhir tahun 2025. Prognosa per triwulan menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara *on-track*, mencerminkan tren positif dari kinerja penerimaan. Di antara seluruh jenis penerimaan, pendapatan pajak diprediksi menjadi komponen yang paling signifikan, dengan proyeksi realisasi mencapai 105,46% dari target. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang menunjukkan peningkatan serta kecenderungan meningkatnya setoran pajak pada akhir tahun.

Penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai juga diperkirakan akan melampaui target hingga akhir 2025. Bahkan diprediksi mencapai angka 147,54%. Kinerja bea masuk didorong oleh impor barang modal serta impor beras melalui Bulog yang diperkirakan terus berlangsung sampai penghujung tahun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksi akan tercapai sesuai target, yakni sebesar 100,03%. Namun, proyeksi capaian tersebut menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu faktor penurunan tersebut adalah perubahan status Universitas Sriwijaya dari BLU menjadi PTNBH yang berdampak terhadap pendapatan PNBP.

Kinerja Belanja Negara di prognosis *on-track* sampai dengan akhir tahun 2025. Diperkirakan akan mencapai 94,30% diakhir tahun. Capaian belanja negara diprediksi mengalami penurunan bila dibandingkan tahun lalu dikarenakan adanya efisiensi belanja pada belanja barang dan belanja modal serta pada belanja TKD.

Belanja Pemerintah Pusat di prognosis akan mencapai 97,87%. Meskipun di tengah efisiensi namun Satker dituntut tetap mengoptimalkan pagu belanja yang ada sehingga pelayanan terhadap masyarakat tetap terlaksana dengan optimal.

Untuk penyaluran Transfer ke Daerah diprognoisis akan mencapai 92,64% di akhir tahun 2025. Hal tersebut didorong oleh kerjasama antara KPPN dengan Pemda agar dapat memenuhi syarat salur penyaluran TKD sehingga tidak terjadi gagal salur.

Tabel 2.4. Proyeksi Realisasi APBN Sumsel 2025

Akun (%)	s.d. Q2 2025	s.d. Q3 2025	s.d. Q4 2025
	%	%	%
Pendapatan Negara	40,13%	65,98%	105,46%
Penerimaan Pajak	38,18%	63,16%	105,60%
Bea Cukai	65,77%	109,98%	147,54%
PNBP	49,88%	79,43%	100,03%
Belanja Negara	39,18%	66,12%	94,30%
Belanja Pemerintah Pusat	42,72%	68,72%	97,87%
Transfer Ke Daerah	37,54%	64,92%	92,64%
Surplus/Defisit	38,63%	66,21%	87,77%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.2 Pelaksanaan APBD Sumsel

Di tengah transisi pemerintahan baru dan implementasi kebijakan efisiensi belanja, kinerja APBD di wilayah Sumatera Selatan tetap menunjukkan optimisme. Hingga akhir Triwulan I 2025, realisasi pendapatan daerah di lingkup Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp7,49 triliun, atau mencapai 16,16% dari total target pendapatan tahun anggaran berjalan. Meskipun demikian, pendapatan daerah mengalami kontraksi sebesar -20,72% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh perlambatan di sisi Transfer ke Daerah (TKD), yang merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan daerah. Penyesuaian kebijakan transfer dari pemerintah pusat sebagai bagian dari efisiensi belanja pemerintah menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja pendapatan tersebut.

Di sisi belanja, realisasi hingga Triwulan I 2025 mencapai Rp5,04 triliun, atau sekitar 10,45% dari total pagu anggaran. Berbeda dengan sisi pendapatan, kinerja belanja daerah menunjukkan pertumbuhan positif, dengan peningkatan sebesar 14,64% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh realisasi belanja operasional, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan layanan publik dan operasional pemerintahan, meskipun dalam kondisi fiskal yang lebih ketat.

Transisi Pemerintahan Baru dan dampaknya terhadap arah Belanja Daerah serta Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pemerintahan baru secara efektif mulai beroperasi pada pertengahan Triwulan I 2025, ditandai dengan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Kepala Daerah yang baru mulai menjalankan tugas secara resmi sejak tanggal 20 Februari 2025. Momentum ini diperkirakan akan memengaruhi arah kebijakan belanja daerah, seiring dengan upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan janji-janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat selama masa kampanye. Arah kebijakan tersebut tetap selaras dengan visi dan misi nasional, yaitu Asta Cita Pemerintahan Presiden Republik Indonesia.

Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembangunan nasional pada tahun 2025, antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan pemerataan ekonomi.

Terdapat enam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu:

1. Pengembangan Lumbung Pangan (*Food Estate*);
2. *Biorefinery* Sumatera;
3. Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan;
4. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut;
5. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi;
6. Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Pelaksanaan proyek-proyek strategis ini diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, baik secara langsung melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi, maupun secara tidak langsung melalui peningkatan daya saing wilayah. Selain itu keberadaan PSN juga akan memengaruhi kinerja fiskal daerah, baik dari sisi pendapatan melalui peningkatan potensi pajak dan retribusi

daerah maupun dari sisi belanja, khususnya dalam bentuk dukungan infrastruktur dan penguatan layanan publik yang bersifat komplementer terhadap proyek-proyek tersebut.

Instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi belanja APBD dengan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk program/kegiatan prioritas. Pada awal tahun 2025, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Inpres ini mengarahkan kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melakukan rasionalisasi anggaran, khususnya dengan membatasi alokasi belanja pada kegiatan non-prioritas seperti seremoni, kajian, studi banding, publikasi, dan FGD.

Fokus belanja diarahkan pada program yang memiliki output dan *outcome* yang jelas dalam mendukung pelayanan publik. Efisiensi ini juga tercermin dalam kebijakan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami penyesuaian

sehingga berdampak pada perlambatan realisasi pendapatan transfer di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Mengingat TKD merupakan komponen dominan dalam struktur pendapatan daerah, penurunan ini memberikan pengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, struktur ekonomi Sumatera Selatan yang masih bertumpu pada sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan pertambangan membatasi ruang ekspansi PAD karena penerimaan dari sektor tersebut tidak langsung masuk sebagai PAD tapi melalui Dana Bagi Hasil pemerintah pusat. Dalam konteks ini, efisiensi belanja menjadi instrumen utama untuk menjaga keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) dan memastikan bahwa belanja publik tetap produktif dan tepat sasaran.

Tabel 2.5. Laporan Realisasi APBD Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan I 2024-2025 (c-to-c)

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2024			TA 2025			% Growth 2024-2025
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Daerah	45,136.90	9,459.99	20.96%	46,416.73	7,499.71	16.16%	-20.72%
Pendapatan Asli Daerah	9,342.77	1,587.28	16.99%	9,809.44	1,551.11	15.81%	-2.28%
Pajak daerah	6,765.01	1,278.48	18.90%	7,066.54	1,244.29	17.61%	-2.67%
Retribusi daerah	245.01	16.77	6.84%	643.90	46.37	7.20%	176.57%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	430.89	109.19	25.34%	418.65	10.00	2.39%	-90.84%
Lain-lain PAD yang sah	1,901.87	182.85	9.61%	1,680.35	250.45	14.90%	36.97%
Pendapatan Transfer	35,222.46	7,802.28	22.15%	36,449.18	5,931.59	16.27%	-23.98%
Transfer Pemerintah Pusat	32,686.04	7,332.73	22.43%	34,691.37	5,931.59	17.10%	-19.11%
Transfer Antar Daerah	2,536.41	469.55	18.51%	1,757.81	0.00	0.00%	-100.00%
Lain-lain Pendapatan yang sah	571.67	70.42	12.32%	158.10	17.02	10.77%	-75.83%
Pendapatan Hibah	67.01	3.37	5.03%	10.73	0.00	0.00%	-100.00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	504.66	67.05	13.29%	147.37	17.02	11.55%	-74.62%
Belanja Daerah	46,988.52	4,398.22	9.36%	48,229.95	5,042.00	10.45%	14.64%
Belanja Operasi	29,887.82	3,612.24	12.09%	32,036.89	4,339.71	13.55%	20.14%
Belanja Pegawai	15,514.85	2,354.03	15.17%	17,575.55	3,247.98	18.48%	37.98%
Belanja Barang dan Jasa	12,291.69	1,184.28	9.63%	12,941.89	983.06	7.60%	-16.99%
Belanja Bunga	36.46	6.04	16.56%	31.87	0.96	3.02%	-84.04%
Belanja Subsidi	17.07	0.30	1.76%	23.02	3.28	14.24%	993.08%
Belanja Hibah	1,962.11	66.59	3.39%	1,348.51	100.84	7.48%	51.43%
Belanja Bantuan sosial	65.62	1.00	1.52%	116.04	3.58	3.09%	258.34%
Belanja Modal	8,342.62	119.39	1.43%	7,843.45	239.69	3.06%	100.77%
Belanja Tidak Terduga	241.68	2.24	0.93%	378.60	37.56	9.92%	1576.10%
Belanja Transfer	8,516.40	664.36	7.80%	7,971.01	425.05	5.33%	-36.02%
Surplus/Defisit	-1,851.61	5,061.77	-273.37%	-1,813.22	2,457.71	-135.54%	-51.45%
Pembiayaan	1,338.73	1,647.11	123.03%	1,813.22	237.33	13.09%	-85.59%
Penerimaan Pembiayaan	1,649.35	1,709.18	103.63%	1,987.16	253.53	12.76%	-85.17%
Pengeluaran Pembiayaan	310.61	62.07	19.98%	173.94	16.21	9.32%	-73.89%
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		11,770.64			5,152.76		-56.22%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah di wilayah Sumsel berkontraksi di semua komponen. Hingga akhir Triwulan I 2025, realisasi pendapatan daerah di Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp7,49 triliun, atau 16,16% dari target pendapatan dalam APBD TA 2025. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, capaian ini mengalami penurunan sebesar Rp1,96 triliun, mencerminkan kontraksi tahunan (yoy) sebesar -20,72%. Penurunan ini bersifat menyeluruh, mencakup hampir seluruh jenis pendapatan daerah.

Grafik 2.22. Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi Per Jenis Pendapatan Daerah



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Kontraksi terbesar terjadi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang selama ini menjadi tulang punggung pendanaan daerah. Pada Triwulan I 2025, kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah mencapai 79,09%, namun nilainya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini erat kaitannya dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang mengatur ulang skema dan waktu penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), sehingga berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah menopang fiskal daerah disaat kebijakan efisiensi dan transisi peraturan baru. Hingga akhir Triwulan I 2025, realisasi PAD tercatat sebesar Rp9,54 triliun, atau mencapai 59,22% dari target tahunan. PAD memberikan kontribusi sebesar 20,68% terhadap total pendapatan daerah, menunjukkan peran strategisnya dalam menopang pembiayaan pembangunan daerah.

Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berkontraksi sebesar -2,67% (yoy) dan -90,84% (yoy). Meskipun kinerja Pajak Daerah mengalami kontraksi sebesar -2,67% (yoy), capaian ini tetap mencerminkan ketahanan fiskal daerah di tengah dinamika kebijakan dan transisi sistem perpajakan. Penurunan ini bersifat sementara dan lebih disebabkan oleh faktor teknis, seperti proses transisi pencatatan opsen pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MPLB). Beberapa pemerintah daerah di Sumsel telah mulai mengimplementasikan kebijakan ini, dan meskipun terdapat perlambatan dalam pencatatan awal, hal ini justru menjadi fondasi bagi sistem perpajakan daerah yang lebih transparan dan terintegrasi ke depan.

Selain itu, komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami perlambatan, utamanya disebabkan oleh belum terealisasinya dividen dari penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD, khususnya PT Bank Sumsel Babel. Namun demikian, potensi kontribusi dari sektor ini tetap besar, dan diharapkan akan terealisasi pada triwulan berikutnya seiring dengan siklus pembagian laba perusahaan.

Grafik 2.23. Pertumbuhan Realisasi Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

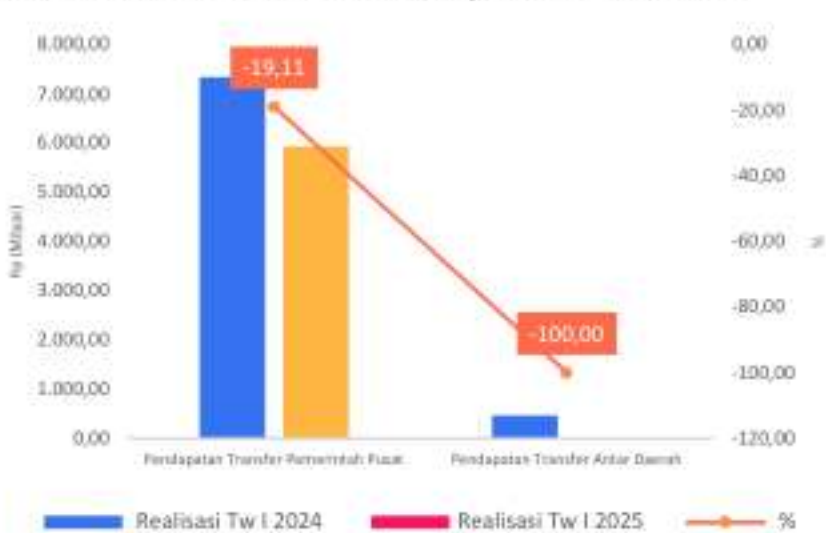


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Kinerja realisasi retribusi daerah dan lain-lain PAD yang Sah mengalami pertumbuhan sebesar 176,57% (yoy) dan 36,97% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan terjadi pada komponen retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Kedua komponen ini

mencatatkan pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan peningkatan efektivitas layanan publik yang diberikan oleh OPD dan BLUD. Peningkatan penerimaan dari sektor ini menjadi indikasi bahwa masyarakat semakin mengakses layanan pemerintah, dan pemerintah daerah berhasil mengelola layanan tersebut secara lebih profesional dan berbasis penerimaan.

Grafik 2.24. Pertumbuhan Realisasi Jenis Pendapatan dari Dana Transfer



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Pendapatan dari dana transfer mengalami perlambatan di triwulan I 2025. Realisasi pendapatan dari Dana Transfer sebesar Rp5,93 triliun atau 95,46% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 79,09% dari total realisasi pendapatan daerah di triwulan I 2025. Dari sisi pertumbuhan (yoy), pendapatan dari dana transfer mengalami kontraksi sebesar -23,98% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi fiskal nasional yang berdampak pada waktu penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan terdapat perbedaan pencatatan teknis, khususnya pada penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang langsung disalurkan ke rekening perangkat daerah (OPD) terkait, sehingga belum seluruhnya tercatat dalam sistem keuangan daerah pada periode pelaporan ini. Di sisi pendapatan dana transfer antar daerah, hingga triwulan I 2025 belum mencatatkan realisasi. Hal ini belum tentu mencerminkan ketiadaan aktivitas transfer antar pemerintah daerah. Ada indikasi, kondisi ini disebabkan oleh keterlambatan atau kekeliruan dalam pencatatan penerimaan, baik karena perbedaan waktu pengakuan transaksi antar daerah maupun karena belum optimalnya sistem pelaporan dan koordinasi antardaerah.

Tabel 2.6. Kondisi Kemandirian Fiskal Pemda di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2024

Pemerintah Daerah	IKF	Kategori
Provinsi Sumatera Selatan	0.47	Menuju Kemandirian
Kab. Musi Banyuasin	0.16	Belum Mandiri
Kab. Ogan Komering Ulu	0.10	Belum Mandiri
Kab. Muara Enim	0.06	Belum Mandiri
Kab. Lahat	0.05	Belum Mandiri
Kab. Musi Rawas	0.04	Belum Mandiri
Kab. Ogan Komering Ilir	0.10	Belum Mandiri
Kab. Banyuasin	0.17	Belum Mandiri
Kab. OKU Timur	0.03	Belum Mandiri
Kab. OKU Selatan	0.02	Belum Mandiri
Kab. Ogan Ilir	0.11	Belum Mandiri
Kab. Empat Lawang	0.02	Belum Mandiri
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0.09	Belum Mandiri
Kab. Musi Rawas Utara	0.04	Belum Mandiri
Kota Palembang	0.35	Menuju Kemandirian
Kota Prabumulih	0.15	Belum Mandiri

Pemerintah Daerah	IKF	Kategori
Kota Pagar Alam	0.05	Belum Mandiri
Kota Lubuk Linggau	0.17	Belum Mandiri

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Seluruh pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah di Sumsel masih didominasi oleh pendapatan dari dana transfer, yang menunjukkan kemandirian yang masih rendah. Hingga Maret 2024, dari 18 pemerintah daerah di Sumatera Selatan, 16 daerah masih berada dalam kategori “Belum Mandiri” berdasarkan indeks kemandirian fiskal. Hanya dua daerah yang masuk dalam kategori “Menuju Kemandirian”, yaitu: Pemerintah Kota Palembang, dengan indeks kemandirian fiskal sebesar 0,35, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan indeks sebesar 0,47.

Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja publik. Ketergantungan ini membuat fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan pusat.

Lain-lain pendapatan daerah terkontraksi di triwulan I 2025. Realisasi lain-lain pendapatan sebesar Rp17,02 miliar atau 11,55% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 0,23% dari total realisasi pendapatan daerah di triwulan I 2025. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi lain-lain pendapatan daerah terkontraksi -74,62% (yoy). Realisasi lain-lain pendapatan daerah di triwulan I 2025 terdapat pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah Sumsel tumbuh positif didorong kinerja realisasi semua jenis belanja ditengah kebijakan efisiensi. Hingga triwulan I 2025, kinerja belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang positif. Hingga akhir Maret 2025, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp5,04 triliun, atau 10,45% dari total pagu APBD Tahun Anggaran 2025. Secara tahunan (yoy), belanja daerah tumbuh sebesar 14,64%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan realisasi pada seluruh jenis belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Grafik 2.25. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Belanja Daerah



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Kinerja Belanja Operasi menjadi kontributor terbesar belanja daerah. Belanja operasi menjadi komponen dominan dalam struktur belanja daerah, dengan realisasi mencapai Rp4,34 triliun atau 13,55% dari pagu, dan berkontribusi sebesar 86,07% terhadap total belanja daerah. Jika dibandingkan dengan

periode yang sama tahun sebelumnya, belanja operasi tumbuh 20,14% (yoy).

Grafik 2.26. Pertumbuhan Realisasi Jenis Belanja Operasi



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Dilihat secara lebih rinci per jenis belanja operasi, hampir semua jenis belanja operasi mengalami pertumbuhan positif kecuali belanja barang dan jasa dan belanja bunga.

Belanja Pegawai mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 37,98% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp3,24 triliun atau 18,48% dari pagu. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan PNS Daerah, termasuk anggota dan pimpinan DPRD, serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025.

Belanja Barang dan Jasa mengalami kontraksi sebesar -16,99% (yoy), dengan realisasi sebesar Rp0,98 triliun atau 7,6% dari pagu. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi yang membatasi belanja perjalanan dinas, pemeliharaan, dan honorarium.

Belanja Bunga juga mengalami penurunan signifikan sebesar -41,53% (yoy), dengan realisasi sebesar Rp31,85 miliar atau 93,43% dari pagu. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pembayaran bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.

Belanja Subsidi tumbuh sangat tinggi sebesar 993,08% (yoy), dengan realisasi sebesar Rp3,28 miliar atau 14,24% dari pagu. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan alokasi subsidi pada awal tahun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Hibah hingga di triwulan I 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja Hibah juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,48% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp100,84 miliar atau 7,48% dari pagu. Peningkatan ini terutama berasal dari belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan.

Belanja Bantuan Sosial menunjukkan tren yang sangat positif, dengan pertumbuhan sebesar 258,34% (yoy). Realisasi mencapai Rp3,58 miliar atau 42,78% dari pagu, terindikasi meningkatnya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Selain belanja operasi, kinerja belanja modal terakselerasi di awal tahun. Belanja modal menunjukkan kinerja yang sangat positif, dengan realisasi sebesar Rp239,69 miliar atau 3,06% dari pagu. Secara tahunan, belanja modal tumbuh 100,77% (yoy). Pertumbuhan ini terutama dikontribusikan oleh belanja untuk alat rumah tangga dan perkantoran, serta belanja infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan.

Realisasi belanja tidak terduga mencapai Rp37,56 miliar atau 9,92% dari pagu, dengan pertumbuhan tahunan yang sangat tinggi sebesar 1576,10% (yoy). Peningkatan ini terjadi di beberapa daerah, seperti Kabupaten OKU, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Empat Lawang, yang menunjukkan respons cepat terhadap kebutuhan mendesak atau keadaan darurat.

Belanja transfer berkontraksi di triwulan I 2025. Realisasi belanja transfer sebesar Rp425,05 miliar atau 5,33% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja transfer berkontraksi sebesar -36,02% (yoy) dikontribusi oleh realisasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa oleh kabupaten.

2.2.3 Surplus/Defisit APBD

APBD Sumsel mencatatkan surplus di triwulan I 2025. Realisasi APBD Sumsel tercatat surplus sebesar Rp 2,45 triliun atau kontraksi -51,45% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Surplus ini mencerminkan pengendalian belanja yang relatif efektif di tengah kebijakan efisiensi dan transisi pemerintahan, serta menunjukkan upaya menjaga stabilitas fiskal. Namun demikian, kontraksi surplus juga mengindikasikan adanya tekanan pada sisi pendapatan, khususnya dari transfer pusat, sehingga ke depan diperlukan optimalisasi pendapatan dan percepatan belanja produktif agar keseimbangan fiskal tetap terjaga secara berkelanjutan.

2.2.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi pembiayaan daerah mengalami pertumbuhan di tahun 2025. Realisasi pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp237,33 miliar atau 13,09 % dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pembiayaan daerah kontraksi sebesar -85,59% (yoy) dikontribusikan dari penurunan penerimaan pembiayaan dan penurunan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terealisasi Rp253,52 miliar atau berkontraksi -85,17% (yoy) yang utamanya dikontribusikan dari penggunaan SILPA tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tercatat Rp16,21 miliar atau turun-73,89% (yoy) yang dikontribusi oleh pembayaran pokok pinjaman dalam negeri.

2.2.5 Proyeksi APBD

Pada Triwulan II Tahun 2025, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 27,72% dari target. Capaian ini masih tergolong rendah untuk pertengahan tahun anggaran. Meskipun demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer menunjukkan kinerja yang relatif baik, masing-masing diproyeksikan mencapai 42,74% dan 41,00%. Untuk lain-lain pendapatan daerah diproyeksikan terealisasi sebesar 45,00%.

Di sisi belanja, realisasi hingga akhir Triwulan II diproyeksikan baru akan mencapai 35%, yang menunjukkan perlunya percepatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Operasi dan Belanja Modal masing-masing terealisasi sebesar 34% dan 32%, sedangkan Belanja Tidak Terduga masih rendah di angka 12%. Dari sisi pembiayaan, penerimaan telah mencapai 92% dari target, menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup mengandalkan pembiayaan untuk menutup kebutuhan fiskal jika pendapatan daerah masih menunjukkan perlambatan.

Secara umum, kinerja anggaran pada Triwulan II masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal optimalisasi belanja agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Tabel 2.7. Proyeksi Realisasi APBD Sumsel Tahun 2025

I-Account	%Q1 (Real)	%Q2 (Proy)	%Q3 (Proy)	%Q4 (Proy)
Pendapatan Daerah	16.16%	27.72%	69.40%	94.40%
Pendapatan Asli Daerah	15.81%	42.74%	66.2%	89.63%
Pendapatan dari Dana Transfer	16.27%	41,00%	63.1%	85.59%
Lain-Lain Pendapatan Daerah	10.77%	45,00%	61,00%	85.17%
Belanja Daerah	10.45%	35%	58%	81.92%
Belanja Operasi	13.55%	34%	56.0%	77.4%
Belanja Modal	3.06%	32%	61.4%	90.6%
Belanja Tidak Terduga	9.92%	12%	11.9%	12.3%
Belanja Transfer	5.33%	40%	67.4%	94.7%
Surplus/(Defisit)	-135.54%	218%	-223%	-238%
Pembiayaan Daerah	13.09%	103%	132%	161%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	12.76%	92%	115.0%	138.0%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.32%	26%	61.7%	97.6%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. LRA Pemerintah Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dilakukan eliminasi akun-akun resiprokal. Dalam hal ini eliminasi dilakukan terhadap belanja tranfer ke daerah dari sisi LRA pemerintah pusat di eliminasi dengan pendapatan transfer dari sisi LRA pemerintah daerah.

2.3.1 Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan konsolidasian wilayah Sumsel sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 mencapai Rp5,28 triliun atau berkontraksi sebesar 4,38% (yoy). Pendapatan Konsolidasian masih didominasi Pendapatan Pemerintah Pusat sebesar Rp3,57 triliun atau 67,62% dari total pendapatan konsolidasian. Pada aspek pendapatan yang bersumber dari perpajakan, Pemerintah Pusat masih mendominasi dengan porsi 69,77% dari total pendapatan perpajakan konsolidasian. Penurunan Pendapatan konsolidasian s.d. Triwulan I Tahun 2025 tersebut mayoritas terdapat pada penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian yang turun hingga 37,04% yoy. Angka PNBPN pada pemerintah daerah dan Belanja Transfer pada pemerintah pusat merupakan angka setelah dilakukan eliminasi akun resiprokal antara pendapatan transfer pemda dan belanja transfer pempus. Hal ini mengindikasikan peran dana transfer sangat mendominasi sebagai sumber pendapatan daerah di Sumsel. Sementara itu, di sisi Pendapatan hibah konsolidasi menunjukkan kontraksi sebesar -100% (yoy) dibandingkan pendapatan hibah pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp41,32 juta rupiah

2.3.2 Belanja Konsolidasian

Belanja konsolidasian wilayah Sumsel hingga Triwulan I tahun 2025 sebesar 9,56 triliun dan tumbuh positif 12,38% (yoy). Dari sisi belanja, kontribusi dari belanja pemerintah daerah lebih dominan dibandingkan pemerintah pusat hingga periode triwulan I 2025. Pemerintah pusat berkontribusi sebesar 46,33%, sementara pemerintah daerah berkontribusi sebesar 53,67%. Dari sisi belanja pemerintah dan transfer, peran pemerintah daerah mampu memberikan kontribusi sebesar 65,11% dan 17,77% dalam menggerakkan aktivitas perekonomian melalui kebijakan fiskal di Sumsel. Belanja pegawai masih mendominasi belanja di Triwulan I tahun 2025 dengan proporsi sebesar 51,16% dari keseluruhan belanja pemerintah konsolidasian.

2.3.3 Surplus/Defisit

Hingga triwulan I tahun 2025, defisit konsolidasian sebesar Rp4,28 triliun terkontraksi -43,38% (yoy). Defisit didominasi oleh kontribusi pemerintah pusat yang mencapai 155,02%. Hal tersebut didorong oleh tingginya belanja pemerintah baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah s.d triwulan I 2025.

2.3.4 Pembiayaan Konsolidasian

Pembiayaan konsolidasian di wilayah Sumsel sebesar Rp0,24 triliun, terkontraksi -26,70% (yoy). Realisasi penerimaan pembiayaan Rp2,34 triliun atau terkontraksi hingga -97,15% (yoy) dan pengeluaran pembiayaan Rp0,25 triliun atau terkontraksi sebesar -96,96% (yoy). Pembiayaan konsolidasian seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah yang berasal dari penggunaan SilPA di sisi penerimaan dan pembayaran pokok utang di sisi pengeluaran.

Tabel 2.8. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Sumsel s.d. Triwulan I 2024-2025 (c-to-c)

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	2024 Konsolidasian	2025					Growth 2024-2025
		Konsolidasian	Pusat	Daerah	Kontribusi		
					Pusat	Daerah	
A. PENDAPATAN	5,520.05	5,278.31	3,569.30	1,709.01	67,62%	32,38%	-4,38%
I. Perpajakan	3,674.81	4,116.49	2,872.20	1,244.29	69,77%	30,23%	12,02%
II. PNPB	1,845.20	1,161.82	0,697.09	0,464.73	60,00%	40,00%	-37,04%
III. Hibah	0.0004	0.00	0.00	0.00			-100,00%
B. BELANJA	8,505.23	9,558.49	4,428.52	5,129.97	46,33%	53,67%	12,38%
I. Belanja Pemerintah	6,653.93	7,248.27	2,528.77	4,719.50	34,89%	65,11%	8,93%
II. Transfer	1,851.30	2,310.22	1,899.75	0,410.47	82,23%	17,77%	24,79%
C. SURPLUS/DEFISIT	-2,985.18	-4,280.18	-6,635.34	2,355.16	155,02%	-55,02%	43,38%
D. PEMBIAYAAN	8,327.88	0,237.33	0.00	0,237.33	0,00%	100,00%	-97,15%
I. Penerimaan	8,343.25	0,253.53	0.00	0,253.53	0,00%	100,00%	-96,96%
II. Pengeluaran	0,015.37	0,016.20	0.00	0,016.20	0,00%	100,00%	5,40%
E. SILPA (SIKPA)	5,342.70	-4,042.86	-6,635.34	2,592.49	164,13%	-64,13%	-175,67%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

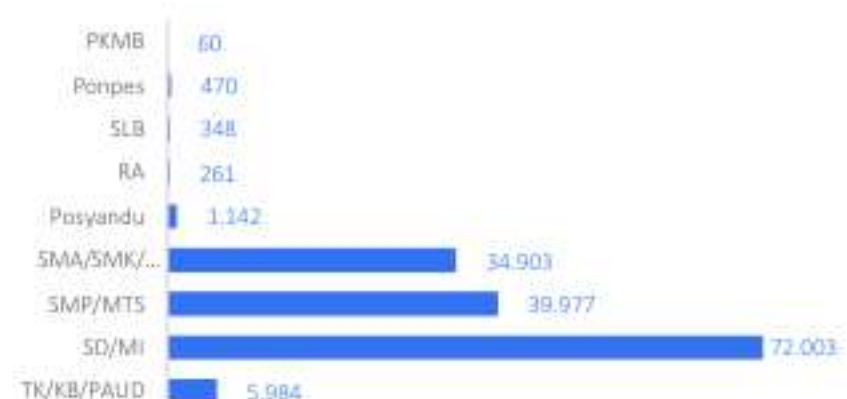
2.4 Perkembangan Pelaksanaan Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yang mempunyai tujuan menyediakan akses terhadap makanan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan kualitas SDM, serta mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Program ini utamanya dilatarbelakangi oleh permasalahan gizi buruk dan prevalensi stunting yang masih tinggi karena tingkat kemiskinan yang tinggi. Kurangnya daya beli masyarakat miskin menyebabkan ketidakmampuan mengakses makanan dengan gizi seimbang sehingga program ini menjadi salah satu strategi memotong rantai kemiskinan melalui perbaikan gizi anak, khususnya dari keluarga miskin dan rentan, dengan harapan akan tumbuh generasi yang sehat dan cerdas, seiring dengan akses pendidikan yang memadai.

Implementasi Program MBG secara nasional dimulai pada 6 Januari 2025 yang dilaksanakan bertahap sesuai dengan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku unit

pengelola dan pelaksana program MBG di lapangan. Program MBG di wilayah Provinsi Sumatera Selatan juga dimulai sejak 6 Januari 2025, dan sampai dengan 31 Maret 2025 sudah terdapat 50 SPPG yang beroperasi dengan total penerima sejumlah 152.148 orang. Meskipun terlalu dini untuk mengukur dampak program MBG ini, namun dari beberapa indikator dapat dilihat indikasi awalnya yang selanjutnya dapat dilakukan analisis lebih jauh seiring dengan ketersediaan datanya.

Grafik 2.27. Jumlah Penerima MBG Berdasarkan Kelompok Sasaran Data s.d. 31 Maret 2025



Indikasi Awal Dampak Program MBG

Dalam lima tahun terakhir, angka stunting di Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 angka stunting Provinsi Sumatera Selatan dapat ditekan menjadi 18,6%, di bawah rata-rata nasional, sehingga menjadikan Sumsel sebagai salah satu provinsi dengan penurunan stunting tertinggi di Indonesia. Namun pada tahun 2023, angka stunting Sumsel naik menjadi 20,3%. Untuk tahun 2024 belum terdapat publikasi resmi hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan, namun berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, realisasinya sudah melampaui target, yaitu berhasil menekan angka stunting jauh di bawah target 14%. Dengan program MBG ini diharapkan angka stunting secara nasional dapat mencapai target penurunan stunting sebesar 18% pada tahun 2025.

Selain dapat menurunkan prevalensi stunting, implementasi MBG berpotensi meningkatkan produktivitas daerah melalui pemberdayaan lahan, petani, peternak, nelayan, dan UMKM serta menyerap tenaga kerja di daerah. Implementasi program MBG akan meningkatkan permintaan terhadap bahan pangan seperti beras, daging ayam, telur, sayur, dan buah. Peningkatan permintaan ini selain dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, dapat juga menyebabkan inflasi/tekanan pada harga bahan makanan jika tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai.

Berdasarkan data BPS, inflasi Sumsel pada Januari 2025 berada di angka 0,92% (yoy) dengan andil terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selanjutnya pada Februari 2025 inflasi Sumsel tercatat di angka 0,49% (yoy) dengan andil terbesar dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (emas perhiasan). Demikian juga yang terjadi pada bulan Maret 2025, angka inflasi Sumsel tercatat 1,77% (yoy). Bahan makanan yang termasuk dalam komoditas utama

penyumbang inflasi di Sumsel pada triwulan I tahun 2025 adalah cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Dari data tersebut, beras sebagai bahan pangan utama masih terjaga, baik harga maupun pasokannya, karena Sumsel masih merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

Peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan MBG berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumsel dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini. NTP merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani. Nilai yang semakin tinggi semakin mencerminkan tingkat kesejahteraan petani yang membaik. Meningkatnya NTP mencerminkan adanya peningkatan daya beli petani yang diperoleh dari kenaikan harga hasil produksi pertanian, utamanya pada beberapa komoditas utama. Pada Maret 2025, NTP Sumsel mencapai 132,94, didorong oleh penyesuaian harga gabah sebesar Rp6.500,00 per kilogram. Indeks harga yang diterima petani 166,69 (naik 2,88%) lebih tinggi dari indeks harga yang dibayar petani yaitu 125,39 (naik 1,62%). Kenaikan NTP bulan Maret 2025 ditopang oleh tiga subsektor yaitu Tanaman Pangan yang naik signifikan sebesar 3,66% dengan gabah sebagai komoditas penyumbang andil NTP terbesar, Perkebunan Rakyat yang naik 0,94% dan Peternakan naik 0,82%.

Pada triwulan I tahun 2025, NTP Tanaman Pangan selalu mengalami peningkatan bahkan pada Maret 2025 mencapai di atas 100 yang berarti bahwa petani tanaman pangan mengalami surplus karena harga hasil produksinya lebih tinggi dibanding pengeluarannya. NTPP tersebut merupakan peningkatan yang tertinggi dibandingkan bulan sebelumnya yaitu meningkat 3,66%.

Tabel 2.9 Data NTP per subsektor triwulan I tahun 2025

NTP Subsektor	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025
Tanaman Pangan (NTPP)	97,23	97,25	100,8
Hortikultura (NTPH)	96,37	97,66	91,84
Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)	142,27	145,37	146,74
Peternakan (NTPT)	100,58	100,28	101,1
Perikanan (NTNP)	107,91	108,21	106,97
1. Nelayan (NTN)	117,42	117,8	116,5
2. Pembudidaya Ikan (NTPi)	95,43	96,57	94,54
NTP	129,11	131,32	132,94

Terdapat berbagai studi yang membuktikan bahwa MBG dapat memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku UMKM. Salah satu studi oleh United Nation World Food Program (2023) menunjukkan bahwa pelibatan UMKM lokal dalam penyediaan makanan bergizi gratis ini berhasil meningkatkan produksi dan membuka lapangan kerja baru.

Langkah-langkah pemberdayaan dalam implementasi program MBG selain akan berdampak pada ketahanan pangan, juga akan meningkatkan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Sumsel pada triwulan I tahun 2025 tercatat 5,22%, tertinggi kedua di Sumatera dan melampaui

pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 4,87%. Struktur PDRB Sumatera Selatan masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 23,34%, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 18,52%, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,24%. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Selatan mencapai 56,10%. Berdasarkan kalkulasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF, 2024) dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, dampak MBG terhadap PDRB Nasional di wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 0,0068%.

Isu-Isu Dalam Implementasi Program MBG

Terlepas dari banyaknya kajian terkait dampak positif MBG pada berbagai aspek, baik pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, implementasi MBG di Indonesia pada umumnya dan secara khusus di Sumatera Selatan masih menghadapi berbagai tantangan.

Belum optimalnya kesiapan SPPG membuat beberapa SPPG belum operasional, selain belum terdapatnya unit pendukung/satuan kerja sebagai instansi vertikal Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga dari sisi administrasi masih belum memadai untuk mendukung penuh program MBG di daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan yang pembiayaannya melalui APBN. Dari sisi pelaksanaan pembayaran yang menggunakan sistem reimbursement, masih menimbulkan masalah lambatnya pembayaran kepada pihak ketiga/pelaksana/penyedia jasa. Selain itu pelaksanaan pembayaran tagihan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran pelaksanaan APBN, terutama terkait pembagian tugas, wewenang, dan otorisasi pengajuan dan pengesahan tagihan kepada negara oleh pihak yang berhak menerima pembayaran.

Pelaksanaan penyediaan MBG di Sumsel masih dilaksanakan secara swakelola oleh Pihak SPPG, dengan mitra utama yaitu Yayasan yang mengkoordinir para mitra penyedia barang dan jasa untuk pelaksanaan program MBG. Pelaksanaan Penyediaan MBG (dalam volume besar) oleh SPPG secara swakelola tersebut tidak efisien baik dari sisi rantai pasokan

pengadaan barang dan jasa maupun dari sisi efektifitas dan efisiensi pembayaran tagihan kepada negara. Karena dalam konteks MBG ini Pihak SPPG meskipun sudah terikat PKS dengan pihak Yayasan sebagai PIC pelaksanaan penyediaan (dan terdaftar sebagai supplier), berdasarkan informasi dari Koordinator SPPG Sumsel masih harus bertanggung jawab atas kepastian terpenuhinya pembayaran tagihan kepada negara yang menjadi hak para mitra penyedia yang dinaungi oleh Yayasan. (terdapat kerancuan definisi antara Mitra Penyedia, dan status Penyedia Barang dan Jasa)

Rekomendasi

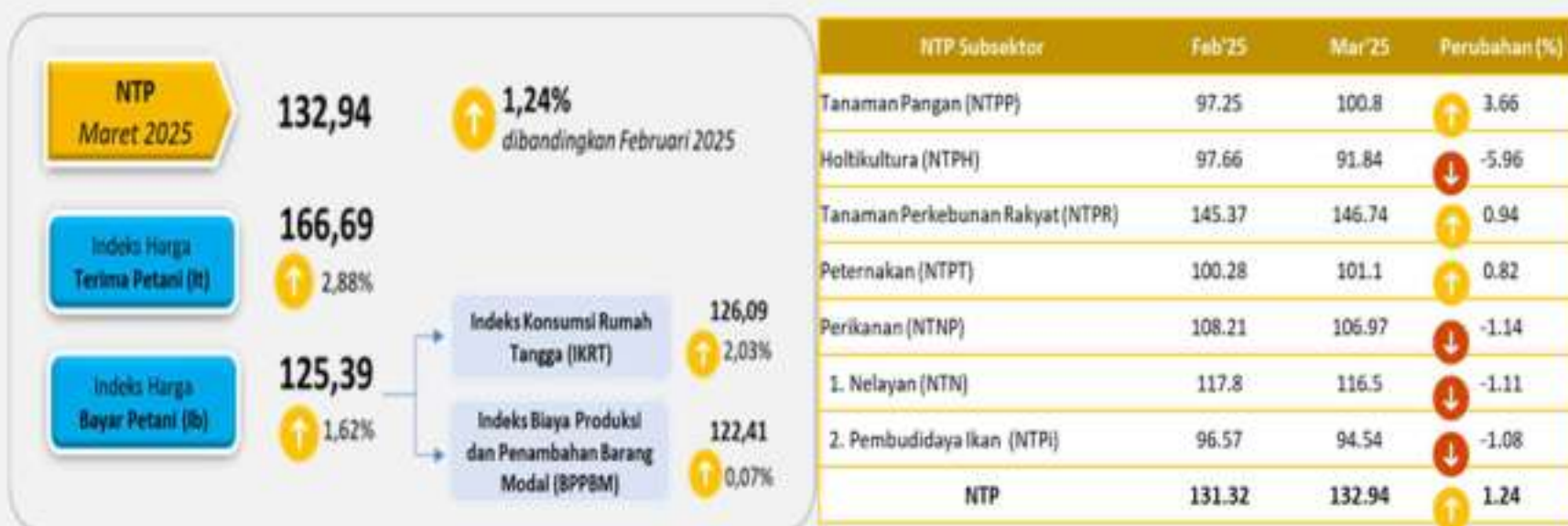
Selain permasalahan tersebut diatas, termasuk berbagai laporan kasus keracunan makanan, dan berbagai penipuan yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan implementasi MBG selanjutnya. Dibutuhkan penguatan struktur organisasi pelaksana MBG di daerah yang didukung kapasitas administrasi dan birokrasi yang baik (*good governance*), termasuk dukungan teknologi dan informasi yang terintegrasi dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Selain itu dibutuhkan peninjauan kembali mekanisme pengadaan dalam program MBG agar penerima hak pembayaran atas pelaksanaan kegiatan ini dapat segera mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Referensi:

Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis. INDEF. Oktober 2024. (<https://indef.or.id/wp-content/uploads/2024/11/Final-Report-Efek-Pengganda-Program-MBG.pdf>)

Boks 2 Perkembangan Nilai Tukar Petani Sumsel

Perkembangan Nilai Tukar Petani 2023-2025



Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera Selatan pada Maret 2025 menunjukkan tren positif yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani. NTP tercatat mencapai angka 132,94, yang mengindikasikan bahwa daya beli petani mengalami perbaikan. Peningkatan ini didorong oleh naiknya harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, yang secara langsung meningkatkan pendapatan petani. Kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 2,88% melampaui kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 1,62%, sehingga memperkuat posisi ekonomi petani. Peningkatan ini utamanya ditopang oleh subsektor tanaman pangan (naik 3,66%), perkebunan rakyat (naik 0,94%), dan peternakan (naik 0,82%).

Kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan kebijakan sektor pertanian daerah dalam menjaga stabilitas harga input dan meningkatkan nilai jual komoditas petani. Dengan NTP yang terus meningkat, hal ini menjadi sinyal positif terhadap keberlanjutan usaha tani dan meningkatnya kesejahteraan rumah tangga petani. Namun demikian, peningkatan ini tetap membutuhkan penguatan dari sisi kebijakan swasembada pangan, peningkatan akses pasar, serta dukungan terhadap diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian. Upaya strategis ini diperlukan agar kesejahteraan petani tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Sumatera Selatan.



Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, tingkat pertumbuhan koperasi di wilayah Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik terbukti dengan terjadinya peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 3%, peningkatan jumlah tenaga kerja sebanyak 2% setiap tahun, serta peningkatan jumlah aset usaha pada koperasi di wilayah Sumatera Selatan.

- Pada Tahun 2023 jumlah koperasi aktif yang ada di wilayah Sumatera Selatan meningkat dari tahun 2022 sebesar 2% atau sebanyak 138 Koperasi dengan kelompok koperasi terbanyak ada di kelompok Koperasi Serba Usaha sebanyak 765 Koperasi. Kelompok koperasi usaha masih dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjangkau ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari karena harga-harga yang ditawarkan oleh koperasi usaha sangat terjangkau bagi masyarakat kalangan menengah kebawah.
- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja pada tahun 2023 sebesar 3% atau sebanyak 109.955 orang serta penurunan jumlah pengangguran di wilayah Sumatera Selatan, salah satu faktor pendorongnya adalah penyerapan tenaga kerja pada sektor koperasi di Sumatera Selatan, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 16.242 orang pada tahun 2023.
- Perlu diversifikasi jenis usaha koperasi di Sumatera Selatan agak dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Selain itu kerja sama para pemangku kepentingan juga perlu ditingkatkan, termasuk melalui pembinaan/pendampingan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi.

3.1 Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Definisi tersebut mengandung makna bahwa koperasi bukan hanya entitas bisnis, melainkan juga sarana pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat ketahanan ekonomi dari tingkat lokal hingga nasional secara berkelanjutan.

Isu pengembangan koperasi menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Koperasi memiliki peran strategis sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mendorong pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing UMKM. Tantangan pembangunan di era desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengembangkan koperasi secara adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pengembangan koperasi yang efektif dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Untuk mendukung pengembangan koperasi di daerah, telah tersedia berbagai kebijakan dan regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan pengembangan koperasi sebagai urusan pemerintahan konkuren. Namun, implementasi strategi pengembangan koperasi seringkali terkendala oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi manajerial, dan akses yang tidak merata terhadap pasar dan permodalan.

Dalam rangka mengetahui efektivitas peran koperasi dan mengevaluasi strategi pengembangannya di tingkat daerah, diperlukan suatu pendekatan analisis yang sistematis dan berbasis data. Kajian ini bertujuan untuk menilai capaian peran koperasi dalam pembangunan ekonomi lokal, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pengembangan koperasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah. Hasil analisis diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan kontekstual sesuai karakteristik wilayah.

3.2 Analisis Tematik

3.2.1 Perkembangan Koperasi di Sumatera Selatan

3.2.1.1 Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan sumber resmi Kemenkop dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, sektor koperasi di Sumsel menunjukkan tren meningkat secara keseluruhan. Jumlah koperasi aktif di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tercatat 4.257 unit pada tahun 2023, naik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

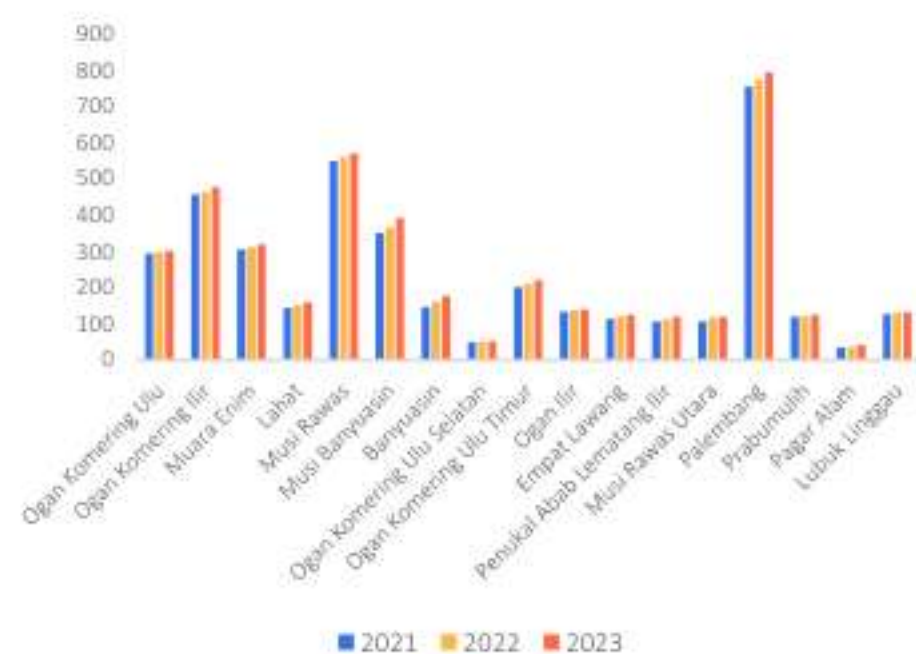
Tabel 3.1 Jumlah Koperasi Aktif Per Kab/Kota

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Ogan Komering Ulu	294	298	301
2	Ogan Komering Ilir	457	463	477
3	Muara Enim	304	311	319
4	Lahat	144	151	158
5	Musi Rawas	549	561	570
6	Musi Banyuasin	350	366	392
7	Banyuasin	146	159	176
8	Ogan Komering Ulu Selatan	49	52	52
9	Ogan Komering Ulu Timur	200	210	220
10	Ogan Ilir	133	137	139
11	Empat Lawang	114	121	125
12	Penukal Abab Lematang Ilir	106	112	119
13	Musi Rawas Utara	105	116	119
14	Palembang	755	774	794
15	Prabumulih	119	121	124
16	Pagar Alam	34	37	41
17	Lubuk Linggau	126	130	131
Total		3.985	4.119	4.257

Sumber: <https://diskopukm.sumselprov.go.id/infoKo> (diolah)

Jumlah koperasi aktif di Sumsel tercatat 3.985 unit pada 2021 dan meningkat menjadi 4.119 unit pada 2022 selanjutnya kembali meningkat menjadi 4.257 unit pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan data jumlah koperasi yang terdaftar pada Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 7.055 koperasi, menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif adalah 60,34% dari total koperasi yang terdaftar. Walaupun dari tahun 2021-2023 terlihat tren peningkatan jumlah koperasi di Sumatera Selatan, kenyataan bahwa jumlah koperasi tidak aktif hampir mencapai 40% dari jumlah koperasi yang terdaftar tentunya perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas gerakan koperasi di Sumsel.

Grafik 3.1 Jumlah Koperasi Aktif Per Kab/Kota



Sumber: <https://diskopukm.sumselprov.go.id/infoKo> (diolah)

3.2.1.2 Jumlah Anggota Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah anggota koperasi terjadi tren meningkat secara keseluruhan. Jumlah anggota koperasi di Sumatera Selatan tercatat sebanyak 266.328 Anggota. Hal ini menjadikan koperasi sebagai salah satu wadah ekonomi kerakyatan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas, namun kontribusi koperasi terhadap penyerapan tenaga kerja formal masih relatif terbatas.

Grafik 3.2 Jumlah Anggota Koperasi Sumatera Selatan



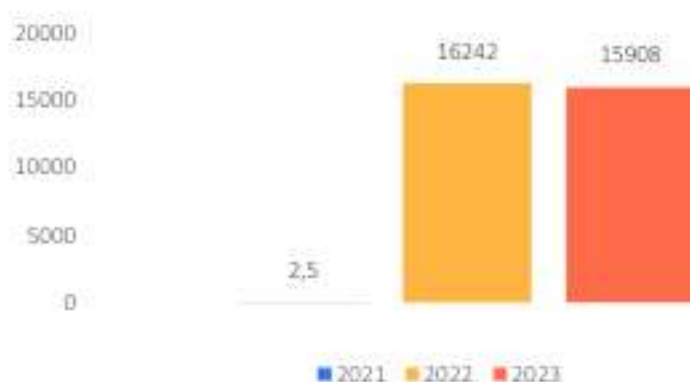
Sumber: <https://diskopukm.sumselprov.go.id/infoKo> (diolah)

Periode 2021–2023 menunjukkan fluktuasi jumlah anggota koperasi di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut data Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan, jumlah anggota koperasi di Sumsel tercatat sebanyak 263.632 anggota pada 2021 dan meningkat menjadi 282.060 anggota pada 2022, namun terjadi penurunan pada tahun 2023 sebanyak 15.732 anggota atau sebanyak 5,58% sehingga jumlah anggota akhir tahun 2023 sebanyak 266.328 anggota.

3.2.1.3 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Jumlah penyerapan tenaga kerja menunjukkan tren yang menurun. Jumlah penyerapan tenaga kerja koperasi di Sumatera Selatan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 15.908 orang karena mayoritas merupakan koperasi simpan pinjam (*credit union*) yang skala usahanya kecil dan tidak menyerap banyak karyawan. Koperasi jenis ini lebih berfokus pada pelayanan keuangan anggota daripada ekspansi usaha yang mempekerjakan pegawai dalam jumlah besar sehingga menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja.

Grafik 3.3 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi Sumatera Selatan



Sumber: <https://diskopukm.sumselprov.go.id/infoKo> (diolah)

Pada tahun 2021 tidak terdapat penyerapan tenaga kerja pada koperasi dikarenakan pada tahun tersebut telah terjadi wabah Covid-19 sehingga kebanyakan koperasi membatasi kegiatan usahanya sehingga mereka tidak melakukan penyerapan

3.2.1.4 Jumlah Usaha

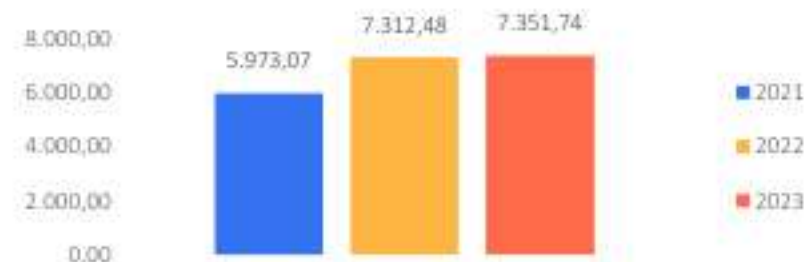
Berdasarkan Sumber Resmi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Jumlah unit usaha yang dikelola koperasi (misalnya unit simpan-pinjam, unit konsumsi, dsb.) juga meningkat. Setiap tahun tercatat penambahan unit-unit usaha koperasi baru. Meskipun data terperinci belum dipublikasikan, sejalan dengan bertambahnya koperasi, total unit usaha diperkirakan naik sekitar dua puluh samapi tigapuluh persen selama 2021–2023. Hal ini menunjukkan

tenaga kerja. Pada tahun 2022 koperasi di wilayah Sumatera Selatan menyerap tenaga kerja sebanyak 16.242, sedangkan untuk tahun 2023 banyak koperasi mulai melakukan perekrutan tenaga kerja baru sebanyak 15.242 orang. Penyerapan tersebut menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil setelah tahun 2021. Tren ini konsisten dengan laporan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel yang menyatakan peningkatan pelaku usaha kecil, sehingga koperasi pun turut menyerap lebih banyak pekerja setiap tahun.

3.2.1.5 Jumlah Aset Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan sumber resmi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, jumlah aset koperasi di Sumsel menunjukkan tren meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah koperasi aktif yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Jumlah aset aktif secara keseluruhan di Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp7,35 triliun pada tahun 2023 meningkat 0,05% dibanding tahun 2022.

Grafik 3.4 Jumlah Aset Koperasi di Sumatera Selatan (dalam miliar)



Sumber: <https://diskopukm.sumselprov.go.id/infoKo> (diolah)

Tabel 3.2 Jumlah Aset Koperasi Aktif Per Kab/Kota (dalam miliar)

No	Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023
1	Ogan Komering Ulu	3,91	36,76	36,30
2	Ogan Komering Ilir	670,34	1.012,73	1.074,96
3	Muara Enim	132,56	233,94	153,99
4	Lahat	25,38	72,65	64,83
5	Musi Rawas	278,92	298,43	286,14
6	Musi Banyuasin	42,21	125,93	184,02
7	Banyuasin	58,70	427,03	304,87
8	Ogan Ilir	7,66	13,27	18,04
9	Ogan Komering Ulu Timur	407,13	448,51	459,60
10	Ogan Komering Ulu Selatan	0,98	5,88	6,70
11	Empat Lawang	0,04	0,74	0,51
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1,88	6,14	6,07
13	Musi Rawas Utara	4,11	8,38	11,91
14	Palembang	276,16	542,92	664,92
15	Prabumulih	4.039,30	4.045,85	4.045,63
16	Pagar Alam	11,50	16,06	15,92
17	Lubuk Linggau	12,28	17,26	17,34
Total		5.973,07	7.312,48	7.351,74

perluasan kegiatan ekonomi koperasi di Sumsel (misalnya koperasi pembiayaan pertanian, simpan-pinjam mikro, dll.). Tren semua indikator sektor koperasi Sumatera Selatan (jumlah koperasi, anggota, penyerapan tenaga kerja, aset, dan unit usaha) naik dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini selaras dengan kebijakan penguatan koperasi nasional yang didukung data tunggal (PL-KUMKM dan program pembinaan koperasi di tingkat daerah. Perbandingan dengan provinsi lain menunjukkan Sumsel berada di posisi menengah, masih di

bawah provinsi padat koperasi seperti Jawa Barat namun performa pertumbuhannya solid.

3.2.2 Dukungan Pemerintah untuk Pengembangan Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan

3.2.2.1 Kebijakan Pemerintah terkait Pengembangan Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah menempatkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, diatur dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada level nasional, arah kebijakan terkini mencakup modernisasi koperasi dan peningkatan skala usaha. Misalnya, melalui regulasi sektoral, pemerintah mendorong koperasi agar dapat masuk ke berbagai bidang usaha besar yang sebelumnya jarang digeluti koperasi. Presiden RI menugaskan Kemenkop UKM untuk meningkatkan peran koperasi di sektor pertambangan, pertanian, dan sektor besar lainnya, tidak lagi terbatas pada usaha kecil. Ini berarti koperasi didorong bertransformasi agar mampu melakukan usaha pada jasa pertambangan, dll. Selanjutnya terdapat pembaruan regulasi di sektor keuangan melalui UU P2SK 2023 yang memasukkan pengawasan koperasi simpan pinjam ke OJK sebagai upaya memperkuat tata kelola dan melindungi anggota koperasi. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sumsel sejalan dengan pusat terus melakukan pembinaan dan pemberdayaan koperasi melalui dinas terkait. Visi Gubernur Sumsel menempatkan koperasi sebagai sokoguru ekonomi, dan program-program daerah diarahkan untuk memberdayakan koperasi yang aktif menjalankan usaha dan menyejahterakan anggotanya.

3.2.2.3 Perkembangan Dukungan Belanja Kementerian/ Lembaga untuk Pengembangan Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan koperasi. Pagu anggaran KemenkopUKM pada tahun 2023 ditetapkan sekitar Rp1,5 triliun dan menjadi Rp3 triliun pada 2024 untuk mendukung program prioritas koperasi dan UMKM. Dukungan anggaran ini mencakup berbagai kegiatan, antara lain: pelatihan manajemen dan peningkatan kapasitas koperasi, bantuan permodalan bergulir melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), fasilitasi legalitas dan sertifikasi koperasi, serta program pendukung seperti Rumah Produksi Bersama, Rumah Kemasan, dan revitalisasi pasar rakyat yang melibatkan koperasi sebagai pelaksana. Realisasi anggaran Kemenkop UKM cukup tinggi (tahun 2022 mencapai 94,17%) yang menunjukkan program-program koperasi telah dijalankan secara aktif. Bagi Sumatera Selatan, dukungan K/L tersebut hadir misalnya dalam bentuk program nasional yang diimplementasikan di daerah, seperti pelatihan perkoperasian kolaborasi Kemenkop dengan dinas, program pendataan lengkap KUMKM tahun 2022 untuk memetakan koperasi/UMKM, serta penyaluran pembiayaan LPDB kepada koperasi berpotensi di Sumsel (beberapa koperasi di Sumsel diketahui mendapat pinjaman LPDB untuk permodalan, meski data spesifiknya perlu diperoleh dari laporan Kemenkop).

3.2.2.4 Perkembangan Dukungan Belanja TKD untuk Pengembangan Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan

Sejak 2022, pemerintah pusat juga memperkenalkan DAK Non Fisik berupa Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (PK2UMKM) yang disalurkan ke pemerintah daerah. Dana dekonsentrasi ini bertujuan membiayai kegiatan peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, dan penyuluhan bagi koperasi dan pelaku UMKM di daerah. Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten/kota di dalamnya memperoleh alokasi DAK Non Fisik PK2UMKM sesuai usulan program masing-masing. Melalui dana ini Dinas Koperasi dapat menyelenggarakan pelatihan manajemen koperasi, bimbingan teknis akuntansi koperasi, hingga pendampingan koperasi dalam pemanfaatan teknologi. Meskipun besaran alokasi per daerah bervariasi, secara nasional DAK PK2UMKM menjadi sumber penting bagi daerah untuk menjalankan kegiatan pembinaan tanpa membebani APBD. Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan menyalurkan dan mengawasi penggunaan dana ini agar sesuai peruntukannya. Perkembangan hingga 2024 menunjukkan pemanfaatan DAK PK2UMKM di Sumsel cukup optimal, contohnya beberapa kabupaten seperti Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin telah mengadakan pelatihan perkoperasian dengan dana tersebut. Program ini diharapkan berlanjut dan meningkat sehingga kapasitas kelembagaan koperasi di pelosok Sumsel dapat terangkat.

3.2.2.5 Perkembangan Dukungan Belanja APBD di Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah daerah Sumsel, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, turut mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk pengembangan koperasi. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan memiliki program rutin tiap tahun yang dibiayai APBD, misalnya program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, serta fasilitasi pemasaran dan kemitraan. Pada tahun 2023, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel telah melaksanakan advokasi digitalisasi koperasi bagi para pengurus dan pendamping koperasi (output: 40 orang pembina koperasi terlatih dan 36 koperasi mendapat pendampingan digital). Kegiatan ini menunjukkan salah satu komitmen APBD dalam mendorong koperasi melek teknologi demi meningkatkan daya saing. Selain itu, beberapa kabupaten/kota juga memiliki alokasi anggaran untuk koperasi melalui Dinas Koperasi setempat, misalnya Kota Palembang menganggarkan bantuan penguatan modal bagi koperasi berprestasi dan Kabupaten Lahat menjalankan program pembentukan Koperasi Siswa (seperti “Koperasi Maju Bersama” di SMA/SMK) sebagai inovasi layanan publik. Meski besaran dukungan APBD bervariasi, kehadiran anggaran daerah memastikan program pusat dapat sinergi dengan kebutuhan lokal.

3.2.2.6 Perkembangan Dukungan Pembiayaan Pemerintah untuk Pengembangan Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan

Selain anggaran belanja, pemerintah mendukung pengembangan koperasi melalui skema pembiayaan murah. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijamin pemerintah, misalnya, dapat diakses oleh anggota koperasi atau koperasi yang bergerak di sektor produksi UMKM. Di Sumsel, penyaluran KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri kecil) secara tidak langsung membantu koperasi karena banyak anggota koperasi mendapatkan kredit modal usaha dengan bunga rendah dari bank pelaksana KUR. Pemerintah pusat juga memiliki LPDB-KUMKM yang khusus menyalurkan pinjaman/pembiayaan kepada koperasi. Sumatera Selatan tercatat sebagai salah satu provinsi tujuan LPDB, di mana beberapa koperasi (terutama koperasi simpan

pinjam dan koperasi pertanian) telah menerima kucuran dana bergulir untuk memperkuat modal mereka. Di samping itu, selama masa pemulihan pandemi COVID-19, pemerintah menyalurkan Banpres Produktif dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) UMKM yang sarannya juga mencakup anggota-anggota koperasi dan usaha mikro yang berada di bawah naungan koperasi. Kombinasi berbagai dukungan pembiayaan ini memberikan akses permodalan lebih luas bagi koperasi Sumsel, meskipun tantangannya adalah memastikan koperasi mampu menyerap dan memanfaatkan pembiayaan tersebut secara efektif untuk mengembangkan usahanya.

3.3 Tantangan dalam Pengembangan Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan

Meskipun jumlah koperasi di Sumatera Selatan terus bertambah, tantangan dalam pengembangannya cukup signifikan. Beberapa kendala utama antara lain:

1. **Kualitas dan Keaktifan Koperasi.**
Salah satu indikator kualitas koperasi adalah penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin. Kenyataannya, hanya sedikit koperasi di Sumsel yang tertib melaksanakan RAT setiap tahun. Rendahnya kepatuhan terhadap prinsip tata kelola ini mencerminkan masih sedikitnya koperasi yang menerapkan tata kelola usaha yang baik di Sumatera Selatan. Akibatnya, koperasi “kurang sehat” menumpuk dan kinerja sektoral tidak optimal. Dinas Koperasi Sumsel juga mengakui jumlah koperasi yang betul-betul aktif dan berkelanjutan masih terbatas, sementara banyak yang hanya ada secara administratif namun minim kegiatan.
2. **Kapasitas/Kompetensi Sumber Daya Manusia.**
Keterbatasan kemampuan pengurus dan pengelola koperasi menjadi kendala klasik. Banyak koperasi didirikan atas dasar semangat kekeluargaan, namun pengurusnya belum memiliki keahlian manajerial memadai. Pembinaan menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan kompetensi dalam hal pembukuan, manajemen usaha, pemanfaatan teknologi, hingga inovasi bisnis. Koperasi di pedesaan misalnya, sering kali dikelola oleh SDM berpendidikan menengah, sehingga butuh pendampingan ekstra untuk menjalankan usaha secara profesional.
3. **Sektor Usaha yang Terbatas (Simpan Pinjam).**
Struktur koperasi Sumsel didominasi koperasi simpan pinjam, yang meski bermanfaat memenuhi kebutuhan kredit mikro anggota, namun tidak banyak menyerap tenaga kerja baru. Koperasi jenis ini umumnya tidak memiliki kegiatan produksi atau usaha skala besar, sehingga dampaknya pada ekonomi lokal kurang terdiferensiasi. Sementara itu, koperasi sektor produksi, pemasaran, atau jasa masih relatif sedikit dan skala usahanya kecil. Diversifikasi jenis koperasi menjadi tantangan agar koperasi bisa hadir di sektor-sektor strategis (pertanian, perdagangan, industri kreatif, dll) dengan dampak ekonomi lebih luas.
4. **Permodalan dan Akses Pembiayaan.**
Koperasi menghadapi kendala permodalan, terutama untuk ekspansi usaha. Modal awal koperasi biasanya bersumber dari simpanan anggota yang terbatas jumlahnya. Untuk tumbuh, koperasi memerlukan akses kredit/pembiayaan, namun tak semua koperasi mampu memenuhi syarat perbankan. Meskipun ada LPDB dan KUR, masih banyak koperasi di Sumsel yang belum tersentuh skema ini. Keterbatasan modal juga membuat

aset koperasi stagnan dan sulit bersaing, seperti disinggung oleh Wamen Koperasi bahwa aset koperasi nasional perlu ditingkatkan karena selama ini hanya mengelola hal kecil-kecil. Hal ini berlaku pula di Sumsel, koperasi sulit masuk ke usaha bernilai tambah tinggi tanpa dukungan modal kuat.

5. **Pemanfaatan Teknologi dan Pemasaran Modern yang Rendah.**
Di era digital, banyak koperasi belum mengadopsi teknologi informasi dalam operasionalnya. Misalnya, pencatatan keuangan masih manual, tidak memiliki sistem informasi keanggotaan, dan belum memanfaatkan pemasaran online. Padahal, untuk menjangkau pasar lebih luas (terutama bagi koperasi produksi/UKM), kemampuan e-commerce, branding, dan kemitraan perlu ditingkatkan. Rendahnya adopsi digital ini sebagian karena keterbatasan SDM serta belum meratanya infrastruktur pendukung (akses internet) di wilayah desa terpencil Sumsel.
6. **Tantangan Kelembagaan di Tingkat Desa/Kelurahan.**
Meskipun di Sumsel terdapat ribuan desa/kelurahan, tidak semuanya memiliki koperasi aktif. Pendirian koperasi di tingkat lokal masih menghadapi kendala seperti minimnya inisiatif masyarakat, kurangnya dukungan teknis, atau persaingan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang perannya hampir sama. Sinergi antara BUMDes dan koperasi belum terumuskan jelas, sehingga kadang keduanya berjalan sendiri-sendiri padahal dapat saling melengkapi. Selain itu, regenerasi koperasi juga menjadi tantangan, perlu menarik minat generasi muda desa untuk aktif di koperasi agar kelembagaan ini tidak didominasi anggota yang berusia tua.
7. **Regulasi dan Pengawasan.**
Di tengah upaya penguatan hukum (seperti rencana pembaruan UU Koperasi), koperasi masih menghadapi tumpang tindih aturan, terutama koperasi yang menjalankan jasa keuangan. Perpindahan pengawasan koperasi simpan pinjam ke OJK (sesuai UU P2SK) memunculkan masa transisi yang menantang bagi koperasi di daerah, karena harus menyesuaikan standar OJK yang lebih ketat. Pengawasan oleh dinas selama ini juga terbatas jumlah SDM-nya (hanya beberapa orang untuk ratusan koperasi per kabupaten), sehingga tidak semua koperasi terpantau kesehatannya.

Berbagai tantangan di atas saling terkait dan membutuhkan strategi penanganan komprehensif. Kualitas koperasi yang bervariasi (sebagian besar masih “lemah”) menjadi pekerjaan rumah agar keberadaan koperasi benar-benar berperan dalam perekonomian daerah.

3.4 Strategi Pengembangan Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah dan pelaku koperasi di Sumsel telah dan perlu menerapkan berbagai strategi pengembangan. Upaya strategis yang ditempuh mencakup:

1. **Peningkatan Pembinaan dan Pendampingan.**
Pemerintah daerah terus menggiatkan program pembinaan koperasi di 17 kabupaten/kota. Dinas Koperasi

dan UKM Sumsel secara rutin menyambangi koperasi-koperasi, terutama yang dinilai kurang aktif, untuk diberikan pendampingan. Materi pembinaan meliputi tata kelola organisasi, penyusunan laporan keuangan, hingga penyelenggaraan RAT. Selain itu, pendampingan usaha diberikan agar koperasi dapat mengidentifikasi peluang bisnis baru. Kepala Dinas Koperasi Sumsel menyatakan bahwa pembinaan bertujuan memberdayakan koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Pemprov juga mendorong agar koperasi melakukan *benchmarking* atau studi banding ke koperasi sukses di daerah lain sebagai bagian dari pendampingan.

2. **Mendorong Pengembangan Unit Usaha dan Inovasi Bisnis.** Pemerintah mengimbau koperasi untuk tidak stagnan pada satu jenis usaha saja. Pengurus koperasi didorong melakukan pengembangan kegiatan usaha untuk meningkatkan pendapatan anggota. Contohnya, koperasi simpan pinjam didorong melebarkan sayap ke unit usaha ritel (toko koperasi) atau jasa pembayaran, koperasi pertanian didorong tidak hanya menjual gabah tetapi mengolah beras kemasan, dan koperasi pegawai diminta berinovasi menyediakan layanan kredit berbasis digital. Upaya ini perlu dilakukan agar koperasi bisa menawarkan manfaat lebih besar bagi anggota dan bersaing dengan entitas bisnis lain. Pemerintah pusat juga telah membuka kesempatan luas: kini koperasi dibolehkan terlibat dalam usaha besar apapun selama memenuhi ketentuan. Strategi ini menuntut koperasi berani berinovasi, misalnya membentuk konsorsium koperasi untuk menangani proyek besar. Inovasi produk dan model bisnis (seperti *coop startup* di bidang digital) juga mulai diperkenalkan melalui berbagai pelatihan kreatif bagi pengelola koperasi muda.
3. **Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif dan Reformasi Tata Kelola.** Untuk menyehatkan koperasi, strategi “reformasi total koperasi” dijalankan melanjutkan kebijakan Kemenkop beberapa tahun terakhir. Koperasi tidak aktif dalam dua tahun berturut-turut didorong untuk revitalisasi melalui musyawarah anggota (RAT khusus) di desa/kelurahan. Bila masih memiliki potensi, koperasi tersebut dibangkitkan kembali dengan restrukturisasi pengurus atau penggabungan dengan koperasi lain. Sebaliknya, koperasi yang benar-benar fakum/dorman diusulkan untuk dibubarkan sesuai prosedur agar tidak membebani statistik. Pemerintah provinsi mengapresiasi inisiatif pembentukan koperasi baru yang relevan (seperti Koperasi di Ponpes, komunitas pemuda, dll) untuk menggantikan koperasi lama yang kurang berkembang. Reformasi tata kelola juga ditekankan: koperasi berkualitas harus menerapkan prinsip *good governance*, transparan pada anggota, dan patuh regulasi. Dinas Koperasi memperbanyak sosialisasi aturan (termasuk aturan baru OJK bagi koperasi simpan pinjam) agar koperasi di Sumsel siap beradaptasi dan dikelola lebih profesional.
4. **Penguatan Permodalan dan Akses Finansial.** Strategi lain adalah meningkatkan akses koperasi pada sumber modal. Pemprov Sumsel bekerja sama dengan LPDB-KUMKM untuk menjaring koperasi potensial yang layak mendapat pinjaman dana bergulir. Koperasi juga difasilitasi dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kolektif bagi anggotanya. Sebagai contoh, beberapa koperasi di sektor pertanian didorong menjadi penyalur pupuk atau sarana produksi dengan dukungan kredit

distributor, sehingga memperoleh margin usaha. Selain itu, terdapat inisiatif membentuk koperasi sekunder atau konsorsium koperasi (“Koperasi Merah Putih”) yang dapat menghimpun modal lebih besar lintas koperasi. Koperasi sekunder tingkat provinsi dapat bertindak layaknya lembaga keuangan mikro skala besar yang melayani koperasi primer (misal menyediakan kredit antar koperasi). Dengan strategi ini, diharapkan koperasi kecil yang tergabung bisa mendapat permodalan yang lebih baik. Pemerintah pusat pun mendorong skema pembiayaan inovatif untuk koperasi, misalnya melalui bank wakaf mikro atau investasi penyertaan modal pemerintah ke koperasi strategis, meski implementasinya masih bertahap.

5. **Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Koperasi.** Menyadari tantangan era 4.0, strategi digitalisasi koperasi gencar dilakukan. Advokasi dan pelatihan digitalisasi telah dijalankan di Sumsel untuk mengedukasi koperasi menggunakan aplikasi pembukuan, *platform* marketplace, hingga pembayaran digital. Beberapa koperasi besar di Palembang mulai mengembangkan sistem informasi keanggotaan dan mobile app untuk mempermudah anggota bertransaksi (misal aplikasi koperasi simpan pinjam untuk cek saldo dan pengajuan pinjaman online). Dinas Koperasi Sumsel berkolaborasi dengan Diskominfo menghadirkan bimbingan teknis IT bagi pengelola koperasi, sesuai arahan Gubernur bahwa koperasi Sumsel harus mengikuti perkembangan zaman agar bisa mensejahterakan anggotanya. Modernisasi lainnya adalah mendorong sertifikasi: koperasi didorong memiliki sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi), izin usaha mikro kecil (IUMK) bagi unit usahanya, dan terhubung ke ekosistem digital UMKM. Dengan masuk ke ekosistem digital, koperasi diharapkan lebih inovatif, efisien, dan menarik minat generasi muda untuk bergabung.
6. **Kemitraan dan Jaringan Usaha.** Strategi pengembangan juga mencakup menjalin kemitraan antara koperasi dengan berbagai pihak. Pemprov Sumsel memfasilitasi pertemuan koperasi dengan perusahaan swasta dan BUMN untuk membuka peluang kerja sama. Contohnya, koperasi petani karet difasilitasi bermitra dengan pabrik ban, koperasi produsen makanan tradisional diajak kerja sama dengan retail modern dan platform ekspor. Sinergi dan pemberdayaan UMKM melalui koperasi juga menjadi tujuan, karena koperasi bisa bertindak sebagai aggregator produk UMKM untuk menembus pasar yang lebih besar. Kemenkop UKM sendiri memiliki program seperti PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) yang di Sumsel difungsikan untuk mempertemukan pelaku UMKM/koperasi dengan pendamping bisnis, perbankan, hingga offtaker. Jaringan antar koperasi pun diperkuat lewat gerakan gerakan koperasi regional, misalnya Dekopinwil Sumsel mendorong koperasi saling membeli produk koperasi lain (integrasi hulu-hilir antar koperasi).

Strategi-strategi di atas, baik yang dijalankan pemerintah maupun internal koperasi, diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan koperasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Kunci utamanya adalah keberlanjutan pendampingan dan konsistensi kebijakan pro-koperasi, sehingga pada gilirannya koperasi Sumatera Selatan dapat semakin berperan dalam pembangunan ekonomi daerah.

3.5 Rekomendasi: Peran Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dalam Pengembangan Koperasi di Daerah

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan koperasi di daerah melalui perspektif fiskal. Sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil DJPb dapat berkontribusi dengan langkah-langkah berikut:

1. **Memastikan Efektivitas Penyaluran Dana APBN untuk Koperasi.**
Kanwil DJPb berperan menyalurkan berbagai dana pusat ke daerah, termasuk DAK Non Fisik PK2UMKM dan dana dekonsentrasi Kemenkop UKM. DJPb Sumsel harus memastikan penyaluran dana tersebut tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu, DJPb dapat melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana tersebut bersama Pemda. Dengan memonitor realisasi anggaran pembinaan koperasi, DJPb bisa mengidentifikasi kendala penyerapan anggaran dan membantu mencari solusi (misal percepatan revisi anggaran jika diperlukan atau asistensi administrasi penyaluran). Peran ini penting agar setiap rupiah dari APBN untuk koperasi benar-benar dimanfaatkan optimal di lapangan.
2. **Fasilitasi Sinergi Pendanaan Koperasi lintas Sektor.**
Kanwil DJPb dapat menjadi fasilitator koordinasi lintas instansi di Sumsel. Misalnya, DJPb dapat menginisiasi Forum Koordinasi Pengembangan KUMKM yang melibatkan Bappeda, Dinas Koperasi, perbankan, dan lembaga pendanaan (LPDB, Jamkrida, dll). Dalam forum semacam ini, DJPb dapat menyajikan data fiskal (alokasi APBN dan APBD untuk koperasi) dan mendorong sinergi program. Contohnya, mendorong agar dana bergulir pusat (LPDB) dipadukan dengan pendampingan dinas, atau agar Bank Himbara penyalur KUR meningkatkan porsi KUR ke sektor produksi di mana koperasi terlibat. Melalui *Kemenkeu One* di daerah, DJPb bersama unit Kemenkeu lain (Kanwil Ditjen Pajak, Bea Cukai) juga dapat mendukung koperasi antara lain melalui sosialisasi insentif pajak untuk koperasi beromzet kecil atau fasilitasi ekspor produk koperasi.
3. **Pendekatan Kebijakan Berbasis Data (*Data-Driven Policy*).**
DJPb memiliki akses pada berbagai data keuangan negara. Kanwil DJPb Sumsel dapat menyusun analisis fiskal regional tematik (seperti laporan ini) secara rutin mengenai koperasi dan UMKM. Hasil analisis, lengkap dengan data capaian dan kendala, dapat disampaikan ke pemerintah daerah sebagai masukan perumusan kebijakan. Misalnya, jika data menunjukkan dukungan APBD untuk koperasi di beberapa kabupaten masih sangat kecil, DJPb bisa merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran pada tahun berikutnya. Begitu pula, jika realisasi DAK PK2UMKM rendah karena SDM pelaksana kurang, DJPb bisa mengusulkan pelatihan bagi pengelola dana. Dengan data yang kuat, Kanwil DJPb dapat menjadi advisor fiskal bagi Pemda untuk memperkuat program pemberdayaan koperasi.
4. **Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Koperasi.**
Walaupun tugas utama DJPb terkait pengelolaan keuangan negara, namun DJPb dapat berkontribusi tidak langsung pada koperasi melalui *capacity building*. Kanwil DJPb dapat bekerja sama dengan Dinas Koperasi mengadakan bimtek pengelolaan keuangan dan akuntabilitas untuk pengurus koperasi. Materi seperti

penyusunan laporan keuangan sederhana, pengelolaan kas, hingga literasi kredit dapat diberikan oleh pejabat Kemenkeu atau praktisi yang difasilitasi DJPb. Langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan tata kelola koperasi. DJPb juga dapat mendorong agar koperasi memanfaatkan teknologi seperti aplikasi sistem akuntansi sederhana yang mungkin disediakan pemerintah (sebagai bagian dari digitalisasi).

5. **Mendorong Pemanfaatan Produk/Peran Koperasi dalam Belanja Pemerintah.**
Kanwil DJPb dapat mengidentifikasi peluang keterlibatan koperasi dalam belanja negara/daerah. Contohnya, mengajak koperasi berpartisipasi sebagai penyedia barang/jasa untuk pengadaan pemerintah skala UKM (e-catalog lokal bisa diisi produk koperasi). Jika ada program penyaluran bantuan sosial atau kredit ultra mikro di Sumsel, DJPb bisa mengusulkan agar koperasi di desa dilibatkan sebagai penyalur (tentu dengan koordinasi instansi terkait). Selain itu, DJPb dapat membantu mempromosikan produk unggulan koperasi Sumsel (hasil kerajinan, pertanian, dll) dalam event Kemenkeu Satu atau pameran yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, sehingga jaringan pemasaran koperasi bertambah luas.
6. **Penguatan Akuntabilitas dan Pelaporan.**
DJPb memiliki budaya tinggi dalam hal akuntabilitas keuangan. Kanwil DJPb dapat menularkan praktik baik ini ke pengelolaan keuangan koperasi daerah. Misalnya, mendorong Pemda untuk mewajibkan koperasi penerima hibah bantuan modal melaporkan penggunaan dana secara transparan. DJPb bisa membantu menyusun format pelaporan sederhana yang memudahkan koperasi namun akuntabel. Dengan demikian, setiap bantuan fiskal untuk koperasi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, meningkatkan trust pemerintah untuk terus mendanai gerakan koperasi.

Secara keseluruhan, Kanwil DJPb Sumsel dapat berperan sebagai katalis yang menjembatani kebijakan fiskal dengan pengembangan koperasi. Kolaborasi erat dengan Dinas Koperasi, Kanwil Kemenkop UKM, dan stakeholder lainnya akan memaksimalkan dampak. Peran DJPb yang biasanya “di balik layar” dalam penyaluran dana, dapat ditingkatkan menjadi turut aktif memberi solusi atas hambatan penyerapan anggaran dan efektivitas program koperasi. Dengan demikian, dukungan fiskal yang tersedia bagi koperasi dapat dioptimalkan untuk mendorong kebangkitan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Sumatera Selatan.

3.6 Potensi Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2.556 desa/kelurahan dengan beragam potensi ekonomi lokal, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga wisata. Potensi ini dapat dikembangkan melalui kelembagaan koperasi di tingkat desa/kelurahan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Beberapa arah pengembangan koperasi desa yang dapat dioptimalkan antara lain:

1. **Revitalisasi KUD dan Koperasi Pertanian di Pedesaan.**
Sejarahnya, banyak desa di Sumsel pernah memiliki Koperasi Unit Desa (KUD) yang melayani kebutuhan petani (distribusi pupuk, pinjaman, pemasaran hasil panen). Potensi ini bisa dihidupkan kembali dengan model baru yang lebih modern. Sebagai contoh, sentra pertanian padi

di Banyuasin dan OKU Timur dapat memperkuat koperasi pertaniannya untuk mengelola penggilingan padi dan pemasaran beras secara kolektif. Demikian pula koperasi petani karet di Musi Banyuasin dan OKU Selatan bisa didorong melakukan hilirisasi sederhana (misal olah bokar menjadi produk setengah jadi) sehingga nilai tambah dapat dinikmati petani. Pemerintah desa bersama penyuluh lapangan dapat memfasilitasi pendirian koperasi baru atau mengaktifkan kembali koperasi lama melalui musyawarah desa, sesuai harapan Gubernur Sumsel agar setiap desa dapat memiliki koperasi aktif.

2. Pembentukan Koperasi di Sektor Unggulan Desa.

Setiap desa/kelurahan di Sumsel umumnya memiliki produk unggulan atau komoditas khas sehingga membuka peluang untuk mendirikan koperasi sesuai komoditas. Misalnya, desa penghasil kopi (di daerah Pagar Alam, Lahat) membentuk koperasi petani kopi untuk mengelola produksi, pengolahan, hingga pemasaran kopi bubuk khas Sumsel. Di desa sentra perikanan (seperti Kabupaten Banyuasin dengan budidaya ikan air tawar), dapat dibentuk koperasi nelayan/pembudidaya ikan yang menyediakan pakan, benih, sekaligus menampung hasil panen ikan anggota. Begitu pula potensi pariwisata desa (desa wisata di Empat Lawang atau OKU) bisa dikembangkan lewat koperasi wisata yang mengelola homestay, transportasi lokal, dan cinderamata secara terpadu. Dengan koperasi sektor spesifik di desa, ekonomi lokal bisa lebih terorganisir dan keuntungan tidak bocor keluar tetapi kembali ke anggota masyarakat desa.

3. Sinergi Koperasi dengan BUMDes.

Banyak desa kini sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan berdasarkan UU Desa. Koperasi desa dapat bersinergi dengan BUMDes daripada berkompetisi. Pola yang dapat dikembangkan misalnya: BUMDes fokus pada usaha komersial milik pemerintah desa, sedangkan koperasi menjadi milik warga/anggota yang melayani kebutuhan ekonomi anggota. BUMDes dapat bermitra dengan koperasi dalam proyek tertentu, misalnya BUMDes membangun pasar desa sementara koperasi pengelola pasar harian tersebut, atau BUMDes membuka agrobisnis kebun desa dan koperasi menjadi offtaker hasil kebun milik anggota. Sinergi ini memerlukan kesepahaman di tingkat desa, yang bisa difasilitasi oleh pendamping desa dan dinas terkait. Jika kolaborasi terjalin baik, ekosistem ekonomi desa akan kuat: BUMDes memastikan pelayanan publik dan infrastruktur bisnis, koperasi memastikan pemberdayaan ekonomi warga secara inklusif.

4. Koperasi Jasa Keuangan Mikro di Desa.

Selain koperasi sektor riil, kebutuhan permodalan mikro di pedesaan bisa diatasi dengan mendirikan koperasi simpan pinjam atau unit jasa keuangan mikro berbasis koperasi (misal koperasi wanita, koperasi syariah). Dengan hadirnya Lembaga Keuangan Mikro Desa (seperti LKD atau BKD sebelumnya) yang berbadan hukum koperasi, warga

desa terhindar dari rentenir dan bisa mendapatkan pinjaman mudah untuk usaha. Program pemerintah seperti Bantuan Keuangan bergulir ultramikro (UMi) atau subsidi bunga KUR Klaster bisa disalurkan lewat koperasi desa semacam ini. Potensi ini besar mengingat budaya gotong royong masih kental, sehingga kesadaran menabung dan saling membantu melalui koperasi keuangan bisa tumbuh subur jika dikelola baik.

5. Peningkatan Kualitas SDM dan Kaderisasi di Desa.

Agar koperasi desa berkelanjutan, diperlukan kader penggerak di tingkat lokal. Potensi pemuda desa, terutama yang kembali ke desa dengan pendidikan lebih tinggi, dapat diarahkan menjadi motor koperasi. Pemerintah desa dapat melibatkan Karang Taruna atau pemuda setempat dalam kepengurusan koperasi, sehingga terjadi regenerasi. Program Koperasi Siswa atau Mahasiswa yang digagas di beberapa tempat (seperti Koperasi di SMA/SMK Lahat) juga dapat menjadi inkubator kader koperasi desa di masa depan. Dengan edukasi perkoperasian sejak dini di sekolah atau perguruan tinggi lokal (misal Politeknik Negeri Sriwijaya memiliki program pendampingan koperasi mahasiswa), diharapkan lahir generasi muda yang melek koperasi dan bersedia mengembangkan desanya melalui model usaha kolektif.

6. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Desa.

Potensi koperasi desa juga bisa ditingkatkan dengan adopsi teknologi tepat guna. Koperasi pertanian bisa mengelola *drone* penyemprot pupuk bersama, koperasi peternak bisa membuat unit pembuatan pakan fermentasi, koperasi kerajinan bisa memanfaatkan *marketplace online* untuk memasarkan produk desa ke kota. Pendampingan TI dari Kominfo atau akademisi (KKN Tematik) bisa diarahkan agar koperasi desa tidak tertinggal dalam hal pemasaran dan informasi. Potensi e-commerce produk desa (seperti penjualan makanan khas, buah segar, dll) sangat besar jika dikelola melalui koperasi karena menjamin kontinuitas suplai dan standar mutu.

Melihat berbagai inisiatif tersebut, jelas bahwa pengembangan koperasi di level desa/kelurahan merupakan kunci pemberdayaan ekonomi di Sumsel. Pemprov Sumsel sendiri telah mengindikasikan dukungannya, antara lain dengan launching program “Koperasi Merah Putih” di pondok pesantren yang melibatkan konsorsium beberapa koperasi desa. Hal ini menunjukkan model pemberdayaan berbasis komunitas (desa, pesantren, kelompok tani) melalui koperasi mulai digalakkan. Untuk memaksimalkan potensi ini, perlu kesinambungan kebijakan: regulasi yang memudahkan pendirian koperasi di desa, alokasi Dana Desa yang sinergis (mungkin sebagian Dana Desa dapat digunakan sebagai penyertaan modal awal koperasi), serta pendampingan intensif pasca pembentukan. Jika setiap desa di Sumsel memiliki setidaknya satu koperasi yang dikelola baik, hal ini akan menjadi jaringan ekonomi kerakyatan yang kokoh, menopang kemandirian ekonomi desa dan mengurangi ketimpangan kota-desa.

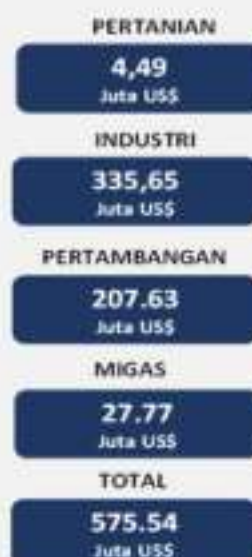
Boks 3

Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Provinsi Selatan

Perkembangan Pertumbuhan Ekspor (m-to-m, %)



Ekspor Sumsel Menurut Sektor



Perdagangan luar negeri Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2025 mengalami dinamika penting yang mencerminkan tantangan global dan potensi regional. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor tercatat sebesar 575,54 juta US dollar, didominasi oleh sektor pertambangan (335,65 juta US\$), industri (207,63 juta US\$), migas (27,77 juta US\$), dan pertanian (4,49 juta US\$). Ekspor Sumsel masih menunjukkan surplus, namun demikian secara bulanan (month-to-month) terjadi penurunan akibat melemahnya kinerja komoditas utama seperti batubara, CPO, dan buah-buahan tahunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perang dagang AS-Tiongkok dan ketegangan geopolitik India-Pakistan, yang turut memengaruhi permintaan pasar global.

Perkembangan Pertumbuhan Impor (m-to-m, %)



Impor Sumsel Menurut Penggunaan Barang



Sementara itu, nilai impor Sumatera Selatan pada bulan yang sama mencapai 207,63 juta US dollar, juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya impor mesin dan peralatan mekanis, plastik dan turunannya, serta perlengkapan listrik, yang dapat mencerminkan perlambatan aktivitas industri di dalam negeri.

Untuk memperkuat daya saing, Sumatera Selatan perlu melakukan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan ASEAN, Afrika, dan Uni Eropa, serta meningkatkan kualitas produk melalui inovasi dan standar internasional. Pembangunan infrastruktur logistik, adopsi teknologi digital, dan penguatan kerja sama internasional juga menjadi langkah strategis yang perlu diambil.

Meskipun terdapat penurunan nilai ekspor dan impor, Sumatera Selatan masih mencatatkan surplus neraca perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tetap signifikan, sehingga upaya peningkatan kinerja ekspor-impor menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.





04

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan	Rekomendasi
Ekonomi dan Kesejahteraan	
1. Perekonomian Sumatera Selatan tumbuh solid sebesar 5,22% (yoy), tertinggi kedua di Pulau Sumatera, ditopang oleh ekspor luar negeri yang melonjak, konsumsi rumah tangga yang stabil, serta peningkatan mobilitas dan pariwisata domestik. Namun, pemulihan belum merata antar komponen pengeluaran maupun sektor produksi, dengan konsumsi pemerintah dan PMTB masih tertahan akibat lambatnya realisasi belanja produktif dan investasi fisik. 2. Sektor eksternal menjadi pengungkit utama, ditopang surplus perdagangan luar negeri tertinggi dalam dua tahun terakhir, didorong oleh ekspor batubara, pulp, dan komoditas olahan lain yang meningkat baik dari sisi nilai maupun volume. Sektor lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan positif pada Pertanian, Perdagangan, dan Pertambangan, namun sektor Konstruksi dan Industri Pengolahan mengalami perlambatan. 3. Di sisi harga, inflasi tahunan Sumsel mulai meningkat namun tetap terkendali, meskipun tekanan struktural seperti <i>imported inflation</i>, rantai pasok yang belum efisien, serta ketergantungan terhadap komoditas dan negara mitra utama masih membayangi. 4. Pasar tenaga kerja Sumsel membaik, tercermin dari peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), penurunan setengah pengangguran, serta perbaikan kualitas kerja. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) menguat, mencerminkan daya beli petani yang semakin baik, terutama dari subsektor pangan dan perkebunan.	1. Percepatan/akselerasi realisasi belanja produktif dan PMTB daerah. Pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti percepatan pelaksanaan belanja modal, terutama proyek strategis yang berpotensi mendorong <i>multiplier effect</i> pada perekonomian. Sinergi antara Pemda dan K/L perlu diperkuat untuk percepatan DAK Fisik, penyelesaian tender dini, serta penguatan eksekusi proyek PSN yang telah tercantum dalam RPJMN 2025–2029. 2. Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan logistik pelabuhan. Dengan dominasi pasar ekspor Sumsel ke Tiongkok dan India, diversifikasi ke negara non-tradisional seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan menjadi langkah strategis yang perlu diakselerasi melalui diplomasi dagang dan fasilitasi akses pelaku usaha lokal ke pasar ekspor baru. Untuk menopangnya, percepatan pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat perlu menjadi prioritas sebagai <i>deep sea port</i> pertama di Sumsel yang mampu menampung kapal berukuran besar dan mengurangi ketergantungan pada pelabuhan luar provinsi. Proyek ini berpotensi memangkas biaya logistik ekspor secara signifikan dan memperkuat daya saing produk unggulan Sumsel. Oleh karena itu, Pemprov perlu mempercepat penyelesaian lahan dan perizinan, memastikan konektivitas ke sentra produksi melalui jalan industri dan jalur kereta api, serta mendorong integrasi pelabuhan dengan sistem logistik digital nasional untuk menciptakan rantai pasok ekspor yang efisien dan terhubung langsung ke pasar global. 3. Pengendalian inflasi melalui penguatan rantai pasok pangan lokal. Meskipun inflasi terkendali, volatilitas komoditas pangan strategis seperti beras, cabai merah, dan bawang merah masih tinggi. Pemda perlu memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan mengoptimalkan distribusi pangan, termasuk dengan mendukung integrasi petani-pasar melalui digitalisasi, serta memperkuat data pangan lokal yang <i>real-time</i>. 4. Perluasan pelatihan vokasi dan <i>link-and-match</i> untuk sektor prioritas. Dengan penurunan serapan tenaga kerja di sektor industri dan masih tingginya pengangguran terdidik (terutama lulusan SMK), penting bagi Pemprov untuk memperluas program vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan sektor industri pengolahan, manufaktur, dan energi. Skema magang industri dan sertifikasi keahlian perlu diperluas di kawasan industri utama Sumsel. 5. Intervensi khusus untuk subsektor hortikultura dan perikanan. Meskipun NTP meningkat, subsektor hortikultura dan perikanan masih menghadapi tekanan dari sisi harga jual dan biaya produksi. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain: insentif transportasi untuk komoditas mudah rusak, subsidi distribusi input produksi, serta revitalisasi <i>cold storage</i> dan gudang pangan. 6. Optimalkan momentum konsumsi domestik melalui pariwisata lokal. Kinerja subsektor akomodasi belum sejalan dengan pertumbuhan wisatawan. Pemda dapat mendorong promosi wisata lokal dengan memanfaatkan momentum hari besar nasional dan keagamaan, serta mendukung penyelenggaraan event tematik berbasis komunitas yang melibatkan UMKM dan pelaku industri kreatif.

Kesimpulan	Rekomendasi
Fiskal Regional	
1. Pelaksanaan APBN di Sumatera Selatan menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Penerimaan negara mampu tumbuh secara positif, ditopang oleh kinerja perpajakan yang meningkat meskipun beberapa pos seperti PNPB dan Pajak Penghasilan menurun. Di sisi lain, realisasi belanja negara sedikit terkontraksi karena adanya kebijakan efisiensi, khususnya pada belanja pemerintah pusat. Namun demikian, belanja daerah tetap tumbuh dan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan APBD di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Secara keseluruhan, pelaksanaan APBN dan APBD masih berada pada jalur yang tepat meskipun perlu diwaspadai beberapa tantangan ke depan. 2. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 berdampak pada Belanja APBN di Triwulan I 2025 yang mengalami kontraksi dibanding periode tahun sebelumnya karena adanya blokir anggaran sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut. Di sisi lain pada Penerimaan PNPB juga mengalami kontraksi khususnya pada PNPB BLU Pendidikan karena perubahan status Universitas Sriwijaya yang sebelumnya sebagai Satker BLU menjadi PTNBH. 3. Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Sumsel masih menghadapi beberapa tantangan, diantaranya Terjadinya gagal salur DAU pendanaan kelurahan dipengaruhi kesulitan kantor kelurahan dalam merealisasikan dana tersebut. Hal ini terjadi disebabkan karena masih terbatasnya kapasitas SDM di kelurahan untuk mengelola DAU Pendanaan Kelurahan. Selain itu, adanya ketakutan kantor kelurahan terhadap kemungkinan diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi faktor penahan kesulitan merealisasikan dana tersebut, dan pemenuhan syarat salur Dana Desa yang berakibat dikenakan sanksi penundaan DAU dan proses penyaluran dana desa yang belum optimal di tahap I 2025. 4. Kinerja APBD di Sumsel di Triwulan I 2025 tetap berkinerja baik walau dalam transisi pemerintahan baru dan intruksi efisiensi di awal tahun. 5. Pendapatan daerah mengalami kontraksi sebesar -20,72% (yoy). Perlambatan terjadi pada semua sektor pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan lainnya. Pendapatan daerah dikontribusi oleh pendapatan transfer sebesar 79,09%. 6. Belanja daerah tumbuh sebesar 14,64% (yoy), didorong oleh pertumbuhan pada semua jenis belanja kecuali belanja transfer yang melambat sebesar -36,02% (yoy). Kinerja belanja daerah masih ditopang oleh belanja operasi sebesar 86,07%. 7. Terkait perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan masih terdapat beberapa	1. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, perlu dilakukan diversifikasi basis pajak dengan mengembangkan sektor-sektor baru seperti digital, ekonomi kreatif, dan jasa. Penguatan administrasi perpajakan melalui digitalisasi dan integrasi data antar lembaga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar potensi pajak di Sumatera Selatan dapat tergali secara optimal. Di sisi lain, mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga perlu disesuaikan agar tetap adaptif terhadap perubahan kelembagaan, seperti pada transformasi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH. Skema pendapatan negara dari PTNBH tidak berbentuk PNPB langsung, tetapi melalui kontribusi tidak langsung seperti dividen, laporan aset, atau kontribusi akademik dan inovasi. Oleh karena itu, jika ingin menjaga kontribusi fiskal dari lembaga eks-BLU seperti Universitas Sriwijaya, perlu disusun mekanisme pelaporan khusus atau pengenaan kewajiban kontribusi tertentu yang sesuai dengan otonomi PTNBH. 2. Terkait percepatan proses rekonsiliasi pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak perlu membentuk tim/ satuan tugas percepatan rekonsiliasi pajak khususnya di Kota Palembang dan Prabumulih. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk lebih aktif dalam melakukan koordinasi dan validasi data dengan kantor pajak guna menghindari penundaan transfer DBH yang berdampak pada arus kas daerah. 3. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Belanja Pemerintah: Kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah melalui blokir anggaran di Triwulan I tahun 2025 perlu diiringi dengan monitoring atas ketercapaian output belanja pemerintah. Dalam hal nantinya berdasarkan monitoring diketahui bahwa dengan adanya blokir anggaran namun output masih dapat tetap tercapai maka kebijakan blokir pagu anggaran dapat ditindaklanjuti dengan merelokasi anggaran yang diblokir untuk dialokasikan pada belanja lain yang lebih prioritas. Sedangkan dari sisi penerimaan PNPB perlu dilakukan optimalisasi penerimaan PNPB dari sumber-sumber lain selain penerimaan PNPB K/L salah satunya dengan upaya peningkatan PNPB dari Sumber Daya Alam yang banyak tersedia di Wilayah Sumsel. 4. Optimalisasi Pendapatan Daerah: Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Konsumsi (PBJT). Kampanye kesadaran pajak dan inovasi dalam sistem pembayaran pajak berbasis teknologi juga perlu diperluas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 5. Pemenuhan syarat salur TKD tepat waktu: Pemda dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan dan KPPN di wilayah masing-masing terkait dengan pemenuhan syarat salur untuk menghindari penundaan penyaluran Transfer ke Daerah sehingga dapat berdampak kepada kemampuan daerah untuk melakukan belanja mengingat pendapatan transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah di Sumsel. 6. Perlu adanya sinergi dan komunikasi antara Kepala Daerah, BPKAD dan OPD selaku pengelola keuangan/pengguna

Kesimpulan	Rekomendasi
kendala antara lain belum optimalnya SPPG dalam hal administrasi/operasional, termasuk lambatnya pelaksanaan pembayaran kepada mitra/penyedia.	anggaran daerah untuk memprioritaskan kegiatan peningkatan pelayanan ke masyarakat. 7. Perlu penguatan struktur organisasi pelaksana MBG di daerah yang didukung kapasitas administrasi dan birokrasi yang baik (good governance) termasuk dukungan teknologi dan informasi. Mekanisme pengadaan termasuk pembayaran juga perlu ditinjau ulang agar penerima hak pembayaran atas pelaksanaan kegiatan ini dapat segera mendapatkan haknya.
Analisis atas Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah	
1. Jumlah koperasi aktif di Sumatera Selatan dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami peningkatan sebesar 2% namun kualitas tata kelolanya masih belum optimal. 2. Kapasitas/kompetensi pengelola/pengurus koperasi masih banyak yang belum memadai sehingga masih membutuhkan pendampingan agar dapat mengembangkan kompetensi untuk memajukan koperasi. 3. Sektor usaha koperasi di Sumatera Selatan masih sangat terbatas yaitu didominasi koperasi simpan pinjam sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja.	1. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kerja sama untuk memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan, baik dari regulasi pemberdayaan, alokasi pada APBN/APBD, hingga bantuan pembiayaan yang menciptakan ekosistem kondusif bagi koperasi. 2. Perlunya peningkatan pembinaan dan pendampingan agar kualitas/kompetensi SDM pengelola dapat meningkat dalam menjalankan usaha koperasi secara lebih profesional. 3. Perlu diversifikasi jenis usaha koperasi agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, terlebih lagi pemerintah telah membuka kesempatan untuk dapat terlibat dalam usaha besar apapun.



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Kapten A. Rival No. 2, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135
Telp. (0711) 356534



djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/



@KantwilDJPbSumsel



@djpbsumsel



@KantwilDJPbSumsel

ISSN 3047-0994

